



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020



PATUHI
3M

Mencuci tangan
dengan sabun



Memakai
masker



Menghindari
kerumunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

A

ssalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas kemudahan dan pertolongan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat diselesaikan pada bulan Januari 2021.



Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja, berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2016-2020, sekaligus menjadi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tengah masa pandemi COVID-19. Dokumen ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta



Bab IV Penutup; memuat Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Perjanjian Kinerja (PK), dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lampiran Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020, serta Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.

Pelaporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020 ini juga disajikan melalui *website* www.slemankab.go.id pada menu "SAKIP untuk Publik", serta akan disampaikan juga kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu.

Kami berharap melalui penyelenggaraan SAKIP yang terus disempurnakan, akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kemanfaatan maupun kepercayaan publik.

Peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan SAKIP, dukungan instansi lain, dan juga masyarakat Sleman, terbukti telah mendukung keberhasilan implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman telah mencapai **Predikat "A"** dengan kategori interpretasi "memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel". Posisi Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu; pada tahun 2018 meraih nilai 81,72 dengan predikat A, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 81,99 dengan predikat A. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan semua pihak.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja ini mampu mempercepat perwujudan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya pada tahun 2021. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sleman, Februari 2021



Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020 atas perencanaan kinerja sebanyak 15 sasaran kinerja adalah: 14 sasaran kinerja (93,33%) mencapai kinerja kategori “**sangat berhasil**” yaitu terealisasi lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen), dan 1 sasaran kinerja (6,67%) mencapai kinerja kategori “**berhasil**”.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, dijelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian juga disajikan program berikut anggarannya pada masing-masing sasaran, realisasi anggaran yang mendukung realisasi sasaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran atau indikator kinerja.

Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, (2) Indeks Gini, (3) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, (4) Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Persentase KK Miskin, dan (7) Persentase Penduduk Miskin. Dari 7 (tujuh) target yang belum tercapai tersebut, 6 (enam) diantaranya merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Namun di tengah wabah pandemi ini, selama tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah berhasil mencapai prestasi kinerja di berbagai bidang, yang ditandai dengan diraihnya penghargaan tingkat provinsi maupun skala nasional sejumlah 50 (lima puluh) buah penghargaan.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi sebesar Rp44.064.426.815,00. Efisiensi anggaran ini diperoleh dari hasil negosiasi dalam pengadaan barang/jasa, hasil negosiasi pengadaan barang/jasa menggunakan *e-Purchasing*, kebijakan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional menggunakan *print-out* pembelian, pengetatan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan pengetatan penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 15 sasaran menunjukkan 11 (sebelas) diantaranya efisien karena rata-rata



capaian kinerja sasaran dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Rekomendasi dari Inspektorat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP tahun 2018, telah, dalam proses tindaklanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikannya pada tahun 2020.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “**A**”, nilai **81,99** dengan interpretasi: **memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**”. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman mulai tahun 2012-2019 adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan kinerja	23,50	24,02	24,42	25,43	25,77	25,85	27,49	27,76
2	Pengukuran kinerja	12,76	13,00	14,83	18,93	19,35	20,24	20,98	21,21
3	Pelaporan kinerja	10,34	10,41	11,54	12,33	12,44	12,37	13,06	13,09
4	Evaluasi internal	5,22	6,89	6,57	7,47	7,89	7,25	8,23	8,31
5	Capaian kinerja	13,47	12,03	13,28	12,74	12,44	12,34	11,97	11,61
	Nilai	65,29	66,35	70,64	76,90	77,89	78,06	81,72	81,99
	Kenaikan		1,06	4,29	6,26	0,99	0,17	3,66	0,27
	Tingkat akuntabilitas kinerja	B	B	B	BB	BB	BB	A	A



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GRAFIK	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Potensi Daerah	1
	C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
	D. Perangkat Daerah	4
	E. Sumber Daya Aparatur	10
	F. Sumber Daya Keuangan	12
	G. Isu Strategis	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	24
	A. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	24
	B. Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	24
	C. Tujuan Pembangunan Daerah	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	A. Pengukuran Kinerja	31
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	36
	1. Analisis Kinerja Sasaran 1	36
	2. Analisis Kinerja Sasaran 2	42
	3. Analisis Kinerja Sasaran 3	46
	4. Analisis Kinerja Sasaran 4	56
	5. Analisis Kinerja Sasaran 5	63
	6. Analisis Kinerja Sasaran 6	77
	7. Analisis Kinerja Sasaran 7	81
	8. Analisis Kinerja Sasaran 8	100
	9. Analisis Kinerja Sasaran 9	107
	10. Analisis Kinerja Sasaran 10	116
	11. Analisis Kinerja Sasaran 11	122
	12. Analisis Kinerja Sasaran 12	129
	13. Analisis Kinerja Sasaran 13	141
	14. Analisis Kinerja Sasaran 14	145
	15. Analisis Kinerja Sasaran 15	149
	C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	155
BAB IV	PENUTUP	159
LAMPIRAN		ix
	Daftar Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sleman	x
	Pernyataan Reviu LKJIP Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Sleman	xv



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020	28
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020	29
Tabel 3.1	Rekapitulasi Capaian Sasaran	32
Tabel 3.2	Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020	33
Tabel 3.3	Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020	34
Tabel 3.4	Rekapitulasi Capaian IKU	34
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020	36
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD	39
Tabel 3.7	Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2020	40
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020	42
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD	43
Tabel 3.10	Jumlah Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon yang Lunas PBB pada 31 Desember 2020	45
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020	46
Tabel 3.12	Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020	46
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	49
Tabel 3.14	Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2020	50
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020	56
Tabel 3.16	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	56
Tabel 3.17	Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2020	57
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020	63
Tabel 3.19	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	71
Tabel 3.20	Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2020	71
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020	77
Tabel 3.22	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD	78
Tabel 3.23	Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2020	79
Tabel 3.24	Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020	81
Tabel 3.25	Perbandingan Komponen Perhitungan NTP per Subsektor Tahun 2018-2019	90
Tabel 3.26	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan	92
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD	98
Tabel 3.28	Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2020	98
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020	100
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD	101
Tabel 3.31	Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2020	101
Tabel 3.32	Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020	107
Tabel 3.33	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD	110
Tabel 3.34	Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2020	110
Tabel 3.35	Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2020	116
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD	117



Tabel 3.37	Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2020	117
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2020	122
Tabel 3.39	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD	123
Tabel 3.40	Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2020	124
Tabel 3.41	Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2020	129
Tabel 3.42	Hasil Pemantauan Pencemaran Sungai Kabupaten Sleman	130
Tabel 3.43	Hasil Uji <i>Passive Sampler</i>	132
Tabel 3.44	Perhitungan Indeks Kualitas Udara	132
Tabel 3.45	Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Sleman 2020	135
Tabel 3.46	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD	137
Tabel 3.47	Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2020	137
Tabel 3.48	Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2020	141
Tabel 3.49	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	142
Tabel 3.50	Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2020	143
Tabel 3.51	Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2020	145
Tabel 3.52	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	145
Tabel 3.53	Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2020	145
Tabel 3.54	Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2020	149
Tabel 3.55	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD	150
Tabel 3.56	Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2020	150
Tabel 3.57	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	155
Tabel 3.58	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-Purchasing</i>	156
Tabel 3.59	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan BBM/Gas	156
Tabel 3.60	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157
Tabel 3.61	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah	157
Tabel 3.62	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	157
Tabel 3.63	Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020	158
Tabel 4.1	Rekapitulasi Capaian Sasaran	159
Tabel 4.2	Rekapitulasi Capaian IKU	160



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Predikat SAKIP	37
Grafik 3.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	43
Grafik 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	50
Grafik 3.4	Usia Harapan Hidup	56
Grafik 3.5	APK PAUD	64
Grafik 3.6	APK SD/MI	65
Grafik 3.7	APK SMP/MTs	66
Grafik 3.8	APM SD/MI	67
Grafik 3.9	APM SMP/MTs	68
Grafik 3.10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	69
Grafik 3.11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	70
Grafik 3.12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	82
Grafik 3.13	Nilai Ekspor	87
Grafik 3.14	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	88
Grafik 3.15	Tingkat Pengangguran Terbuka	101
Grafik 3.16	Sarana Prasarana Perekonomian	110
Grafik 3.17	Persentase KK Miskin	117
Grafik 3.18	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	123
Grafik 3.19	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	131
Grafik 3.20	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	134
Grafik 3.21	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	136
Grafik 3.22	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	142
Grafik 3.23	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	150



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai dasar rencana pembangunan tahun 2020;
- (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020.

Adapun pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2020 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

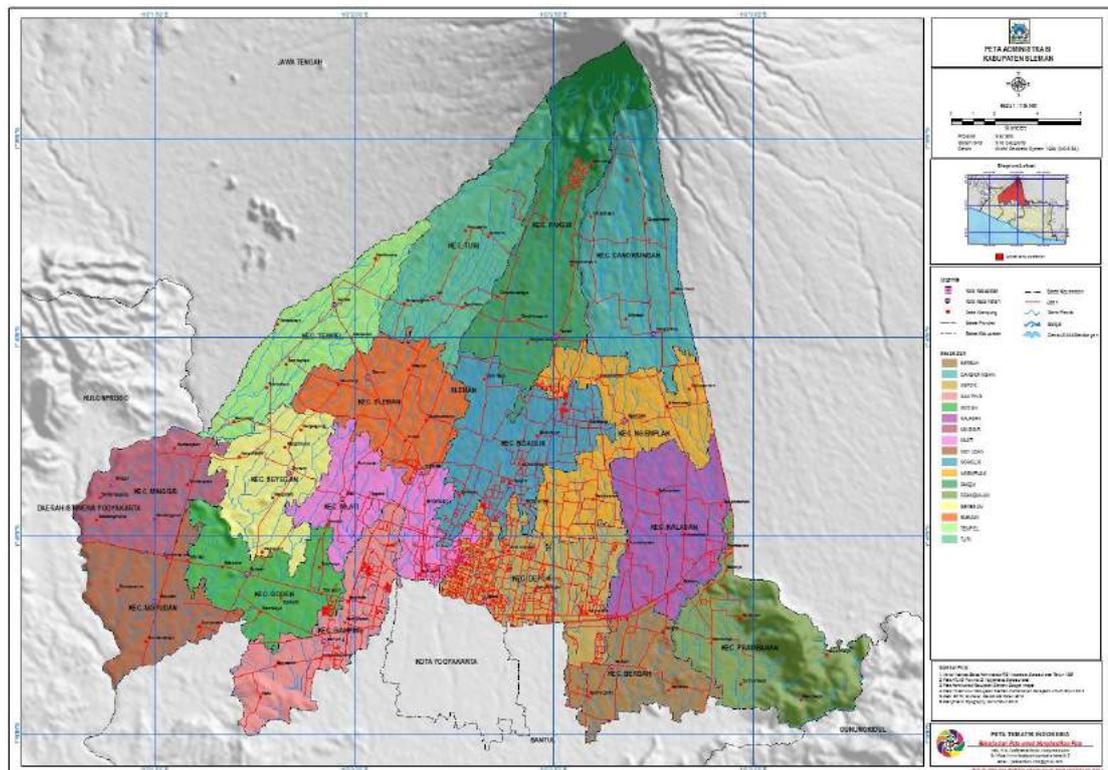
B. Potensi Daerah

Bentuk wilayah Kabupaten Sleman menyerupai bentuk segitiga, berdampingan dengan wilayah Kabupaten/Kota yang lain. Pada ujung utara adalah Gunungapi Merapi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali di arah timur laut, sebelah barat dengan



Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, serta sebelah selatan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 sebanyak 1.090.567 jiwa, sedang berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semester I tahun 2020 sebanyak 1.079.916 jiwa. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kapanewon (kecamatan), 86 kalurahan (desa), dan 1.212 padukuhan, 2.960 RW, dan 7.480 RT.



C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:



- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.

- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan.

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.

Di samping itu juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



D. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan memperhatikan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Sleman yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun Peraturan Bupati Sleman mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020 yang berjumlah 48 perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja;
- k. Dinas Pemuda dan Olahraga;



Komplek Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman



- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pertanian, Pangan, dan Kehutanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- u. Dinas Kebudayaan;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



Gedung
perkantoran
di komplek
Pemerintah
Kabupaten
Sleman

- cc. Kapanewon, yang terdiri dari;
 - 1) Kapanewon Gamping;
 - 2) Kapanewon Godean;
 - 3) Kapanewon Moyudan;
 - 4) Kapanewon Minggir;
 - 5) Kapanewon Seyegan;
 - 6) Kapanewon Mlati;
 - 7) Kapanewon Depok;
 - 8) Kapanewon Berbah;
 - 9) Kapanewon Prambanan;
 - 10) Kapanewon Kalasan;
 - 11) Kapanewon Ngemplak;
 - 12) Kapanewon Ngaglik;
 - 13) Kapanewon Sleman;
 - 14) Kapanewon Tempel;
 - 15) Kapanewon Turi;
 - 16) Kapanewon Pakem; dan
 - 17) Kapanewon Cangkringan;



- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; dan
- ff. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan untuk:

1. Menyelaraskan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam kerangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, yaitu urusan pertanahan, urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Implementasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Substansi perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

No	PERUBAHAN	
	Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016	Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



5.	Kecamatan	Kapanewon
6.	RSUD sebagai perangkat daerah	RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus

Hingga akhir tahun 2020, telah dilaksanakan penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020, pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 17 (tujuh belas) Kecamatan, sehingga telah operasional Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta 17 (tujuh belas) Kapanewon. Perubahan Perangkat Daerah lainnya belum dapat dilaksanakan dikarenakan izin pelantikan pada masa Pemilihan Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri belum diperoleh.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh), yaitu:

- 1) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping;
- 2) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean;
- 3) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan;
- 4) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir;
- 5) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan;
- 6) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati;
- 7) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok;
- 8) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah;
- 9) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan;
- 10) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan;
- 11) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak;
- 12) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik;
- 13) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman;
- 14) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel;
- 15) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi;
- 16) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem;
- 17) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan;
- 18) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I;
- 19) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II;
- 20) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I;
- 21) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II;
- 22) Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan;
- 23) Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir;
- 24) Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan;





- 25) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I;
- 26) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II;
- 27) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I;
- 28) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II;
- 29) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III;
- 30) Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah;
- 31) Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan;
- 32) Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan;
- 33) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I;
- 34) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II;
- 35) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I;
- 36) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II;
- 37) Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman;
- 38) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I;
- 39) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II;
- 40) Pusat Kesehatan Masyarakat Turi;
- 41) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem;
- 42) Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan;
- 43) UPTD Laboratorium Kesehatan;
- 44) UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan;
- 45) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
- 46) UPTD Taman Pemakaman Umum;
- 47) UPTD Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal;
- 48) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat;
- 49) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur;
- 50) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah;
- 51) Balai Latihan Kerja;
- 52) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 53) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan;
- 54) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
- 55) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 56) UPTD Sub Terminal Agribisnis;
- 57) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I;
- 58) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II;
- 59) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III;
- 60) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV;
- 61) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V;
- 62) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI;
- 63) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII;
- 64) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII;

Bupati Sleman meninjau pelaksanaan
Ujian Nasional Tingkat SD di salah satu sekolah



Wakil Bupati Sleman meninjau pelayanan di
Puskesmas Rawat Inap Sleman (Nyaen)



- 65) UPTD Pelayanan Persampahan;
- 66) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 67) UPTD Pengelolaan Parkir;
- 68) UPTD Museum Gunungapi Merapi;
- 69) UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
- 70) UPTD Pelayanan Pasar Kelompok I;
- 71) UPTD Pelayanan Pasar Kelompok II;
- 72) UPTD Pelayanan Pasar Kelompok III;
- 73) UPTD Pelayanan Pasar Kelompok IV;
- 74) UPTD Pelayanan Pasar Kelompok V;
- 75) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- 76) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan
- 77) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Bupati Sleman meninjau kegiatan di UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan



Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPTD yang dibentuk, terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebanyak 834 jabatan struktural, yang terdiri dari:

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon IIa	1
2.	Eselon IIb	35
3.	Eselon IIIa	62
4.	Eselon IIIb	113
5.	Eselon IVa pada Perangkat Daerah	430
6.	Eselon IVa pada UPTD	77
7.	Eselon IVb pada Perangkat Daerah	39
8.	Eselon IVb pada UPTD	77



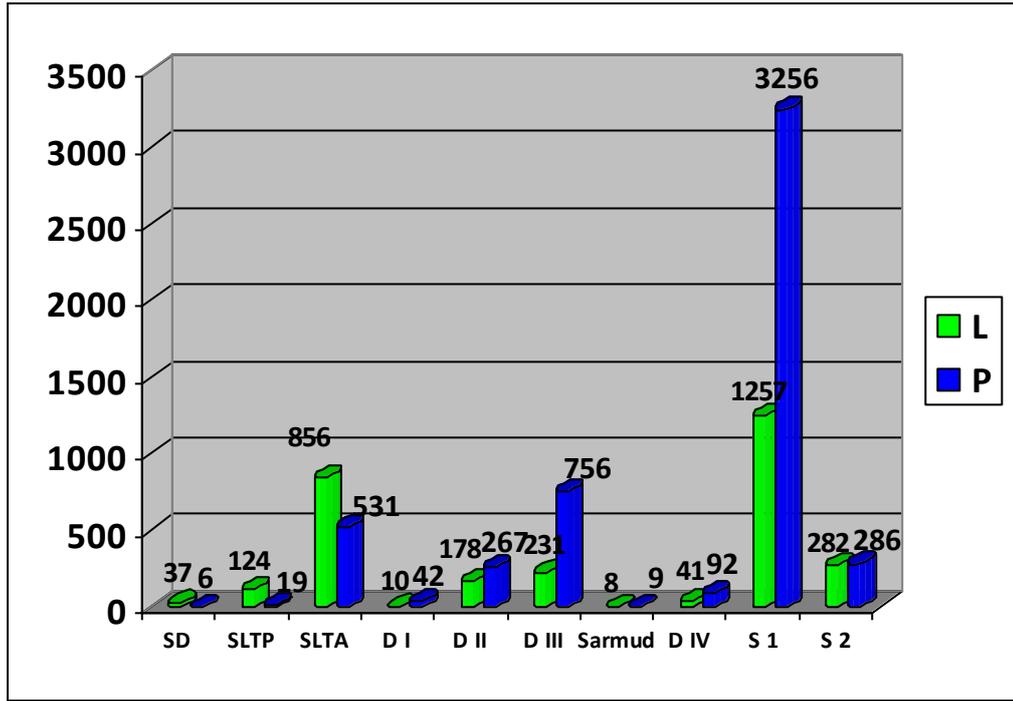
Bupati Sleman melantik 194 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kelembagaan baru, di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada tanggal 28 Agustus 2020

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 8.288 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	37	6	43	0,52
SLTP	124	19	143	1,73
SLTA	856	531	1387	16,74
D.I	10	42	52	0,63
D.II	178	267	445	5,37
D.III	231	756	987	11,91
Sarmud	8	9	17	0,21
D.IV	41	92	133	1,60
S-1	1257	3256	4513	54,45
S-2	282	286	568	6,85
Jumlah	3024	5264	8288	100,00



2. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
I	58	8	66	0,80
II	718	350	1.068	12,89
III	1.467	3.214	4.681	56,48
IV	781	1.692	2.473	29,84
Jumlah	3.024	5.264	8.288	100,00



ASN Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti Upacara Bendera di Lapangan Pemda

3. Berdasarkan Eselon



Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
II.a	1	0	1	0,14
II.b	23	6	29	4,04
III.a	34	16	50	6,96
III.b	60	38	98	13,65
IV.a	252	196	448	62,40
IV.b	41	51	92	12,81
Jumlah	411	307	718	100,00

4. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Struktural	411	307	718	8,66
Fungsional Guru	1.033	3.153	4.186	50,51
Fungsional Non Guru	404	1.149	1.553	18,74
Staf/Pelaksana	1.176	655	1.831	22,09
Jumlah	3.024	5.264	8.288	100,00

F. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2020 Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan)*	Setelah Perubahan)**
1	Pendapatan Daerah	2.852.716.641.968,55	2.538.365.662.110,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	944.481.898.316,49	676.743.940.021,93
1.2	Dana Perimbangan	1.431.579.787.000,00	1.282.094.156.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	476.654.956.652,06	579.527.566.088,07
2	Belanja Daerah	2.992.880.040.279,70	2.908.092.312.851,78
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.518.902.216.253,70	1.563.816.877.413,10
2.2	Belanja Langsung	1.473.977.824.026,00	1.344.275.435.438,68
	Surplus/Defisit	(140.163.398.311,15)	(369.726.650.741,78)
3	Pembiayaan Daerah		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78



	Anggaran Sebelumnya		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49.546.631.000,00	28.858.332.137,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	45.670.000.000,00	24.981.701.137,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	3.876.631.000,00	3.876.631.000,00
Pembiayaan Neto		140.163.398.311,15	369.726.650.741,78

)* APBD "Murni" Tahun 2020

)** Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020

G. Isu Strategis

Beberapa permasalahan atau isu strategis yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, dituangkan di dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika kependudukan, perlindungan perempuan dan anak;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
5. Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup;
7. Ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana;
8. Tata kelola pemerintahan; serta
9. Daya saing potensi ekonomi lokal.



Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita-cita pembangunan sebagai solusi dari isu strategis dengan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Isu strategis Kabupaten Sleman dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinamika Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman relatif tinggi bila dilihat dari data 4 tahun terakhir. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mencapai rata-rata 1,52% tersebut lebih disebabkan oleh jumlah migrasi penduduk yang masuk dibandingkan dengan jumlah kelahiran penduduk mengingat fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, pusat pendidikan serta pusat pengembangan perumahan/permukiman. Besarnya jumlah migrasi dan penduduk sementara inilah yang menyebabkan data kependudukan di Kabupaten Sleman belum akurat karena sulitnya proses pendataan penduduk. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus berkas-berkas kependudukan sehingga cakupan administrasi penduduk di Kabupaten Sleman belum terpenuhi secara keseluruhan.

Proporsi penduduk usia kerja pada tahun 2018, untuk laki-laki mencapai 63,92% dan untuk perempuan mencapai 64,00%. Proporsi usia kerja yang besar ini merupakan peluang sekaligus tantangan di dalam pembangunan. Di dalam istilah demografi hal ini disebut dengan *demografic bonus*, karena pada saat itu beban ketergantungan menjadi minimal. Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Sleman, potensi bonus demografi akan berlangsung terus hingga tahun 2035. Salah satu implikasi agar terwujud bonus demografi adalah dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia kerja.

Jumlah penduduk yang termasuk kategori remaja (*adolescents*) juga besar. Hal ini disebabkan karena fertilitas yang tinggi di masa lalu, dan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

Kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena "*aging population*" di Sleman telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Permasalahan kependudukan yang lain adalah persebaran yang tidak merata antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk yang banyak dengan kepadatan per kilometer yang tinggi terjadi di kecamatan-kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, yang merupakan wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah penduduk yang tidak



merata dan terkonsentrasi di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan hidup dan kehidupan sosial.

Di bidang keluarga berencana, pada tahun 2018, cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mencapai 76,51% sedangkan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 9,50%. Kepesertaan KB ini dapat lebih ditingkatkan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran.

Kedepan, berkaitan dengan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah meningkatkan cakupan layanan terhadap administrasi kependudukan dengan melaksanakan jemput bola, menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dengan memberdayakan kader KB dalam meningkatkan cakupan kepesertaan KB khususnya KB mandiri dan KB pria, meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, serta memberdayakan institusi masyarakat pedesaan.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman tahun 2018 sebesar 0,08. Dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 458 kasus, ada penurunan sebesar 13 kasus dari tahun sebelumnya atau sebesar 2,76%. Sebenarnya angka ini, belum menunjukkan angka riil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena angka ini merupakan jumlah dari kasus yang dilaporkan. Angka jumlah kasus kekerasan didapatkan dari instansi dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya puskesmas, kepolisian, KUA, serta kader PKDRT di setiap desa. Masih dimungkinkan adanya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang dilaporkan di luar wilayah Sleman, sehingga tidak dihitung sebagai data kasus di Sleman.

Permasalahan perlindungan perempuan dapat diminimalkan dengan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga harus lebih responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Optimalisasi peran perempuan di segala bidang juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender.

2. Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pada tahun 2017, angka melek huruf sebesar 97,07% artinya bahwa di Kabupaten Sleman masih ada 2,93% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.



Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 116,98%, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Demikian pula bagi SMP/MTs, APK pada tahun 2018 sebesar 112,71% naik dari tahun 2017 (112,67%).

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2018 sebesar 105,67%. APM SMP/MTs sebesar 85,91%.

Angka putus sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 5 anak pada tingkat Sekolah Dasar dan 3 anak pada tingkat SMP.

Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah banyaknya peserta didik penduduk Sleman yang memilih bersekolah di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah di Kota Yogyakarta lebih tinggi daripada sekolah di Kabupaten Sleman.

Pembentukan karakter kepribadian pemuda di Kabupaten Sleman belum optimal dari adanya indikasi banyaknya kenakalan pelajar dan pemuda yang terjadi karena koordinasi penanganan pemuda masih kurang serta masih rendahnya pemahaman dan peran serta pemuda dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Pembinaan olahraga di Kabupaten Sleman juga masih belum maksimal dengan terbatasnya sarana prasarana olahraga serta banyaknya atlet-atlet Sleman yang menjadi atlet daerah lain sehingga prestasi olahraga belum optimal.

Permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Sleman kedepan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standart yang ditetapkan, serta peningkatan prestasi olahraga.

3. Kesehatan

Pada tahun 2018, masih terdapat angka kematian bayi 4,11 per 1000 kelahiran hidup (57 bayi dari 13.879 kelahiran hidup), angka kematian balita 0,21 per 1000 kelahiran hidup (3 balita), balita gizi buruk 0,52% (284 balita), prevalensi balita gizi kurang mencapai 7,32% (4.032 balita), serta angka kematian ibu melahirkan 50,42 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus). Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan, sehingga banyak ditemukan bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, kematian ibu, bayi dan balita terjadi karena asfiksia, kelaian konginetal, sepsis,



gangguan respirasi dan multiple konginital anomali. Di Kabupaten Sleman juga masih ditemukan kasus balita pendek dan sangat pendek.

Penyakit menular (DBD, leptospirosis, TBC, ISPA, diare) dan penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia juga masih ditemui di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat. Hal ini juga disertai tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba karena didorong oleh mobilitas penduduk dan perilaku reproduksi.

Permasalahan di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan jaminan kesehatan, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD yang diiringi dengan akreditasi puskesmas dan RSUD, pendampingan PHBS, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meminimalkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan angka balita gizi buruk.

4. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman menurun setiap tahunnya dan pada tahun 2018 mencapai 7,65%. Sedangkan jumlah KK miskin mencapai 8,77%. Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi adalah kecamatan Seyegan, Minggir, Tempel, Prambanan, Turi dan Cangkringan yang merupakan wilayah-wilayah perdesaan dengan sektor penyangga adalah pertanian. Pertanian ini terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan. NTP paling tinggi pada tahun 2018 adalah subsektor hortikultura, sebesar 147,22. Berdasarkan gabungan dari 6 subsektor didapatkan NTP sebesar 119,02, meningkat dari tahun 2017 (107,05). Artinya indeks yang diterima petani 1,18 kali lebih besar dari indeks yang dibayar petani. Meskipun petani masih surplus, namun masih perlu ditingkatkan lagi kesejahteraannya.

Permasalahan kemiskinan semakin diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,76%. Penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tahun 2018 tercatat sebanyak 830.851 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 601.570 jiwa dan 229.283 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 72,40%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 94,23% dari 67,73% pada tahun sebelumnya. Sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 0,26 dari 0,12 di tahun sebelumnya.



Selain itu relatif tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga menjadi masalah bagi Kabupaten Sleman. Kelompok PMKS yang aktif pada tahun 2018 sudah mencapai 353 kelompok. Hal ini dikarenakan adanya pendampingan dari pendamping PKH untuk KUBE PKH dan pendamping desa untuk PRSE. Selain itu, Dinas Sosial mengadakan seleksi dan penghargaan bagi KUBE berprestasi. Sedangkan PSKS aktif di Kabupaten Sleman ada 457 dari 772 PSKS.



Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI menyerahkan secara simbolis bantuan rehab untuk 266 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Kantor Desa Wonokerto Turi

Guna mengurangi permasalahan di atas, implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan strategi penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Dinas Kominfo melakukan pengolahan, updating dan analisis data penduduk miskin. Dinas Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta memberikan layanan aduan masyarakat. Dinas kesehatan memfasilitasi jaminan kesehatan melalui kepesertaan JKN PBI APBN sebanyak: 331.855 jiwa dan JKN PBI APBD sebanyak 100.648 jiwa. Dinas Pendidikan dengan menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin. Untuk stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, baik RTLH, jambanisasi dan layanan air bersih dilakukan oleh Dinas PUPKP dan DLH. Dinas Dukcapil melayani administrasi kependudukan, berupa akta catatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk. Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, manajemen kelembagaan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru oleh Dinas Koperasi dan UKM, Disnaker / BLK, Dinas Perindag, Dinas Pertanian



dan perangkat daerah terkait lainnya diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran.

5. Infrastruktur

Prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Sleman belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang.

Adapun kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam pada tahun 2018 adalah 88,02%. Angka ini berarti bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya.

Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan yang tersedia. Pada tahun 2018, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 47%, semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Kabupaten Sleman yang memiliki sejumlah areal persawahan, yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2018, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 63,48% dengan rasio pelayanan sebesar 0,60. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan pertanian budidaya (Ha).

Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal.

6. Lingkungan Hidup



Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan secara sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan bantaran sungai dan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sampai tahun 2018 mencapai 0,08%. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan data dari DLH DIY, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 898,75 Ha. Hal ini artinya luasan RTH publik belum mencapai 20% dari yang dipersyaratkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga selalu dapat terjamin. Untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, intervensi yang dilakukan adalah membuat target alih fungsi lahan untuk 5 (lima) tahun kedepan tidak lebih dari 100 Ha setiap tahunnya sesuai yang di rencanakan dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan kawasan kumuh dan lahan kritis.

7. Ketentraman dan ketertiban umum

Kondisi Kabupaten Sleman yang heterogen dengan banyaknya warga pendatang, menimbulkan kerentanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain bidang ketentraman dan ketertiban umum, di bidang pemerintahan umum juga masih terdapat konflik sosial dan konflik SARA di masyarakat. Belum optimalnya penegakan perda juga menjadi salah satu permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban. Selain itu, angka kriminalitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 1,49%.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan sinergitas antar pemuka kelompok yang ada di masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah, misalnya FKUB, memberdayakan



kelompok keamanan swadaya masyarakat, dan optimalisasi penegakan perda dengan meningkatkan respon terhadap pengaduan pelanggaran perda.

Terkait bencana, potensi bencana di Kabupaten Sleman sangat beragam, baik itu yang disebabkan oleh alam seperti angin ribut, letusan gunung dan tanah longsor, maupun yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Kawasan Area Terdampak Langsung (ATL) bencana Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman telah ditetapkan, namun masih ada warga yang bersikeras untuk tinggal di kawasan tersebut. Terkait kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, belum semua masyarakat terlatih untuk tanggap bencana. Ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan belum memadai dengan masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum dipasang EWS dan masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak.

Sampai tahun 2018, cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 0,93% konstan sejak tahun 2014. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 36,08% pada tahun 2018. Cakupan pelayanan ini terkait dengan area perkotaan yang terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sedangkan kawasan perkotaan lainnya yang merupakan ibukota kecamatan tersebar di wilayah perdesaan Kabupaten Sleman. Namun kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2018 sebesar 78,79%.

Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang berpotensi terhadap bencana akan terus berupaya untuk membuat masyarakat lebih mandiri dalam tanggap bencana, selain juga memenuhi kekurangan sarana prasarana penanggulangan bencana. Dalam rangka menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, Kabupaten Sleman perlu terus mengembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah.

8. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih di angka 72,81. Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2018 mencapai 81,39. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2018 sebesar 78,80. Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh perangkat daerah serta belum semua PD mempunyai SP.



Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah.

Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

Demikian pula, yang tidak boleh dikesampingkan adalah pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimanapun juga kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik jika didukung oleh pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.

9. Investasi dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Pengelolaan investasi di Kabupaten Sleman belum optimal, baik itu dari aspek perencanaan, pengembangan, maupun pelayanan perizinan. Potensi investasi belum terdata dengan akurat, sehingga informasi terkait dengan kesempatan berinvestasi di Kabupaten Sleman tidak terakses oleh investor. Pengembangan investasi terkendala dengan letak wilayah yang berada pada daerah resapan air yang menyebabkan industri besar tidak dapat didirikan di Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu untuk menggantikan hal tersebut harus dicari sektor yang lain yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Pelayanan perizinan sering kali belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga perlu diperketat dalam monitoring dan evaluasi SOP dan SP perizinan. Kemudahan layanan perizinan dan iklim yang kondusif untuk berusaha diharapkan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman sehingga investasi di Kabupaten Sleman terus meningkat.



Pada sektor pertanian, pola pangan harapan dan cadangan pangan pemerintah juga belum sesuai target yang diharapkan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi pola konsumsi yang beragam, bergizi, sehat dan aman, serta pentahapan dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah. Selain itu produktifitas pertanian juga masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan pengelolaan di bidang pertanian, baik sarana prasarana, peningkatan produksi dan pasca panen diharapkan akan meningkatkan kualitas sektor pertanian yang dapat meningkatkan nilai tukar petani yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani.

Daya saing atas potensi-potensi di Kabupaten Sleman harus terus ditingkatkan sehingga menaikkan nilai ekspor dari Kabupaten Sleman. Ekonomi lokal yang berupa potensi UMKM belum sepenuhnya mampu mengakses pasar yang lebih luas karena masih banyak produk UMKM yang belum bisa bersaing dengan produk serupa dari daerah lain. Pendampingan terhadap UMKM agar memiliki kriteria untuk masuk ke pasar bebas serta penguatan permodalan terus dilakukan oleh Kabupaten Sleman.

Kondisi alam yang subur dan menawan merupakan pontensi untuk pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan tetap mempertahankan lingkungan alamnya. Setiap desa wisata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain sehingga antar desa wisata bisa saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai desa wisata mandiri.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. *Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021*

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada Tahun 2021”.

B. *Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021*

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

C. *Tujuan Pembangunan Daerah*

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah:

- a. Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan pembangunan manusia.
- c. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat.
- e. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak.

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel 2.1.



Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B (72,81)	B (73,60)	BB (74,40)	BB (75,70)	BB (76,00)
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$IPM = \sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ <p>I1= kesehatan (harapan hidup)</p> <p>I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah)</p> <p>I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)</p>	%	80,90	80,98	81,05	83,02	83,12	83,49



Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini berada antara 0 dan 1	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas yang dimaksud	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤0,40	0,35 – 0,40	0,35 – 0,40	0,35 – 0,40
Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Jumlah lembaga tangguh bencana	Lembaga tangguh bencana meliputi desa tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana.	Akumulasi jumlah lembaga tangguh bencana	Desa dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	53 dan 68	65 dan 72	77 dan 76
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga komponen yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.	IKLH_Sleman = (IKA+IKU+IKTL)/3 IKA= Indeks Kualitas Air IPU= Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	36,82	37	37,5	49,80	49,90	50,00



Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY	Desa budaya adalah desa yang mempunyai: struktur organisasi/ pengurus, memiliki program dan rencana kegiatan serta memiliki potensi budaya seperti adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya	Jumlah desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014	Desa	8	10	12			
		Jumlah Desa yang diusulkan menjadi desa budaya melalui Keputusan Gubernur DIY	sda	Jumlah desa yang diusulkan menjadi desa budaya	Desa				19	24	29
		Indeks Pembangunan Gender	IPG adalah pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) dengan mem-perhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.	$IPG = 1/3 \{ (X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + I_{inc-dis}) \}$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan I inc-dis = indeks distribusi pendapatan	%	96,15	96,20	96,25	95,80	95,89	95,89



Mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2020, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Sleman Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dan Perubahannya Tahun 2020, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang ditandatangani Bupati Sleman. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	A (81,72)
		2. Opini BPK terhadap LKD	WTP)*
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,25%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,39
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,78 tahun
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,32 %
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	≥ 100 %
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	≥ 100 %
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	≤ 100 %
		5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,93 %
		6. Rata-rata Lama Sekolah	10,67 tahun
		7. Harapan Lama Sekolah	16,63 tahun
		8. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SD	N / A
		9. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SMP	N / A
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi	0,16 %
		2. Indeks Gini	0,35 - 0,4)*
7.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian	1. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,7 hari
		2. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	0 hari
		3. Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.500.000 orang
		4. Nilai Ekspor	36.600.000 US\$
		5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	3,26 %
		6. Nilai Tukar Petani	102,50 %
		7. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	- 34,00 %
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,34 %
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	1. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	78,18 %
		2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	81,18 % dan 59 %
10.	Menurunnya Kemiskinan	1. Persentase KK Miskin	8,50 %
		2. Persentase Penduduk Miskin	7,91 %
11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	
		1. Desa Aman Bencana	62
		2. Satuan Pendidikan Aman Bencana	72
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	41,33
		2. Indeks Kualitas Udara	72
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,29
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0,96 %
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Jumlah Konflik SARA	≤ 3 kasus
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	33,75 %



Sedangkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,80
2.	Persentase KK Miskin	%	8,50
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,36
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55
5.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat (Nilai)	A (83,00)
6.	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP
7.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,80
8.	Nilai Ekspor	US\$	41.750.000
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,5
10.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	79,07
11.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	82,50 dan 90
12.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Desa dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	65 dan 72
13.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	34,00
14.	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,33
15.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	72
16.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	32,29
17.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara : 2,01 Wisatawan Mancanegara : 2,04
18.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	8.200.000
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50
20.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	3,26
21.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	3,10



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,32
23.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI : $\geq 100\%$,
			APK SMP/MTs : $\geq 100\%$
			APM SD/MI : $\leq 100\%$
			APM SMP/MTs : 85,95%
24.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,80
25.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,63
26.	Nilai Rata-rata Hasil Ujian		
	SD/MI	Nilai	211,23
	SMP/MTs	Nilai	256,6
27.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	35,50
28.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	2,3
29.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤ 3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <50	Kurang Berhasil



Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	A (81,72)	N / A	N / A
		2. Opini BPK terhadap LKD	WTP)*	WTP)*	100,00
Rata-rata capaian					100,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,25%	29,79%	109,32
Rata-rata capaian					109,32
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,39	82,37	101,20
Rata-rata capaian					101,20
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,78 tahun	74,81 tahun	100,04
Rata-rata capaian					100,04
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,32 %	96,88 %	123,70
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	≥ 100 %	100,41 %	100,00
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	≥ 100 %	100,69 %	100,00
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	≤ 100 %	95,85 %	100,00
		5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,93 %	84,51 %	98,35
		6. Rata-rata Lama Sekolah	10,67 tahun	10,91 tahun	102,25
		7. Harapan Lama Sekolah	16,63 tahun	16,73 tahun	100,60
		8. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SD	N / A	N / A	N / A
		9. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SMP	N / A	N / A	N / A
Rata-rata capaian					103,56
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi	0,16 %	N / A	N / A
		2. Indeks Gini	0,35 - 0,4)*	0,417)*	95,75
Rata-rata capaian					95,75
7.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian	1. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,7 hari	0,97 hari	57,06
		2. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	0 hari	0,42 hari	100,00
		3. Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.500.000 orang	4.250.119 orang	121,43
		4. Nilai Ekspor	36.600.000 US\$	55.796.578,44 US\$	152,45
		5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	3,26 %	- 0,03 %	- 0,92
		6. Nilai Tukar Petani	102,50 %	112,53 %	109,79
		7. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	- 34,00 %	- 34,00 %	100,00
Rata-rata capaian					91,40
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,34 %	6,59 %	96,06
Rata-rata capaian					96,06
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	1. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	78,18 %	85,73 %	109,66
		2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	81,18 % dan 59 %	82,61 % dan 59,51 %	101,76 dan 100,86
Rata-rata capaian					105,49
10.	Menurunnya Kemiskinan	1. Persentase KK Miskin	8,50 %	8,79 %	96,59
		2. Persentase Penduduk Miskin	7,91 %	8,12 %	97,35
Rata-rata capaian					96,97
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian



11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana			
		1. Desa Aman Bencana	62	62	100,00
		2. Satuan Pendidikan Aman Bencana	72	72	100,00
				Rata-rata capaian	100,00
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	41,33	41,33	100,00
		2. Indeks Kualitas Udara	72	86,66	120,36
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,29	34,71	107,49
				Rata-rata capaian	104,77
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0,96 %	3,24 %	337,50
				Rata-rata capaian	337,50
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Jumlah Konflik SARA	≤ 3 kasus	0 kasus	100,00
				Rata-rata capaian	100,00
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	33,75 %	36,25 %	107,41
				Rata-rata capaian	107,41

*) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2019), karena angka kinerja tahun 2020 belum tersedia

Pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥95
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	2	100,00				Sangat berhasil
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	109,32				Sangat berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20				Sangat berhasil
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	100,04				Sangat berhasil
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	9	103,56				Sangat berhasil
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	2	95,75				Sangat berhasil
7.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian	7	91,40			Berhasil	
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	96,06				Sangat berhasil
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	2	105,49				Sangat berhasil
10.	Menurunnya Kemiskinan	2	96,97				Sangat berhasil
11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	2	100,00				Sangat berhasil
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3	104,77				Sangat berhasil
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1	337,50				Sangat berhasil
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	1	100,00				Sangat berhasil
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	1	107,41				Sangat berhasil



JUMLAH	36				
--------	----	--	--	--	--

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 14 sasaran, atau 93,33%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,66%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.

Pencapaian kinerja 15 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	14	93,33
2.	Berhasil	1	6,66
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		15	100

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,78	74,81	100,04
2.	Persentase KK Miskin	%	8,50	8,79	96,59
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	7,91	8,12	97,35
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,16	N / A	N / A
5.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat (Nilai)	A (81,72)	N / A	N / A
6.	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP)*	WTP)*	100,00
7.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,39	82,37	101,20
8.	Nilai Ekspor	US\$	36.600.000	55.796.578,44	152,45
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,50	112,53	109,79
10.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	78,18	85,73	109,66



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
11.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	81,18 dan 59	82,61 dan 59,51	101,76 dan 100,86
12.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Desa dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	62 dan 72	62 dan 72	100 dan 100
13.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	27,25	29,79	109,32
14.	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,33	41,33	100,00
15.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	72	86,66	120,36
16.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	32,29	34,71	107,49
17.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari (Wisnus) Hari (Wisman)	1,7 0	0,97 0,42	57,06 100,00
18.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.500.000	4.250.119	121,43
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34	6,59	96,06
20.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	3,26	- 0,03	- 0,92
21.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	- 34,00	- 34,00	100,00
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,32	96,88	123,70
23.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	% APK SD/MI	≥ 100	100,41	100,00
		% APK SMP/MTs	≥ 100	100,69	100,00
		% APM SD/MI	≤ 100	95,85	100,00
		% APM SMP/MTs	85,93	84,51	98,35
24.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,67	10,91	102,25
25.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,63	16,73	100,60
26.	Nilai Rata-rata Hasil Ujian				
	SD/MI	Nilai	N / A	N / A	N / A
	SMP/MTs	Nilai	N / A	N / A	N / A
27.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	33,75	36,25	107,41
28.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	0,96	3,24	337,50
29.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤ 3	0	100,00

*) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2019), karena angka kinerja tahun 2020 belum tersedia



B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” dengan indikator Predikat AKIP Kabupaten dan Opini BPK terhadap LKD mencapai 100% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat (Nilai)	A (81,72)	N/A	N/A
2.	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP*)	WTP	100%
Rata-rata capaian					100%

**) merupakan angka target 2019, agar “aple to aple” dengan data realisasi yang tersedia*

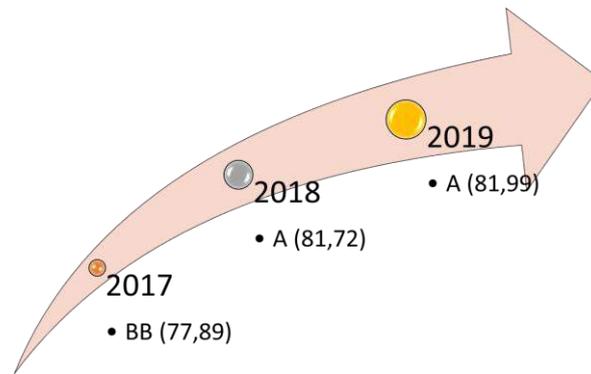
Sumber data: Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Predikat AKIP Kabupaten

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sleman telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/151/AA.04/2020 tanggal 26 Agustus 2020 hal Undangan, namun hasil evaluasi dimaksud belum tersedia.

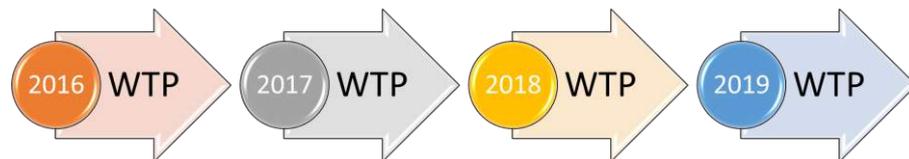
Tren tiga tahun terakhir, nilai SAKIP Pemerintahan Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan. Nilai SAKIP terakhir Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2019 adalah **81,99, predikat “A”, dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.**



Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat nilai "A" yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tahun 2019

- b. Opini BPK terhadap LKD
- c. Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/03/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/03/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 12C/LHP/XVIII.YOG/03/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tanggal 13 Maret 2020, menyatakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2019 adalah opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".





Berdasarkan ketiga surat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh Opini WTP sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap LKD” tercapai 100,00%.



Thropy
Penghargaan atas
Capaian Opini
WTP 5 (lima) Kali
Berturut-turut
untuk Pemerintah
Kabupaten
Sleman dari
Kementerian

Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Pusat mengapresiasi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan memberikan

penghargaan berupa alokasi Dana Intensif Daerah (DID). Saat ini penanganan pandemi COVID-19 menjadi prioritas kondisi keuangan Negara. Kebijakan tersebut berimbas pada penerimaan Dana Insentif Daerah, kendati indikator pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Dasar penghitungan alokasi DID tahun 2021 adalah kinerja keuangan daerah yang baik; yaitu opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tepat waktu, pelayanan publik baik, dan penggunaan sistem pemerintahan elektronik.



Penerimaan Trophy Penghargaan atas Prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang berhasil meraih 9 (sembilan) Kali Berturut-turut Predikat WTP dari Kementerian Keuangan RI

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat (Nilai)	A (81,72)	A (81,99)	N/A	A (84,50)
2.	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP*)	WTP

*) merupakan angka realisasi 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.7 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2020



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik	679.149.000	668.690.450	98,46
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.583.427.126	1.403.374.696	88,63
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.348.760.100	3.291.219.150	98,28
4	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	3.623.455.750	3.043.199.550	83,99
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	190.592.100	187.027.000	98,13
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.895.649.600	1.874.340.825	98,88
7	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	487.647.750	475.555.150	97,52
8	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	701.200.000	687.390.275	98,03
9	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	275.321.150	270.929.150	98,40
10	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	8.944.000	8.944.000	100,00
11	Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	101.586.000	99.670.500	98,11
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	42.475.014.000	26.886.725.131	63,30
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.345.154.800	3.142.535.327	93,94

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp42.039.601.204,00 dari anggaran sebesar Rp58.715.901.376,00 atau 71,60%. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 71,60% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Pengintegrasian sistem perencanaan, keuangan, monitoring dan evaluasi, serta kinerja, telah mendorong terciptanya keterpaduan dan keselarasan data kinerja.
- 2) Perencanaan kinerja yang dinamis melalui evaluasi dan pembaharuan RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah, berhasil mendorong keselarasan antara program,



kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis, dan semakin berorientasi pada hasil.

- 3) Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman cukup baik, serta didukung dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berprestasi baik dalam skala nasional maupun internasional.
- 4) Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan, antara lain dalam proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAD), pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIADINDA), pengendalian kegiatan dan penyerapan anggaran menggunakan Sistem Tim Pengendalian Penyerapan Anggaran (SIM TEPPA), pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET), pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SIM LPPD) dan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), serta pengelolaan kinerja pegawai menggunakan Sistem Informasi Kinerja pegawai (e-Kinerja).
- 5) Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektifitasnya.
- 6) Adanya supervisi dari Pemerintah Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.



2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 109,28% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,25%	29,79%	109,32

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah sebesar 29,79%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{788.246.742.277,73}{2.646.077.465.912,73} \times 100\% = 29,79\%$$

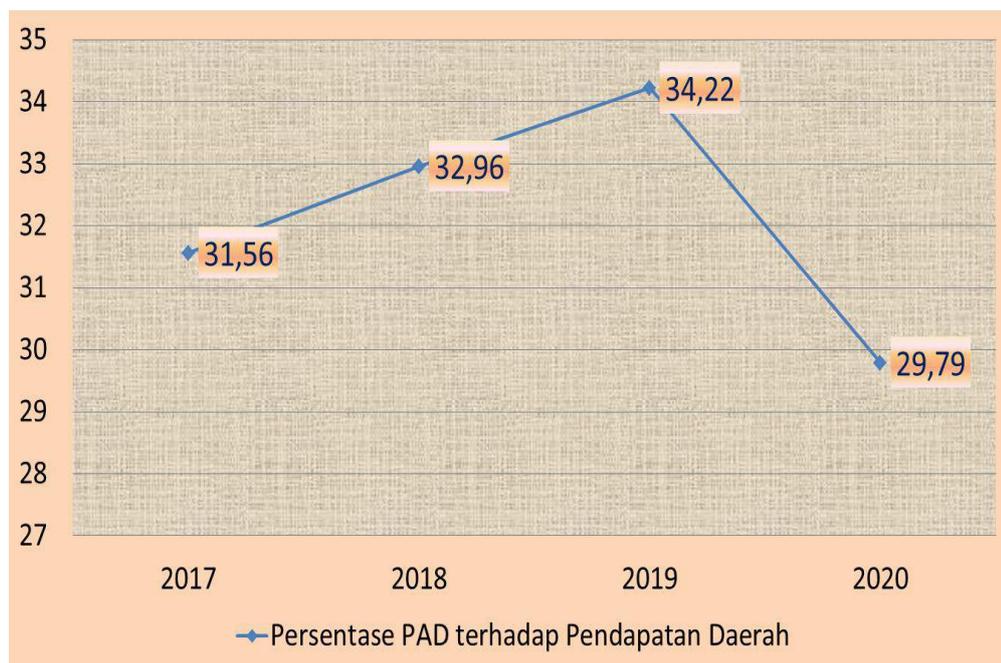
*) Data merupakan angka *unaudited* oleh BPK

Sumber PAD Kabupaten Sleman terdiri dari: a) 10 jenis pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp499.961.975.136,00 (63,42%), b) retribusi daerah sebesar Rp40.971.519.904,00 (5,19%), c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp47.565.772.690,28 (6,03%), dan d) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp199.747.474.697,45 (25,34%). Sumber pendapatan daerah meliputi PAD sebesar Rp788.246.742.427,73 (29,78%), Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp1.271.979.511.950,00 (48,07%), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp585.851.211.535 (22,14%).

Realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah menurun 4,43% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 34,22%. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berimbas pada pendapatan daerah selama jangka waktu tertentu pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan dimaksud antara lain pembebasan pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran.



Grafik 3.2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	32,96	34,22	29,79	35

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp15.539.725.296,00 dari anggaran sebesar Rp15.823.210.425,00 atau 98,21%. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 98,21% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 109,32%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- 1) Semakin tingginya kemampuan aparat mengenali potensi PAD, baik terkait objek pajak maupun perilaku wajib pajak, sehingga kegiatan pendataan wajib pajak, pendaftaran wajib pajak, dan pemeriksaan perilaku wajib pajak juga semakin baik.
- 2) Semakin intensifnya langkah sosialisasi bagi para wajib pajak, baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik dan media cetak.



Sosialisasi kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman dalam rangka menghadapi Tatanan Baru di Masa Pandemi COVID-19

- 3) Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, antara lain melalui penerapan SIM-PAD, SIM-PBB P2 *online*, SIM-BPHTB *online*, SISMIOP, dan e-SPTPD.
- 4) Kerja sama yang semakin harmonis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan para pemangku kepentingan, seperti KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Notaris/PPAT, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pemerintah Kalurahan, serta bank dan lembaga keuangan untuk menciptakan kemudahan pembayaran oleh wajib pajak antara lain Bank BPD, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BRI, dan seluruh KUD dalam jaringan PUSKUD Metaram.

Kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan terkait pencapaian pajak PBB yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Duku, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2020 terhitung sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 5 Kapanewon serta 33 Kalurahan yang lunas. Sedangkan jumlah padukuhan yang lunas per 31 Desember 2020 sebanyak 557 padukuhan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.10 Jumlah Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon yang Lunas PBB pada tanggal 31 Desember 2020

No	Tahun	Padukuhan	Kalurahan	Padukuhan
1	2018	420	22	3
2	2019	504	25	4
3	2020*	557	33	5



Penyerahan Penghargaan dari Bupati Sleman bagi Padukuhan dan Kalurahan yang berhasil "Lunas PBB P2 Tahun 2020"

- 5) Adanya supervisi dari Pemerintah Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian KPK terkait pengelolaan pajak daerah melalui beberapa indikator yang dinilai oleh KPK. Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah *database* wajib pajak yang aktual dan potensial, integrasi *database* pajak dengan perizinan, *database* tunggakan pajak yang selalu dimutakhirkan, serta inovasi-inovasi yang dibangun dalam rangka akselerasi peningkatan penerimaan pajak dan perbaikan pelayanan pajak.



3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 101,20% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,39	82,37	101,20

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 133 unit organisasi, terdiri dari 47 perangkat daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah, dan 77 UPT/UPTD. Capaian IKM tahun 2020 juga lebih baik dibandingkan IKM tahun 2019 yang terealisasi sebesar 81,78 atau meningkat 0,72%.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 per satuan organisasi dan pemeringkatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM 2020
1	Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan	A	Sangat Baik	93,73
2	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	A	Sangat Baik	91,47
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	Sangat Baik	89,42
4	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat	A	Sangat Baik	89,39
5	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	A	Sangat Baik	88,90
6	Kapanewon Cangkringan	B	Baik	87,83
7	Dinas Tenaga Kerja	B	Baik	87,65
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B	Baik	87,13
9	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir	B	Baik	87,12
10	UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan	B	Baik	87,04
11	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	B	Baik	86,56
12	Kapanewon Pakem	B	Baik	86,15
13	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	B	Baik	85,75
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	B	Baik	85,30
15	Kapanewon Ngaglik	B	Baik	85,30
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B	Baik	85,29
17	Dinas Kebudayaan	B	Baik	85,27
18	Kapanewon Seyegan	B	Baik	85,13
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	Baik	84,96



20	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	B	Baik	84,88
21	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	B	Baik	84,75
22	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	B	Baik	84,54
23	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	B	Baik	84,54
24	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V	B	Baik	84,50
25	Dinas Sosial	B	Baik	84,34
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu	B	Baik	84,27
27	Inspektorat Kabupaten	B	Baik	84,22
28	Kapanewon Sleman	B	Baik	84,11
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	B	Baik	83,86
30	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II	B	Baik	83,76
31	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV	B	Baik	83,74
32	Bagian Umum Sekretariat Daerah	B	Baik	83,62
33	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I	B	Baik	83,60
34	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean	B	Baik	83,49
35	Dinas Pendidikan	B	Baik	83,42
36	Kapanewon Kalasan	B	Baik	83,38
37	Kapanewon Tempel	B	Baik	83,33
38	Dinas Pariwisata	B	Baik	83,32
39	Kapanewon Minggir	B	Baik	83,23
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	Baik	83,15
41	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	B	Baik	83,12
42	UPTD Pelayanan Persampahan	B	Baik	83,04
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	Baik	83,01
44	UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	B	Baik	83,00
45	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem	B	Baik	82,79
46	Kapanewon Godean	B	Baik	82,73
47	Kapanewon Prambanan	B	Baik	82,72
48	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I	B	Baik	82,68
49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	Baik	82,59
50	UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan	B	Baik	82,56
51	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	B	Baik	82,52
52	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman	B	Baik	82,38
53	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	B	Baik	82,37
54	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	Baik	82,35
55	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati	B	Baik	82,32
56	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah	B	Baik	82,25
57	UPTD Pengelolaan Perparkiran	B	Baik	82,25
58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik	82,17
59	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	B	Baik	82,12
60	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II	B	Baik	82,12
61	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I	B	Baik	82,09
62	Kapanewon Berbah	B	Baik	82,04
63	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II	B	Baik	82,00



64	Satuan Polisi Pamong Praja	B	Baik	81,98
65	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII	B	Baik	81,98
66	Dinas Lingkungan Hidup	B	Baik	81,97
67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	Baik	81,93
68	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok	B	Baik	81,89
69	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan	B	Baik	81,87
70	Dinas Kesehatan	B	Baik	81,87
71	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	B	Baik	81,78
72	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II	B	Baik	81,78
73	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I	B	Baik	81,74
74	Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan	B	Baik	81,62
75	Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan	B	Baik	81,60
76	Kapanewon Depok	B	Baik	81,56
77	Kapanewon Moyudan	B	Baik	81,51
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	B	Baik	81,49
79	Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah	B	Baik	81,45
80	Kapanewon Mlati	B	Baik	81,44
81	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi	B	Baik	81,39
82	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan	B	Baik	81,28
83	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	B	Baik	81,28
84	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI	B	Baik	81,28
85	UPTD Pelayanan Metrologi Legal	B	Baik	81,28
86	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III	B	Baik	81,27
87	Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan	B	Baik	81,24
88	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	Baik	81,24
89	Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman	B	Baik	81,21
90	Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem	B	Baik	81,19
91	Balai Latihan Kerja	B	Baik	81,18
92	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III	B	Baik	81,15
93	Dinas Perhubungan	B	Baik	81,14
94	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II	B	Baik	81,12
95	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II	B	Baik	81,00
96	Sekretariat DPRD	B	Baik	80,93
97	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping	B	Baik	80,93
98	Kapanewon Turi	B	Baik	80,76
99	UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	B	Baik	80,75
100	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II	B	Baik	80,73
101	UPTD Sub Terminal Agribisnis	B	Baik	80,72
102	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V	B	Baik	80,54
103	Pusat Kesehatan Masyarakat Turi	B	Baik	80,51
104	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I	B	Baik	80,50
105	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II	B	Baik	80,49
106	Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan	B	Baik	80,40
107	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah	B	Baik	80,38



108	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I	B	Baik	80,28
109	Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan	B	Baik	80,22
110	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II	B	Baik	80,22
111	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik	B	Baik	80,20
112	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I	B	Baik	80,19
113	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV	B	Baik	80,16
114	UPTD Taman Pemakaman Umum	B	Baik	80,07
115	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I	B	Baik	80,00
116	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan	B	Baik	79,90
117	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII	B	Baik	79,78
118	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan	B	Baik	79,72
119	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur	B	Baik	79,68
120	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III	B	Baik	79,58
121	UPTD Museum Gunungapi Merapi	B	Baik	79,56
122	Kapanewon Gamping	B	Baik	79,52
123	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel	B	Baik	79,05
124	Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir	B	Baik	79,02
125	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa	B	Baik	78,96
126	Kapanewon Ngemplak	B	Baik	78,83
127	UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan	B	Baik	78,81
128	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I	B	Baik	78,28
129	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B	Baik	78,24
130	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak	B	Baik	77,83
131	UPTD Laboratorium Kesehatan	B	Baik	77,71
132	UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	B	Baik	77,63
133	UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal	B	Baik	77,47
IKM Pemerintah Kabupaten Sleman		B	Baik	82,37

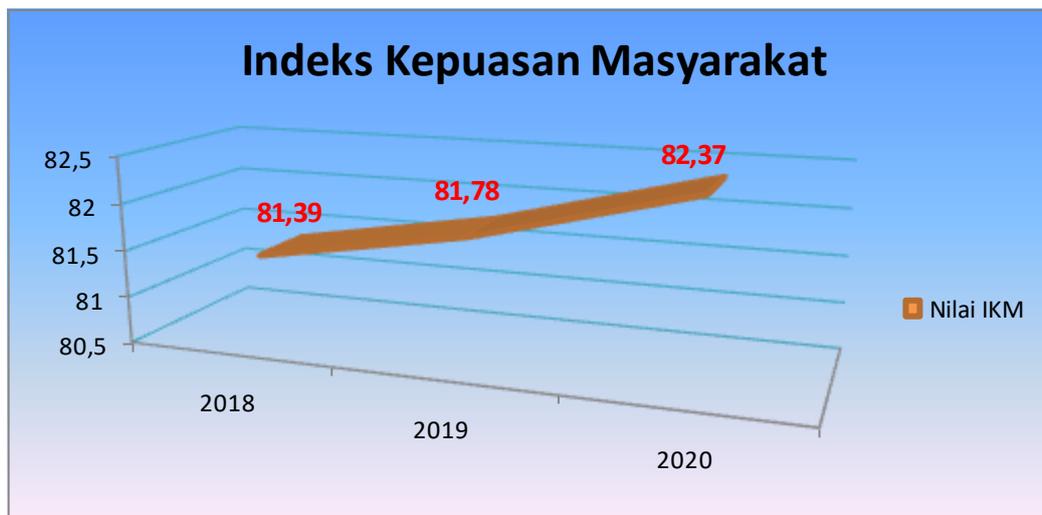
Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,39	81,78	82,37	82,00

Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.14 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.357.825.190	3.231.825.945	96,25
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.154.599.121	105.781.312.061	88,04
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	30.541.938.461	27.187.132.943	89,02
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.449.014.586	24.104.773.221	91,14
5	Program Pengembangan Data/Informasi	17.009.750	16.809.500	98,82
6	Program Kerjasama Pembangunan	32.684.539	32.655.039	99,91
7	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang IPTEK	184.592.500	184.592.000	100,00
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	190.437.200	189.083.000	99,29
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.571.273.350	3.519.503.182	98,55
10	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	7.620.849.610	6.847.980.938	89,86
11	Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	126.456.201.270	125.053.740.796	98,89
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Persandian Daerah	284.652.950	283.244.680	99,51
13	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.533.760.127	1.278.511.190	83,36
14	Program Pengembangan	1.712.708.800	1.646.762.160	96,15



	Data/Informasi/Statistik Daerah			
15	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.409.574.154	1.376.105.633	97,63
16	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	25.023.000	25.020.000	99,99
17	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	3.088.935.300	2.969.565.660	96,14
18	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.221.007.848	3.129.399.600	97,16
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	38.250.000	33.201.000	86,80
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.631.576.850	5.281.450.813	93,78
21	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	195.740.025	194.176.500	99,20
22	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.887.767.305	11.179.493.403	94,04
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.364.763.350	2.992.030.215	88,92
24	Program Pendidikan Kedinasan	6.025.000	5.845.800	97,03
25	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	1.064.806.400	1.062.976.592	99,83
26	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	37.154.162.850	31.731.266.586	85,40
27	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.677.947.400	1.872.629.025	69,93
28	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	752.992.500	728.443.775	96,74
29	Program penegakan hukum	1.156.758.350	1.036.604.450	89,61
30	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.183.232.000	1.163.355.250	98,32
31	Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan	26.195.000	25.618.000	97,80
32	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	200.335.000	189.785.000	94,73
33	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis dan Kasultanan dan Kadipaten	637.658.000	628.358.000	98,54
34	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	341.836.850	315.743.950	92,37
35	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.020.160.000	1.811.542.900	89,67
36	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	105.140.350	104.951.150	99,82

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp367.215.498.957,00 dari anggaran sebesar Rp398.297.434.986,00 atau 92,20%. Realisasi keuangan sebesar 92,20% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,20%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Mal Pelayanan Publik (MPP) Sleman di masa pandemi COVID-19 tetap menyelenggarakan pelayanan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, dan mengutamakan pelayanan secara daring melalui sistem yang telah berhasil dikembangkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- 1) Pengaduan masyarakat semakin optimal dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terus berupaya untuk melakukan *update* data maupun informasi di dalamnya.
- 3) Jajaran aparatur penyelenggara pelayanan publik di 133 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) semakin meningkat ketaatannya dalam menerapkan Standar Pelayanan (SP).
- 4) Indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sleman, sehingga menjadi panduan bagi semua Perangkat Daerah dan UPT/UPTD dalam membangun kinerja maupun kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi pedoman bagi pembina pelayanan publik untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta penilaian.



- 5) Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 3 (tiga) instansi *role model* pelayanan publik tingkat nasional dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga tersedia rujukan *best-practice* bagi instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- 6) Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik, diantaranya melalui inovasi penyelenggaraan layanan pada hari Sabtu. Jam tambahan layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna layanan yang hanya dapat mengakses layanan MPP di luar hari kerja biasa. Layanan inovatif di hari Sabtu ini juga diselenggarakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dimana hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan publik tersebut pada tahun 2020 menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 91,47 mutu pelayanan “A” dan predikat kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”.
- 7) Sarana prasarana pelayanan publik terus ditingkatkan kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan.
- 8) Pengembangan implementasi kebijakan *smart-regency*, secara signifikan telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sleman, terlebih selama masa pandemi COVID-19 dimana sedemikian rupa diupayakan praktek penyelenggaraan publik dilakukan secara daring (*online*). Posisi Sleman sebagai salah satu dari 100 *smart-regency* sebagaimana diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah memberikan tingkat kesiapan tersendiri di masa pandemi COVID-19. Salah satu alat ukur yang nampak adalah Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil menyabet predikat Terbaik Nasional Pemetaan Mutu Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik memperoleh beberapa prestasi, antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil meraih prestasi sebagai penyelenggara sistem pengaduan pelayanan publik terbaik nasional tahun 2020, dalam ajang kompetisi yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sleman diakui telah mampu mengolah pengaduan masyarakat untuk menjadi sumber perubahan bahkan perencanaan bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sleman juga dinyatakan sebagai salah satu sumber *knowledge* dan model dalam pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, guna mempercepat reformasi birokrasi.

Penghargaan ini akan memacu dan memicu semangat Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan masyarakat akan terus diupayakan untuk semakin mendekati tataran ideal, memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta memanfaatkan data tersebut sebagai

dasar pengambilan kebijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penghargaan ini sekaligus telah memantapkan sistem “Lapor Sleman” sebagai salah satu icon dari capaian *Sleman Smart Regency*.



Bupati Sleman Bapak Drs. H. Sri Purnomo, MSI menerima Penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai **“Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020”**, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., dan disaksikan oleh Menteri PANRB Bapak Tjahjo Kumolo, S.H., pada tanggal 25 November 2020 di Jakarta

- 2) Dari 10 (sepuluh) inovasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkiprah di ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 1 (satu) inovasi berhasil masuk dalam “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020” yaitu Inovasi **“Gelang Si Cantik”**. Inovasi “Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi dengan Membaca, Menulis, dan TIK” ini diusung oleh SMP Negeri 4 Pakem Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.



"Salam Literasi" dalam Inovasi GELANG SI CANTIK oleh Bupati Sleman Bapak Drs. H. Sri Purnomo, MSI dan Kepala SMP Negeri 4 Pakem Bapak Ponidi, S.Pd.



Inovasi "GELANG SI CANTIK" telah terbukti efektif mendorong para siswa SMP Negeri 4 Pakem untuk aktif memanfaatkan berbagai fasilitas literasi dan berprestasi di berbagai ajang kompetisi hingga menembus kancah internasional



4. Analisis Kinerja Sasaran 4: “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” mencapai 100,04% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,78	74,81	100,04

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Indikator kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sleman mencapai 100,04%, dari target 74,78 tahun terealisasi 74,81 tahun. Nilai UHH tersebut 0,18 tahun lebih rendah dibanding nilai UHH Provinsi DIY sebesar 74,99 tahun, dan 3,34 tahun lebih tinggi dibanding nilai UHH nasional sebesar 71,47 tahun.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,63	74,69	74,81	74,82

Grafik 3.4 Usia Harapan Hidup





Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.17 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.454.254.380	10.422.163.695	90,99
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	92.305.532.004	81.009.877.680	87,76
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.028.446.000	861.753.040	83,79
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	755.749.658	636.851.705	84,27
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	411.167.000	395.475.600	96,18
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	74.530.000	68.140.000	91,43
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	20.412.848.300	14.282.923.443	69,97
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	241.680.200	183.185.000	75,80
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	757.878.750	702.921.650	92,75
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	61.169.506.259	54.358.739.977	88,87
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	21.805.000	19.970.000	91,58
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	185.246.699.058	158.919.075.625	85,79
13	Program Perencanaan Sosial Budaya	135.300.000	135.210.000	99,93
14	Program Keluarga Berencana	4.020.196.500	3.773.452.734	93,86
15	Program Pelayanan Kontrasepsi	111.931.000	111.731.000	99,82
16	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.658.933.300	1.655.121.050	99,77
17	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	152.193.700	152.193.700	100,00
18	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	127.574.650	127.574.650	100,00
19	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU	10.240.0000	10.240.000	100,00
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	2.063.963.850	1.960.314.925	94,98



21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	195.000.000	193.666.875	99,32
22	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	32.965.000	32.965.000	100,00
23	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	21.205.000	21.205.000	100,00

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp330.034.752.349,00 dari anggaran sebesar Rp382.409.599.609,00 atau 86,30%. Realisasi keuangan sebesar 86,30% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,04 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Launching Klinik Vaksinasi Internasional pada RSUD Sleman oleh Bupati Sleman, Bapak Drs. H. Sri Purnomo, MSI

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Usia Harapan Hidup masyarakat antara lain:

1. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai, dan sumber daya yang berkualitas.



IPAL Puskesmas Ngaglik I dan Puskesmas Cangkringan



2. Pemenuhan regulasi standar bangunan Puskesmas serta pemenuhan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.



Penambahan Ruang pada Puskesmas Ngemplak II

3. Tersedianya 10 (sepuluh) Puskesmas Rawat Inap yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan 11 (sebelas) Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, termasuk COVID-19.
4. Adanya regulasi daerah yang mengatur Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai bagian dari upaya memotivasi program STBM agar berkelanjutan.
5. Adanya Tim Pengawas Makanan yang Terpadu Tingkat Kabupaten. Terutama pada masa pandemi bagi usaha jasaboga dan restoran agar menerapkan protokol kesehatan.
6. Adanya kolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam mewujudkan *smart living* melalui terobosan-terobosan yang solutif, antara lain Inovasi Candak Mas COVID (Cari dan Kendalikan Masalah COVID-19) yang melacak kasus dengan cepat guna pengendalian penyebaran COVID-19.
7. Pengembangan Sistem Informasi Jejaring Emergensi Mencegah Panik *On Line* (Si Jempol) yang dilengkapi dengan *Panic Button* dan *Ambulance Locator* untuk mempersingkat waktu respon penanganan.





8. Adanya kesadaran masyarakat umum dan institusi untuk melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) secara mandiri.
9. Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan dan promosi kesehatan pada Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
10. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.



Penyerahan ambulan untuk 3 (tiga) Puskesmas yaitu Puskesmas Moyudan, Puskesmas Minggir, dan Puskesmas Mlati II sebagai salah satu upaya memenuhi mutu peralatan dan meningkatkan pelayanan masyarakat

11. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
12. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan CITA MAS JAJAR (Cuci Tangan Pakai Sabun Memakai Masker dan Jaga Jarak minimal 1,5 m).



Edukasi Pencegahan COVID-19 dengan Tema CITA MAS JAJAR di Mall Ambarukmo Plaza - Sleman

13. Adanya kesadaran pengelola fasilitas umum di masa pandemi yang sudah menerapkan perilaku protokol kesehatan, dibuktikan dengan penghargaan Terminal Sehat dan Pasar Siaga COVID-19.
14. Penerapan Akreditasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:



- a) RSUD Sleman memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
- b) RSUD Prambanan memperoleh akreditasi “Paripurna”
- c) Akreditasi terhadap 25 (dua puluh lima) Puskesmas, yang menghasilkan kategori:
 - 1) Kategori Paripurna 1 Puskesmas
 - 2) Kategori Utama 14 Puskesmas
 - 3) Kategori Madya 10 Puskesmas

Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana kondisi tahun sebelumnya:

- 1) Kategori Utama 2 Puskesmas
- 2) Kategori Madya 14 Puskesmas
- 3) Kategori Dasar 9 Puskesmas.

15. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Kesehatan Reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas memilih Obat (Gema Cermat), Gerakan Rumah Tangga Tidak Merokok, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.

Prestasi Pemerintah Kabupaten dalam bidang kesehatan antara lain:

- 1) Juara Umum Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada beberapa kategori antara lain: Peringkat 3 kategori Terminal Sehat Tipe C, Peringkat I kategori Rumah Makan - Restoran, Peringkat I kategori Jasaboga Golongan A, dan Peringkat II kategori Restoran Hotel.
- 2) Peringkat 2 Penghargaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) *Award*.
- 3) Penghargaan kepada 7 Posbindu dalam rangka HKN 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



- 4) Penghargaan Puskesmas dengan Inovasi Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Komprehensif dan Terintegrasi kepada Puskesmas Godean I, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



- 5) Tenaga Kesehatan Teladan I Kategori Dokter Tingkat Provinsi DIY
- 6) Tenaga Kesehatan Teladan I Kategori Dokter Gigi Tingkat Provinsi DIY
- 7) Tenaga Kesehatan Teladan I Kategori Nutrisionis Tingkat Provinsi DIY
- 8) Tenaga Kesehatan Teladan IV Kategori Perawat Tingkat Provinsi DIY



Penyampaian Penghargaan STBM Award (secara virtual), dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sleman



5. Analisis Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan” yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja mencapai 103,56%, dan termasuk predikat “**sangat berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,32	96,88	123,70
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	≥100	100,41	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	≥100	101,69	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	≤100	95,85	100,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	85,93	84,51	98,35
6	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,67	10,91	102,25
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,63	16,73	100,60
8	Nilai Rata-rata Hasil Ujian SD	Nilai	N/A	N/A	-
9	Nilai Rata-rata Hasil Ujian SMP	Nilai	N/A	N/A	-
Rata-rata capaian					103,56

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

Konsep definisi Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara peserta didik pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tabel di atas diperoleh dari perbandingan jumlah peserta didik PAUD (TK/RA) terhadap penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Sleman dalam persentase. Realisasi APK PAUD tahun 2020 sebesar 96,88% dari target sebesar 78,32. Realisasi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 5-6 di Kabupaten Sleman termasuk sangat tinggi dan kapasitas sistem Pendidikan jenjang PAUD (TK/RA) juga sangat mencukupi. Dalam hal ini juga dapat diartikan bahwa aksesibilitas PAUD di Kabupaten Sleman sangat mencukupi untuk menampung siswa dari kelompok usia 5-6 tahun.

Apabila melihat tren realisasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1	APK PAUD	78,27	78,29	99,83	96,88	78,35

maka dapat dilihat adanya kenaikan drastis pada tahun 2019 dikarenakan perubahan





rumus perhitungan menyesuaikan perhitungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Angka realisasi tahun 2020 menurun sebesar 2,95% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99,83%. Kondisi dimaksud merupakan dampak pandemi COVID-19 dengan adanya kebijakan penggunaan metode Belajar Dari Rumah (BDR) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penurunan hampir 3% tersebut dianalisis merupakan imbas dari penurunan jumlah peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.

Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) siswa PAUD, berupa praktik mencuci masker

Berdasarkan laporan dari pengawas TK yang melakukan monitoring di lingkungan sekitar sekolah binaan, terdapat beberapa orang tua yang memilih untuk menunda pendaftaran sekolah putra-putrinya ke jenjang PAUD sampai keadaan kembali pulih. Para orang tua tersebut tampaknya merasa dirugikan atau keberatan ketika sudah membayar uang sekolah tetapi putra/putrinya hanya belajar dari rumah. Dan mereka juga beranggapan bahwa anaknya akan siap dengan sendirinya apabila nantinya langsung mendaftar ke jenjang SD tanpa harus mengikuti pembelajaran di PAUD.

Grafik 3.5 APK PAUD



b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.

APK SD/MI sederajat menggambarkan persentase ketersediaan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Sleman dengan membandingkan antara jumlah peserta didik

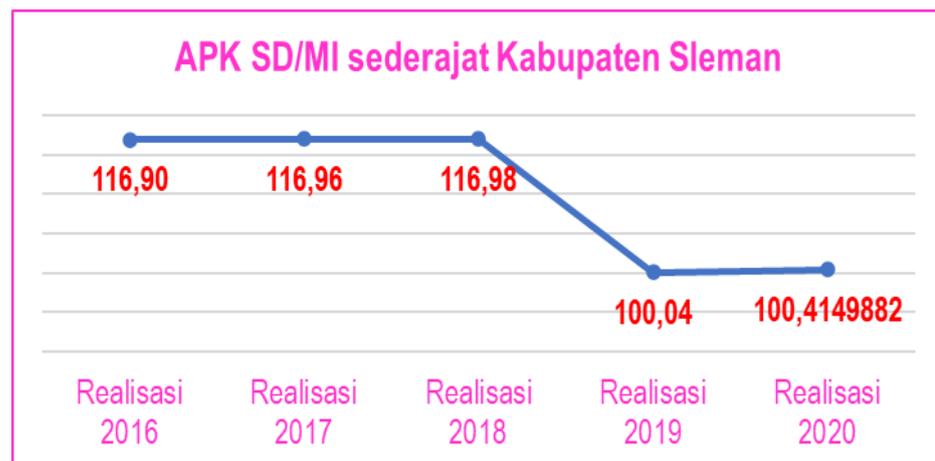
SD/ sederajat (SD, SPK SD, SDTK, MI, Paket A, dan SDLB) dan jumlah warga Sleman usia 7 s.d. 12 tahun.



Suasana pembelajaran di ruang perpustakaan di salah satu SD (foto sebelum pandemi)

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI sederajat tahun 2020 dari target ≥ 100 terealisasi 100,41%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,48% dari realisasi tahun lalu sebesar 100,04%. Angka realisasi tersebut dapat diartikan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan jenjang SD/MI sederajat, Kabupaten Sleman memiliki layanan pendidikan yang mencukupi bagi seluruh warga Sleman usia 7 s.d. 12 tahun.

Grafik 3.6 APK SD/MI



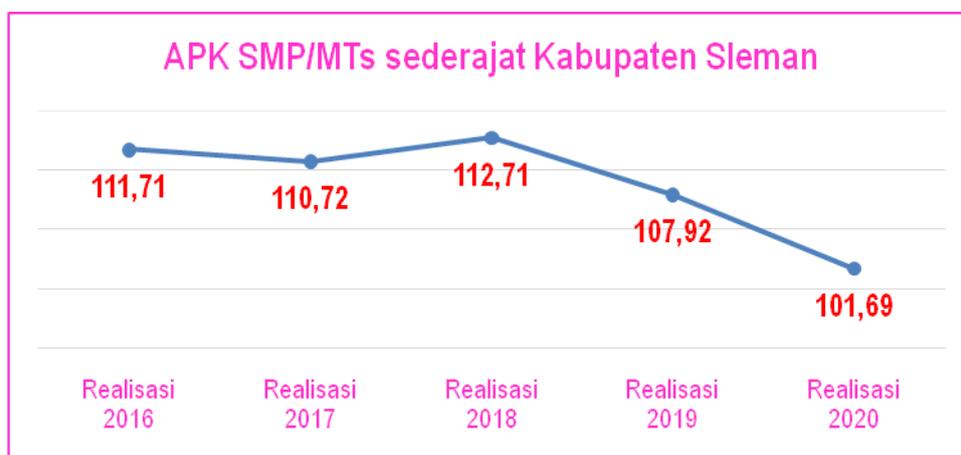
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.
APK SMP/MTs sederajat menggambarkan persentase ketersediaan fasilitas pendidikan menengah pertama di Kabupaten Sleman dengan membandingkan antara

jumlah peserta didik SMP/ sederajat (SMP, SPK SMP, SMPTK, MTs, Paket B, dan SMPLB) dan jumlah warga Sleman usia 13 s.d. 15 tahun.

APK SMP/MTs sederajat Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar 101,69%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam hal penyediaan fasilitas pendidik jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Sleman memiliki layanan pendidikan yang mencukupi bagi seluruh warga Sleman usia 13 s.d. 15 tahun.

Realisasi tersebut mengalami penurunan 6,23%, dibandingkan tahun lalu sebesar 107,92%. Apabila dibandingkan angka tahun-tahun sebelumnya, APK SMP/MTs sederajat menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut terindikasi dikarenakan adanya kebijakan zonasi di mana peserta didik memilih sekolah yang berlokasi dalam Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat tinggalnya. Sehingga persentase jumlah peserta didik dan jumlah penduduk hampir seimbang.

Grafik 3.7 APK SMP/MTs



d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.

APM SD/MI sederajat menggambarkan proporsi dari penduduk kelompok usia 7 s.d. 12 tahun yang sedang bersekolah tepat di jenjang SD/ sederajat. APM SD/MI sederajat dihitung dengan



Pengenalan teknologi informasi sejak bangku SD sebagai bagian dari persiapan menghadapi digitalisasi pendidikan (foto sebelum pandemi)

membandingkan antara jumlah

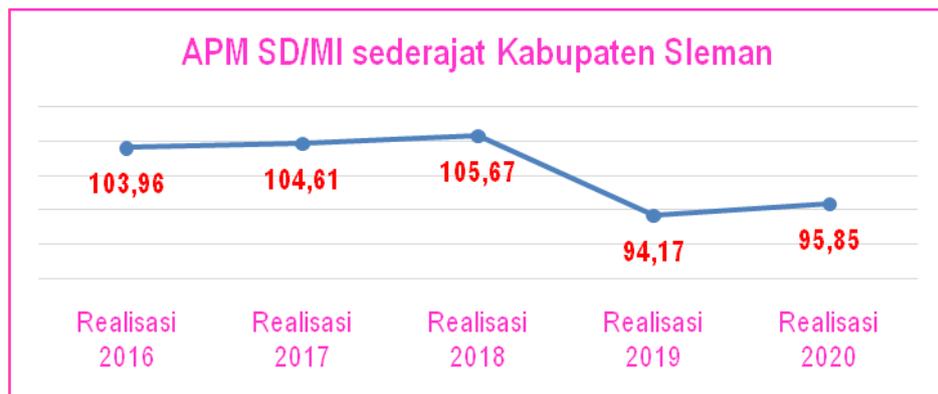
peserta didik SD/ sederajat (SD, SPK SD, SDTK, MI, Paket A, dan SDLB) usia 7 s.d. 12 tahun dan jumlah warga Sleman usia 7 s.d. 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sederajat dari target $\leq 100\%$, terealisasi sebesar 95,85%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,68%,



dibandingkan tahun lalu sebesar 94,17%. Hal ini berarti proporsi peserta didik berusia 7 s.d 12 tahun di kabupaten Sleman yang bersekolah tepat sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang SD/MI sederajat adalah sebesar 95,85%. Selanjutnya dapat diartikan ada sekitar 4 % peserta didik pada jenjang SD/MI sederajat berusia 6 tahun ke bawah. Kondisi tersebut dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan anak usia 5 tahun 6 bulan ke atas untuk mendaftar ke jenjang SD/sederajat.

Grafik 3.8 APM SD/MI



e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

APM SMP/MTs sederajat menggambarkan kesesuaian antara usia peserta didik yang sedang bersekolah tepat di jenjang SMP/sederajat. APM SMP/MTs sederajat dihitung dengan membandingkan antara jumlah peserta didik SMP/sederajat (SMP, SPK SMP, SMPTK, MTs, Paket B, dan SMPLB) usia 13 s.d. 15 tahun dan jumlah warga Sleman usia 13 s.d. 15 tahun.

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs sebesar 84,51%, dari target 84,9% atau tercapai 98,35%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 86,90% mengalami penurunan sebesar 2,39%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa perkiraan proporsi peserta didik usia 13 s.d. 15 tahun di Kabupaten Sleman yang bersekolah tepat sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang SMP/sederajat adalah sebesar 84,51% dan sekitar 15% peserta didik pada jenjang SMP/MTs sederajat berusia 12 tahun atau kurang.

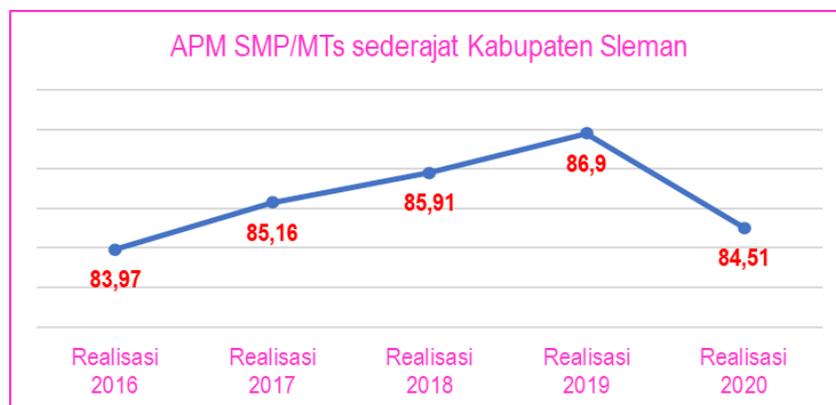




Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di salah satu SMP Negeri (foto sebelum pandemi COVID-19)

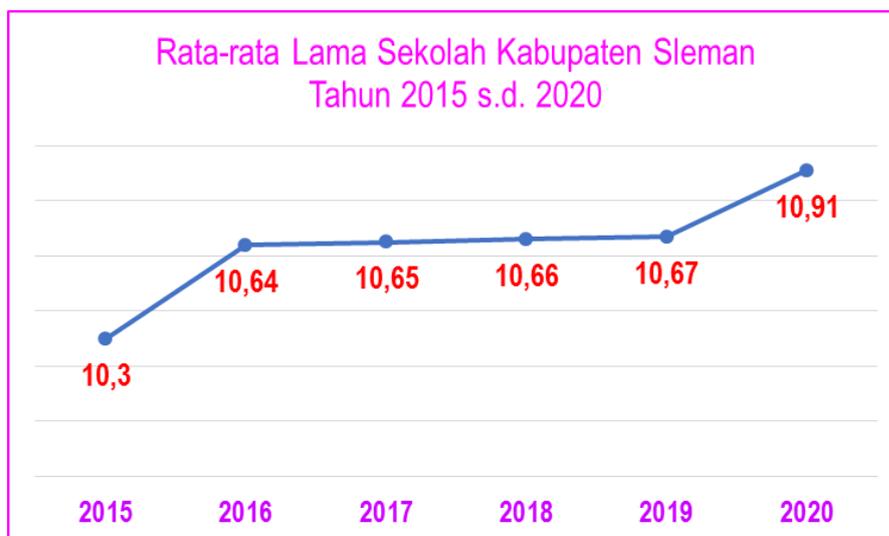
Hal tersebut terjadi sebagai dampak adanya peserta didik yang berusia lebih awal memasuki jenjang SD/MI sederajat dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan anak berusia dibawah 7 tahun untuk mendaftar ke jenjang SD/MI sederajat, sehingga pada usia 12 tahun anak tersebut sudah lulus jenjang SD/MI sederajat dan dapat mendaftar ke SMP/MTs sederajat. Hal ini juga menjelaskan bahwa tidak tercapainya target pada tahun 2020 ini dan juga turunnya realisasi dibandingkan tahun lalu bukan berarti terjadi penurunan kualitas pendidikan ataupun kinerja Dinas Pendidikan. Akan tetapi justru menggambarkan antusias dan kepercayaan masyarakat untuk mengenalkan anak terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Sleman lebih awal dari yang seharusnya.

Grafik 3.9 APM SMP/MTs



- f. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
- RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- Perhitungan RLS tahun 2020 dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). RLS tahun 2020 terealisasi 10,91 tahun dari target 10,67 tahun, sehingga capaiannya sebesar 102,25%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,67 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,24 tahun atau 2,25%. Angka rata-rata lama sekolah ini lebih baik sebesar 1,36 poin dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi DIY (9,55 tahun).

Grafik 3.10 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



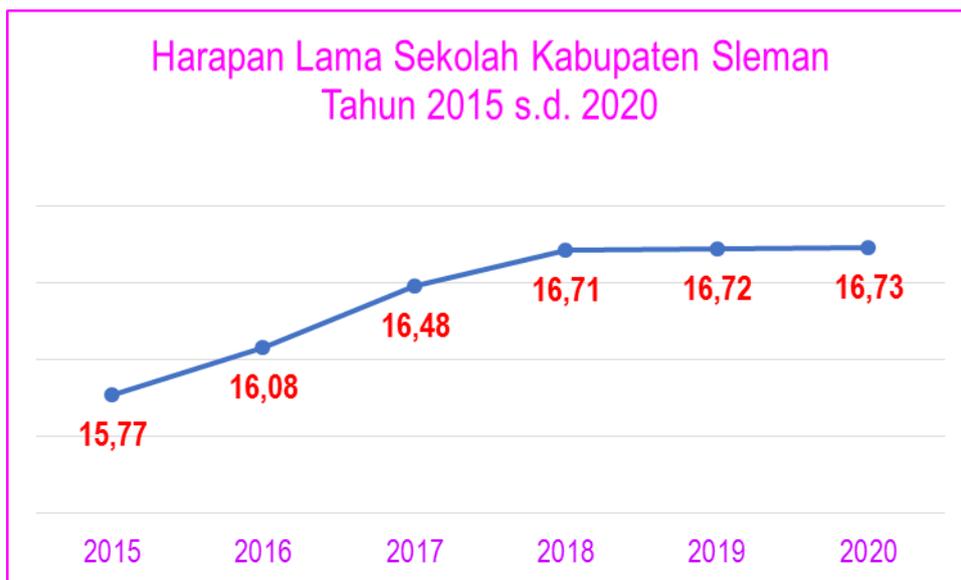
Rata-rata lama sekolah dari tahun 2015 hingga 2019 cenderung meningkat. Lonjakan RLS sendiri tampaknya terjadi setiap lima tahun sekali, seperti pada tahun 2015 ke 2016 dan pada tahun 2019-2020 hingga di posisi 10,91 tahun. Hal ini berarti bahwa warga Sleman usia 25 keatas menjalani pendidikan formal dalam kurun waktu rata-rata 10,91 tahun atau setidaknya berada pada kelas 11 SMA.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas dan kuantitas pendidikan menengah di Kabupaten Sleman perlu ditingkatkan. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah lebih besar berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (SMA/SMK). Peran yang dapat diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan mempertahankan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sampai dengan lulus SMP/ sederajat, serta meningkatkan proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan Paket A/B/C, guna mengakomodir warga Sleman yang putus sekolah.

g. Harapan Lama Sekolah (HLS)

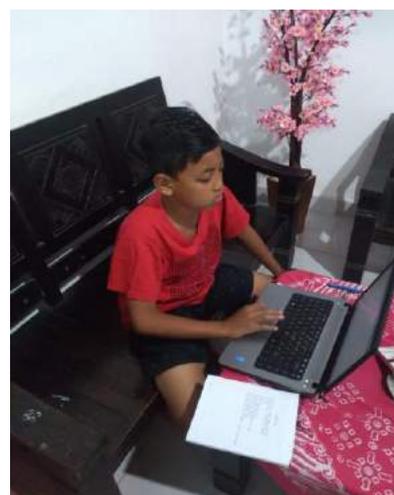
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan HLS juga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dari target 16,63 tahun terealisasi 16,73 tahun, sehingga capaiannya sebesar 100,60%. Hal ini berarti bahwa warga Sleman berharap dapat mengenyam pendidikan setidaknya hingga tamat Diploma III. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,72 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun atau sebesar 0,06%. Angka capaian ini lebih baik sebesar 1,14 tahun dibandingkan angka HLS Provinsi DIY (15,59 tahun).

Grafik 3.11 Harapan Lama Sekolah (HLS)



h. Nilai Rata-rata Ujian SD dan SMP

Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, ujian SD dan SMP tidak diadakan, sehingga realisasi nilai rata-rata hasil ujian SD dan SMP tidak dapat dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan sejak bulan April s.d. Desember 2020, proses pembelajaran pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sleman diputuskan untuk penerapan metode Belajar Dari Rumah (BDR). Kelulusan peserta didik VI SD dan XI SMP dilakukan dengan mempertimbangkan hasil belajar peserta didik 5 semester terakhir atau sejak kelas IV sampai dengan kelas VI semester gasal.



Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) salah satu peserta didik

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,29	99,83	96,88	78,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	116,98	100,04	100,41	≥100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	112,71	107,92	101,69	≥100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	105,67	94,17	95,85	≤100



5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	85,91	86,90	84,51	85,97
6	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,65	10,67	10,91	10,85
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,48	16,72	10,73	16,68
8	Nilai Rata-rata Hasil Ujian SD	Nilai	211,05	210,41	N/A	210,20
9	Nilai Rata-rata Hasil Ujian SMP	Nilai	255,50	265,76	N/A	256,65

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan” dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.20 Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.062.062.050	4.995.427.180	98,68
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	143.046.914.953,68	136.113.382.782	95,15
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	54.039.101.040	52.145.408.000	96,50
4.	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	586.205.000	577.746.000	98,56
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.518.191.750	3.474.238.150	98,75
6.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	1.166.381.250	1.148.833.775	98,50
7.	Program Pengembangan Budaya Baca	549.504.850	537.170.150	97,76
8.	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	567.352.897	565.601.347	99,69
9.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	271.135.500	263.121.125	97,04

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp199.820.928.509 dari anggaran sebesar Rp208.806.849.291 atau 95,70%. Realisasi keuangan sebesar 95,70% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,56%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:



- 1) Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) TK/RA berjumlah 576, terdiri dari 5 sekolah negeri dan 571 sekolah swasta. Jumlah TK/RA mendominasi jumlah keseluruhan PAUD sebesar 99,13%
 - b) SD/MI berjumlah 547 sekolah, terdiri 376 sekolah negeri dan 171 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 68,74%, sedangkan persentase sekolah swasta yaitu 31,26%. Dari sisi peserta didik, persentase sekolah swasta mencapai 38,79%. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta cenderung memiliki rombongan belajar lebih banyak daripada sekolah negeri. Artinya, partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas SD/MI juga memberikan andil aksesibilitas Pendidikan dasar di Kabupaten Sleman.
 - c) SMP/MTs berjumlah 153, terdiri dari 64 sekolah negeri dan 89 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah swasta lebih besar dari pada sekolah negeri yaitu sebesar 58,17%, sedangkan persentase sekolah negeri yaitu 41,83%. Jika dilihat dari persentase jumlah peserta didik, sejatinta peserta didik di sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 60,46%
- 2) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Sleman untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan di Kabupaten Sleman. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mewujudkan 8 standar pendidikan nasional. Terutama pada masa pandemi COVID-19, pemanfaatan dana BOS tidak lagi dibatasi tetapi tetap dengan prinsip sesuai kebutuhan dan kondisi kemampuan anggaran masing-masing satuan Pendidikan.

Pada tahun 2020, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu, dana BOS Reguler APBN SD dialokasikan sebesar Rp 900.000, 00 per siswa per tahun, sedangkan BOS APBD Kabupaten Sleman untuk SD Negeri sebesar Rp 405.000,00 dan SD Swasta/MI sebesar Rp 360.000,00 per siswa per tahun. Adapun BOS Reguler APBN SMP sebesar Rp 1.100.000,00 per siswa per tahun, dan BOS APBD Kabupaten Sleman untuk SMP Negeri sebesar Rp 555.000,00 dan SMP Swasta sebesar Rp 405.000,00 per siswa per tahun.
- 3) Penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu mulai dari jenjang SD dan SMP. Peserta didik jenjang SD diberikan bantuan Rp450.000 per siswa per tahun dengan total penerima sebanyak 2.235 siswa atau



terrealisasi sebesar Rp1.005.750.000,00, sedangkan bagi peserta didik jenjang SMP diberikan bantuan Rp750.000,00 per siswa per tahun dengan total penerima sebanyak 1.957 siswa dengan total bantuan sebesar Rp1.467.750.000,00. Selain itu terdapat bantuan pendidikan dalam bentuk program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu penyelesaian keuangan antara orang tua/wali peserta didik dari keluarga tidak mampu dengan sekolah swasta. Pengajuan bantuan tersebut dilakukan melalui Dinas Sosial, sehingga diharapkan dengan penyediaan bantuan sosial Pendidikan dasar dan JPS ini tidak ada anak putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi.

- 4) Kerjasama dengan *stake holder* lain seperti Dewan Pendidikan kabupaten Sleman, PGRI, Lembaga Pendidikan Tinggi, dan *corporate* di wilayah Kabupaten Sleman. Pada masa pandemi COVID-19 Dewan Pendidikan telah menyusun kajian hasil pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar dari Rumah (BDR) serta memberikan rekomendasi pelaksanaan BDR mendatang, antara lain :
 - a. Peran orang tua dalam pendampingan belajar anak-anak mereka di rumah yang posisinya menggantikan peran guru di sekolah sangat penting. Pembelajaran daring bisa berjalan efektif apabila orang tua mempunyai kesadaran untuk mendampingi anak secara penuh.
 - b. Perlunya mengembangkan TV Digital Edukasi. Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana Kabupaten Sleman berdasarkan peta epidemiologi 30 Nover 2020 termasuk dalam kategori zona merah.
- 5) Pemanfaatan IT dalam penyampaian materi ajar kepada anak didik SD, salah satunya Inovasi dalam pembelajaran berupa “Sembada Belajar”. Pembelajaran melalui platform You Tube dengan metode penyajian materi yang menarik, animatif dan guru model yang kreatif, diharapkan dapat lebih merangsang minat belajar dan mudah memahami materi yang disampaikan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini.

Prestasi dan penghargaan di bidang pendidikan, antara lain:

- 1) Penghargaan Terbaik Nasional, Kinerja Tim Pemetaan Mutu Pendidikan DIY 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Sekolah Pangan Aman Atas Komitmen dan peran Aktif Dalam Penerapan Keamanan Pangan di Sekolah kepada SD Muhammadiyah Condongcatur Sleman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI





- 3) Prestasi Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional
 - a) Juara III Lomba Apresiasi Paud From Home Tahun 2020 atas nama Esra Sanita Hartati Sitorus, S.Th. dari HIMPAUDI
 - b) Penghargaan Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif Tahun 2020 atas nama Chita Faradilla Ambarkusumawati, S.Pd.Gr, TK Islam 31 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Penghargaan Kepala Sekolah Menengah Pertama Inspiratif Tahun 2020, atas nama Tri Worosetyaningsih, M.Pd., SMP Negeri 2 Pakem dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - d) Penghargaan Terbaik III kategori Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Dedikatif dan Inovatif Tahun 2020 atas nama Daswati Rofiatun Sahifah, S.T., M.Pd. dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



- 4) Prestasi Siswa

- Tingkat Internasional
 - a) Medali Perak *International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITeX) 2020* atas nama Issa Maulana Daffa Muhammad, Abdilah Ruhan, Banyu Gilang, dan Adiatma fatah, siswa SMP Negeri 4 Pakem, dari





National Research Council of Thailand (NRCT)

- b) Medali Perak *International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEx) 2020* atas nama Calya Fadey, Oksana Sasya, Titisari Ista Berliana, dan Naila Ilma, siswa SMP Negeri 4 Pakem, dari *National Research Council of Thailand (NRCT)*



- c) Medali Perak *International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEx) 2020* atas nama Tiara Putri, Anindya Ayu, Cut Khafiya, dan Cut Azalea, siswa SMP Negeri 4 Pakem, dari *National Research Council of Thailand (NRCT)*

- d) Medali Perak *International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEx) 2020* atas nama Janu Pasha Sindhu, Hahaningtyas, Kalisya Fatimatuzzahra, dan Nabila Azzahra, siswa SMP Negeri 4 Pakem, dari *National Research Council of Thailand (NRCT)*



- e) Medali Perak *International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEx) 2020* atas nama Akhtar haidar, Rafie Actiya, Apteda Jirokawa, Muhammad Wisam, Gading Ardli, dan Pradipta Arya, siswa SMP Negeri 4 Pakem, dari *National Research Council of Thailand (NRCT)*



- f) Medali Perak *International Science Technology Engineering Competition* atas nama Sekar Safitri Ramadhani, Balqis Nadira, dan Durratul B, siswa SMP Negeri 4 Pakem

- g) Medali Perak *International Science Technology Engineering Competition* atas nama Sast Ratna Adelia dan Alysa Salsabila Irfan Putri, siswa SMP Negeri 4 Pakem

▪ **Tingkat Nasional**

- a) Juara III menyanyi Solo Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tahun 2020 atas nama Alfina Atalya Nayla, siswa SMP Negeri 3 Godean
- b) Juara VI Pushbike Grandprix atas nama Devania Aira Rifano Siswa KBT TKIT Khalifah Centre dari Ganjuran Cycling Community (GC)C Even Concept





6. Analisis Kinerja Sasaran 6 : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 95,75% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,6	N/A	N/A
2.	Indeks Gini	Indeks	0,35-0,40*)	0,417*)	95,75
Rata-rata capaian					95,75

*) merupakan Angka Target Tahun 2019, agar “apple to apple” dengan angka realisasi terakhir yang tersedia (angka BPS)

Sumber data: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

a. Pertumbuhan Ekonomi

Angka realisasi Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik belum tersedia. Berdasarkan analisis ketimpangan pendapatan DIY yang dikeluarkan oleh BPS DIY berkerjasama dengan Bappeda DIY, bahwa Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut disebutkan dalam analisis tersebut bahwa kondisi turunnya kinerja ekonomi ini terjadi juga di DIY. Perekonomian DIY pada triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen (y-on-y) dan pada triwulan II tahun 2020 menurun signifikan sebesar 6,74 persen (y-o-y).

Kondisi penurunan kinerja ekonomi ini juga terjadi di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 6,42%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 6,49%. Namun dengan terjadinya pandemi covid-19 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan turun sangat drastis. Hal tersebut berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis. Asumsi tersebut antara lain kondisi kegiatan konstruksi sebagian besar terhenti, namun akan mulai berjalan di Triwulan 2 Tahun 2020 meskipun tetap ada pelambatan, layanan komunikasi dan data meningkat karena faktor pembatasan sosial, kinerja pariwisata mulai bergerak meskipun tidak optimal, dan Vaksin mampu didistribusikan secara luas sejak awal tahun 2021.



b. Indeks GINI

Angka realisasi 2020 belum dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, sehingga menggunakan angka Indeks Gini tahun sebelumnya. Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,417 dari target tahun 2019 sebesar 0,35-0,40 sehingga capaiannya adalah sebesar 95,75 %. Realisasi Indeks Gini tersebut mengalami penurunan dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,42 atau mencapai 0,0003 poin, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin mengecil atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin timpang.

Angka tersebut lebih besar apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,382 % (data BPS per Maret 2019), meskipun lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi DIY sebesar 0,423 % (data BPS DIY per Maret 2019).

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Sleman berada pada kriteria ketimpangan sedang.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan indeks gini tersebut antara lain:

1. Meningkatnya persentase pengeluaran/daya beli kelompok penduduk 40% terbawah.
2. Membaiknya pendapatan penduduk kelompok bawah.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35 * dan 6,42 **	6,49	N/A	5,63
2.	Indeks Gini	Indeks	0,42	0,42***	0,417***	0,35-0,40

* Realisasi berdasarkan LKjIP 2018

** Realisasi berdasarkan data BPS per November 2019

*** Realisasi berdasarkan LKjIP 2019



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.23 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	187.823.000	186.069.722	99,07
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	166.730.200	161.780.200	97,03
3	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	159.978.500	157.953.500	98,73
4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	94.410.000	91.787.500	97,22
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	608.809.350	586.892.500	96,40
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	260.843.000	260.743.000	99,96
7	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	4.075.154.375	3.997.143.569	98,09
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	631.537.900	625.240.072	99,00
9	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan	86.524.000	83.707.000	96,74
10	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.305.375.176	1.239.067.900	94,92
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.320.065.583	1.014.686.390	76,81

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 8.898.251.084 dari anggaran sebesar Rp8.405.071.403 atau 94,46%. Realisasi keuangan sebesar 94,46% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,75%, maka terjadi ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Prestasi yang diperoleh dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah Penghargaan Natamukti Award kategori Natamukti Ganapravara dari *International Council for Small (ICSB)* tanggal 17 September 2020



Penerimaan penghargaan Natamukti Award 2020 oleh Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MSI melalui *platform* virtual (*zoom meeting*)



7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian” dengan 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai 91,40% dan termasuk predikat “**berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,7	0,97	57,06
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	0	0,42	100
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.500.000	4.250.119	121,43
4.	Nilai Ekspor	US\$	36.600.000	55.796.578,44	152,45
5.	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	3,26	-0,03	-0,92
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,5	112,53	109,79
7.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	-34%	-34%	100
Rata-rata capaian					91,40

Sumber data: Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dari target 1,7 hari terealisasi 0,97 hari atau mencapai 57,06%. Lama tinggal wisatawan nusantara menurun sebesar 0,94 hari atau 49,21%, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya selama 1,91 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi sektor pariwisata.

b. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dari target 0 hari terealisasi 0,42 hari atau mencapai 100%. Pada tahun ini, lama tinggal wisatawan mancanegara mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Penurunan dimaksud sebesar 1,63 hari atau 79,51% dibandingkan realisasi tahun 2019 selama 2,05 hari.

Rumus penghitungan lama tinggal wisatawan adalah jumlah hari lama tinggal semua wisatawan dibagi jumlah tamu yang menginap dikalikan 100%. Data Lama Tinggal Wisatawan diperoleh dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berdasar jumlah rata-rata tamu menginap di hotel berbintang yang ada di Kabupaten Sleman.

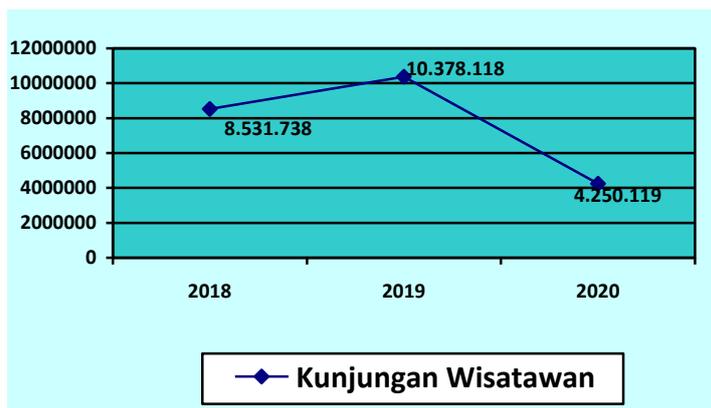


Spot sunset terindah ada di salah satu destinasi wisata Sleman, Candi Ijo

c. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 dari target 3.500.000 orang terealisasi 4.250.119 orang, atau mencapai 121,43%.

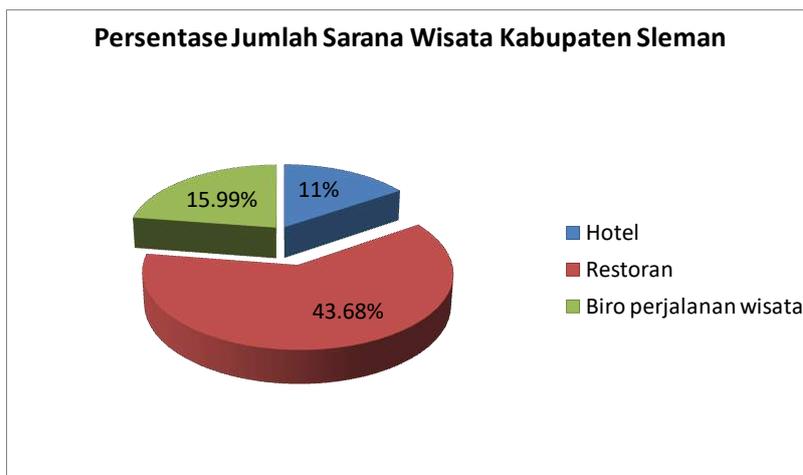
Grafik 3.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan



Jumlah kunjungan wisatawan menurun sebesar 6.127.999 orang atau 59,05% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 10.378.118 wisatawan. Penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada sektor pariwisata Kabupaten Sleman. Rasionalisasi target kunjungan wisatawan

telah dilakukan dari target semula sebesar 8.200.000 menjadi 3.500.000 orang wisatawan.

Dinas Pariwisata telah melakukan verifikasi *New Normal* pada usaha jasa pariwisata dan biro perjalanan wisata, tercatat sebanyak 151 usaha jasa pariwisata (UJP) telah diverifikasi dari 199 usaha jasa pariwisata yang mengajukan permohonan verifikasi. Verifikasi dimaksud merupakan salah satu upaya untuk memberikan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sleman.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja kepariwisataan diantaranya adalah:

- 1) Komitmen yang tinggi seluruh pemangku kepentingan pariwisata.
- 2) Dukungan pemerintah melalui kebijakan pada sektor pariwisata pada masa pandemi yang mendukung pemulihan ekonomi baik lokal maupun nasional. Kebijakan tersebut didasarkan dua isu strategis yaitu, *trust* wisatawan dan *safety* wisatawan guna menjamin *sustainability* keberlanjutan sektor wisata.
- 3) Partisipasi pihak swasta yang cukup tinggi dalam pengembangan pariwisata.
- 4) Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata. Hal ini terlihat dari banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terbentuk dan sampai dengan tahun 2020 pada terdapat 38 Pokdarwis. Tumbuhnya Pokdarwis juga mengindikasikan bahwa masyarakat Sleman semakin siap untuk mengelola pariwisata dan siap menerima kunjungan wisatawan.
- 5) Terklarifikasi dan terstandarisasinya “desa wisata” sebagai bentuk *Community Base Tourism* andalan destinasi wisata Kabupaten Sleman. Jumlah desa wisata sampai dengan tahun 2020 terdapat 11 desa wisata mandiri, 10 desa wisata berkembang, 20 desa wisata tumbuh, dan 12 desa wisata rintisan.

- 6) Pada masa Pandemi ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program BISA di beberapa destinasi dan meluncurkan Hibah Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dimana sebanyak 171 hotel, 69 Restoran dan 244 Kelompok Masyarakat yang bergerak dibidang Pariwisata, yang memenuhi kriteria dan persyaratan memperoleh anggaran Hibah Pariwisata tersebut.
- 7) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman berupa pembebasan pajak hotel dan pajak restoran pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2020, dan program padat karya bagi 10 (sepuluh) desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman.



Grojogan Watu Purbo, salah satu potensi wisata dengan penampakan air terjun bertingkat yang sedang viral karena memiliki spot-spot foto menarik dan *landscape* Gunungapi Merapi

Prestasi dan penghargaan di bidang kepariwisataan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan rekor “MURI” atas rekor penyelenggaraan Kesenian Jathilan Terlama Nonstop 56 Jam dari Museum Rekor Indonesia (MURI) tanggal 8 Maret 2020.



Wakil Bupati Sleman , Ibu Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes bersama Kepala Dinas Pariwisata, Dra. Hj. Sudarningsih, M.Si., menerima Penghargaan Rekormuri sebagai Pemrakarsa Pagelaran Jathilan secara Estafet Terlama pada acara Festival Merapi di Kaliurang tanggal 7 Maret 2020

2. Penghargaan rekor “MURI” atas rekor penyelenggaraan Festival 1000 Tumpeng dan pasukan Bregada Desa Condongcatur dari Museum Rekor Indonesia (MURI) tanggal 8 Maret 2020.



3. Penghargaan rekor “MURI” atas rekor penyelenggaraan Sleman Gummyak 309 Penari Wanara Turun Gunung dari Museum Rekor Indonesia (MURI) tanggal 8 Maret 2020.



Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo M.Si bersama Kepala Dinas Pariwisata, Dra. Hj. Sudarningsih, M.Si., menerima Penghargaan Rekormuri sebagai Pemrakarsa Pagelaran Tari oleh Pemeran Wanara Terbanyak dalam rangkaian acara Festival Kuliner, pada tanggal 7 Maret 2020 di Wisdom Park Kampus UGM

d. Nilai Ekspor

Realisasi ekspor pada tahun 2020 adalah sebesar US\$ 55.796.578,44 dari target US\$ 36.600.000 tercapai 152,45%. Realisasi ekspor tersebut meningkat sebesar US\$ 13.627.154,00 atau 32,32% dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai US\$ 42.169.424,44

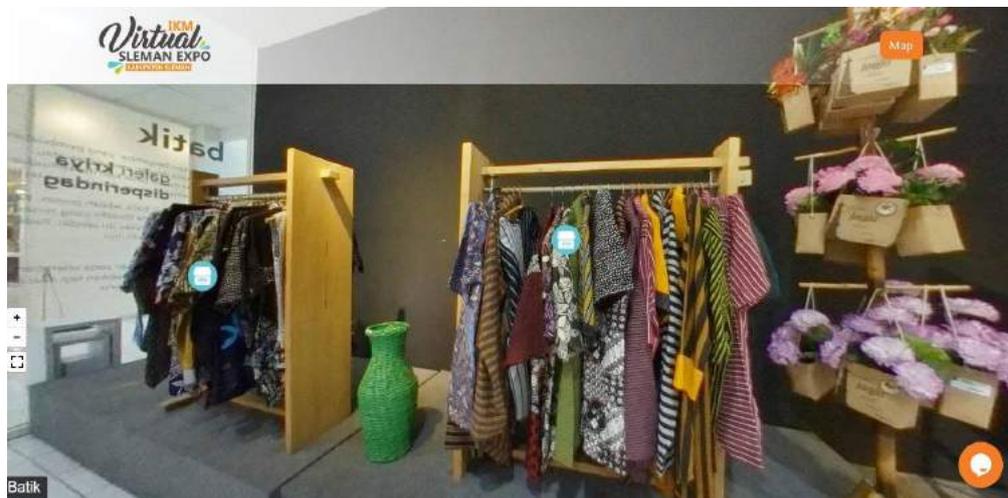
Tahun 2020, terjadi peningkatan nilai ekspor diikuti dengan peningkatan jumlah volume ekspor sebesar 98,85% dari nilai ekspor tahun 2019 sebesar 3.917.566,20 kg

menjadi 7.789.919,00 kg pada tahun 2020. Target ekspor tahun 2020 ini mengalami penyesuaian dengan perkiraan akan adanya penurunan nilai ekspor sebagai dampak dari COVID-19 dari angka target sebesar US\$ 41.750.000 menjadi US\$ 36.600.000.

Tingginya nilai ekspor pada tahun 2020 diantaranya disebabkan oleh adanya peningkatan ekspor di tahun 2019 yang penyelesaian kontraknya masih berlanjut sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Dampak adanya pandemi COVID-19 terhadap ekspor dimana beberapa eksportir mengalami penundaan bahkan pembatalan order baru mulai dirasakan pada bulan April 2020 dan mencapai titik terendahnya pada bulan Mei 2020. Penundaan pengiriman order oleh buyer diantaranya disebabkan oleh ditutupnya beberapa *port* di negara tujuan ekspor. Namun, mulai bulan Juni aktivitas ekspor sudah mulai kembali normal.

Peningkatan ekspor pada semester II tahun 2020 diantaranya disebabkan oleh telah normalnya aktivitas perdagangan antar negara dan adanya perusahaan ekspor melakukan perluasan perusahaan, yaitu perusahaan pakaian jadi tekstil (garment).

Pakaian jadi tekstil merupakan penyumbang terbesar (47%) kenaikan ekspor pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Ekspor pakaian jadi tekstil tahun 2020 meningkat 73% dibandingkan tahun 2019. Nilai ekspor perabotan medis juga meningkat cukup fantastis pada tahun 2020, naik 496% dibandingkan tahun 2019. Ekspor perabotan medis oleh PT MAK (Mega Andalan Kalasan)



Tampilan *virtual sleman expo*, salah satu sarana promosi dalam upaya membangkitkan potensi UKM Sleman pada masa pandemi COVID-19

Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor antara lain sebagai berikut:

- 1) Dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui terobosan-terobosan yang inovatif untuk membangkitkan promosi, pemasaran dan *trading* produk berorientasi ekspor pada masa pandemi COVID-19 antara lain melalui fasilitasi pemasaran melalui platform daring dan media social, *virtual exhibition*, *trade virtual bisnis matching* (mediasi *buyer/reseller* dengan *eksportir*).
- 2) Pengembangan potensi UKM agar bisa merambah pasar ekspor.

Grafik 3.13 Nilai Ekspor



Prestasi yang diperoleh sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghargaan Silver Winner of Indonesia Trade Award 2020 kategori *Government Creativity, Innovation, Entrepreneurship & Leadership (CIEL) Award* dari Markplus Inc.



Penghargaan Silver Winner of Trade Award 2020 Government Creativity, Innovation, Entrepreneurship & Leadership (CIEL) Award dari MarkPus Inc.

- 2) *Good Design Indonesia (GDI) 2020*, Jewelry Art Fabric Makerspace, atas nama Joglo Ayu Tenan (JAT) Makerspace dari Kementerian Perdagangan.



e. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri

Pada tahun 2020 indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri mengalami koreksi besaran target. Adanya pandemi COVID-19 berpengaruh pada nilai produksi industri sehingga diperkirakan turun ke titik minus.

Persentase peningkatan nilai produksi industri terealisasi 100% dari target -34% atau mencapai 100%. Penurunan tersebut diperoleh dari perbandingan nilai produksi tahun 2020 sebesar Rp2.458.187.243.790 dengan tahun 2019 sebesar Rp3.725.429.699.520.

Indikator ini diukur dengan cara menghitung pertumbuhan nilai produksi dari tahun sebelumnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{nilai produksi tahun } n - \text{nilai produksi tahun } n - 1)}{\text{nilai produksi tahun } n - 1} \times 100\%$$

Grafik 3.14 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri



Penurunan pencapaian kinerja sektor perindustrian dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, terjadi penurunan 6.000 unit usaha industri kecil, yang



membawa dampak pada penurunan nilai produksi industri \pm Rp18.000.000/tahun/unit usaha, sedangkan pada industri besar mengakibatkan penurunan kapasitas produksi sebesar 40%.

Prestasi yang berhasil diraih di sektor perindustrian adalah penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian atas nama Afif Saykur, Industri Kecil dan menengah (IKM) batik Sleman dari Kementerian Perindustrian.



f. Nilai Tukar Petani (NTP)

Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) 112,53 (data BPS per November 2020) dari target nilai 102,50 atau tercapai 109,79%. Realisasi NTP ini menurun sebesar 4,27 atau 3,65% dibandingkan angka tahun lalu yaitu sebesar 116,80. Namun realisasi tersebut lebih baik dibandingkan NTP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sampai dengan Nopember tahun 2020) yang mencapai 101,43 dan NTP Nasional sebesar 101,65

Perhitungan NTP di Kabupaten Sleman dilakukan pada beberapa subsektor pertanian, antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP umum merupakan gabungan dari NTP kelima subsektor tersebut.

Penghitungan NTP per subsektor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Komponen Perhitungan NTP per Subsektor Tahun 2019-2020

Komoditas	2019	2020
-----------	------	------



Komoditas		2019	2020
Tanaman Pangan	It	175.65	181,05
	Ib	145.90	152,29
	IKRT	147.29	154,14
	BPPBM	137.82	141,49
	NTP	120.39	118,91
Hortikultura	It	218.53	204,29
	Ib	162.26	178,29
	IKRT	168.84	187,94
	BPPBM	135.64	139,29
	NTP	134.80	114,94
Perkebunan Rakyat	It	192.30	204,10
	Ib	144.27	150,32
	IKRT	152.40	159,06
	BPPBM	131.49	136,57
	NTP	133.29	135,71
Peternakan	It	172.12	178,89
	Ib	196.56	203,79
	IKRT	194.73	202,41
	BPPBM	198.4	205,17
	NTP	87.57	87,79
Perikanan Budidaya	It	125.45	124,79
	Ib	137.76	139,65
	IKRT	149.74	152,49
	IBPPBM	122.57	123,36
	NTP	91.06	89,36
Gabungan	It	183.60	185,99
	Ib	159.40	167,66
	IKRT	162.20	171,47
	BPPBM	149.05	153,45
	NTP	116.80	112,53

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Sleman Tahun 2020

NTP merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, yaitu tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Hal tersebut jelas menunjukkan NTP adalah indeks perbandingan harga barang, bukan merupakan perbandingan nilai pendapatan dan pengeluaran petani yang sesungguhnya menjadi ukuran kesejahteraan.



Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun definisi NTP sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Perhitungan indeks yang diterima dilakukan dengan menggunakan harga produk yang dihasilkan oleh petani pada tingkat produsen (petani). Harga pada tahun 2012 dijadikan sebagai pembanding baku dengan nilai 100. Indeks harga yang diterima petani terdiri dari indeks subsektor tanaman bahan makanan (indeks kelompok padi dan kelompok palawija), indeks subsektor tanaman hortikultura (indeks kelompok sayur-sayuran, kelompok buah-buahan, dan kelompok tanaman obat), indeks subsektor tanaman perkebunan rakyat, indeks subsektor peternakan (indeks kelompok ternak besar, kelompok ternak kecil, dan ternak unggas) serta indeks subsektor budidaya perikanan air tawar. Indeks bayar adalah komponen yang digunakan untuk menghitung harga yang dibayar petani meliputi konsumsi rumah tangga indeks kelompok makanan, perumahan, pakaian, serta kelompok aneka barang dan jasa), sektor biaya produksi dan penambahan barang modal (indeks kelompok faktor produksi, kelompok upah, kelompok lainnya, dan penambahan barang modal).

Indeks yang diterima petani (It) subsektor tanaman pangan selama tahun 2020 secara umum mengalami fluktuasi, dari posisi 185,34 pada bulan Desember 2019 menjadi 174,33 di bulan Oktober dan Nopember 2020. Penurunan tersebut imbas dari penurunan harga gabah karena panen raya. Angka indeks yang diterima mulai bulan Januari 2020 terus mengalami penurunan sampai bulan April kemudian mengalami kenaikan sedikit pada bulan Mei, dan terus menurun sampai bulan Nopember 2020. Pada subsektor hortikultura indeks yang diterima petani (It) bulan Desember 2019 berada pada posisi awal 217,48 turun menjadi 181,57 pada bulan Nopember 2020. Posisi indeks yang diterima petani tertinggi pada bulan Januari 2020 sebesar 237,08. Salah satu pemicunya adalah naiknya komoditi sayur-sayuran, sedangkan nilai It terendah terjadi pada bulan Oktober 2020 sebesar 182,31.

NTP subsektor peternakan selama periode Desember 2019 sampai dengan Nopember 2020 tidak pernah berada diatas 100. NTP subsektor peternakan tertinggi terjadi di bulan Nopember 2020 sebesar 93,48 yang dipicu oleh kenaikan harga ternak besar dan kecil dan disisi lain pengeluaran petani tidak begitu besar, sedangkan terendah di bulan Januari 2020 sebesar 85,13 yang dipicu oleh penurunan harga ternak kecil seperti kambing dan domba. Selama kurun waktu satu tahun, indeks yang dibayar petani di subsektor ini didominasi oleh indeks biaya produksi terutama harga pakan ternak.



Perkembangan indeks yang diterima petani subsektor budidaya perikanan di Kabupaten Sleman sepanjang periode bulan Desember 2019 sampai dengan Nopember 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Posisi awal indeks harga yang diterima petani subsektor perikanan di bulan Desember 2019 tercatat sebesar 123,68 dan di bulan Nopember 2020 tercatat 121,36. Selama periode tersebut, indeks yang diterima petani subsektor budidaya perikanan cenderung berfluktuasi. Titik terendah terjadi pada bulan Oktober dan Nopember 2020 sebesar 121,36 sedangkan posisi tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020 sebesar 125,99. Indeks yang dibayar petani subsektor budidaya perikanan cenderung berfluktuasi, sedangkan indeks harga yang diterima petani cenderung naik, menyebabkan nilai tukar petani juga berfluktuasi dengan trend yang hampir sama. NTP subsektor perikanan tertinggi terjadi di bulan Juli 2020 sebesar 90,36 sedangkan terendah di bulan Nopember 2020 yaitu sebesar 86,46.

Pembangunan sektor pertanian harus memiliki strategi berdasarkan spesifikasi lokasi. Jaminan ketersediaan sarana dan prasarana dan jaminan harga pasar yang stabil merupakan dua hal yang sangat penting. Kendala pada sarana dan prasarana di tingkat produsen akan berakibat pada meningkatnya biaya produksi dan akan merugikan petani. Jaminan harga pasar yang stabil oleh pemerintah merupakan faktor penting dalam indikator keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari data tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga perlu dilihat dari data pengukur tingkat kesejahteraan petani.

g. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan.

Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari target sebesar 3,26%, terealisasi -0,03 % atau mencapai -0,29%. Penghitungan persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.26 Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Pertanian & Perkebunan			52,28
	a. Padi (ton)	246.114,51	246.860,00	0,30
	b. Jagung (ton)	35.375,26	37.474,00	5,93
	c. Kedelai (ton)	20,25	21,00	3,70
	d. Salak pondoh (kw)	5.000.500,00	5.000.500,00	0,00
	e. Jambu Dalhari (kw)	14.008,74	14.099,00	0,64
	f. Cabe (ton)	10.886,62	11.062,00	1,61
	g. Kelapa (kw)	56.400,72	62.646,36	11,07
	h. Tembakau rakyat (kw)	2.131,83	2.130,00	-0,09
	i. Tebu (kw)	1.867.332,80	1.867.332,80	0,00
	j. Kopi (kw)	588,80	760,10	29,09
2.	Peternakan			0,07
	a. Satuan ternak	88.946,00	88.509,00	-0,49
	b. Telur (kg)	12.726.350,00	12.800.840,00	0,59



No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Capaian (%)
	c. Susu sapi (kg)	3.944.690	3.943.549	-0,03
3.	Perikanan			-52,42
	a. Ikan konsumsi (ton)	67.850,00	54.552,11	-19,60
	b. Benih ikan (ekor)	1.320.500.000,00	1.325.743.000,00	0,40
	c. Ikan hias (ekor)	20.700.000,00	13.823.850,00	-33,22
Rata-rata peningkatan				-0,03

Sumber data: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Pencapaian produksi pertanian dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komoditas pertanian

- 1) Produksi padi mengalami kenaikan 0,30%, dari 246.114,51 ton pada tahun 2019 menjadi 246.860,00 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan luas panen karena air cukup tersedia.
- 2) Produksi jagung mengalami peningkatan dari 35.375,26 ton pada tahun 2019 menjadi 37.474,00 ton di tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 5,93%. Hal ini diantaranya disebabkan karena peningkatan produktivitas dan luas panen jagung yang meningkat.



Gerakan tanam (gertam) padi untuk menjaga ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19

- 3) Produksi kedelai terjadi kenaikan dari semula 20,25 ton pada tahun 2019 menjadi 21 ton pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 3,70%.



Gerakan pengendalian ulat grayak pada tanaman jagung

- 4) Produksi salak pondoh tahun 2020 relatif sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5.000.500 kwintal.



Penandatanganan MoU Ekspor Buah Salak Segar

- 5) Produksi Jambu Dalhari merupakan komoditas unggulan dari wilayah Kecamatan Berbah dan Prambanan. Produksi Jambu Dalhari mengalami peningkatan sebesar 0,64%, dari 14.008,74 kwintal pada tahun 2019 menjadi 14.099,00 kwintal pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tambahan tanaman yang menghasilkan di tahun 2020 ini. Tanaman menghasilkan di tahun 2019 sebanyak 7.092 batang sedangkan di tahun 2020 menjadi 13.667 batang.
- 6) Produksi cabe 11.062,00 ton pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 1,61% dari tahun 2019 yang menghasilkan 10.886,62 ton. Keberhasilan ini didukung dengan bantuan benih seluas 100 ha serta keberhasilan penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman cabe.



- 7) Produksi kelapa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,07% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Sleman mampu berproduksi sebesar 56.400,72 kwintal, sedangkan di tahun 2020 menjadi 62.646,36 kw. Hal ini disebabkan karena adanya peremajaan tanaman kelapa dan sudah mulai menghasilkan.
- 8) Produksi tembakau rakyat sebesar 2.130,00 kwintal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berproduksi sebesar 2.131,83 kwintal atau mengalami penurunan sebesar 0,09 % karena disebabkan musim penghujan dan musim kemarau yang tepat waktu sehingga banyak petani yang beralih menanam tanaman selain tembakau.
- 9) Produksi tebu tahun 2020 sebesar 1.867.332,80 kwintal atau sama dengan produksi sebelumnya.
- 10) Produksi kopi mengalami kenaikan dari 588,80 kwintal di tahun 2019 menjadi 760,10 kwintal pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 29,09%. Produksi yang meningkat ini disebabkan karena perawatan yang intensif pada tanaman kopi, bantuan pupuk organik dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman melalui Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Terpadu.

b) Komoditas peternakan

Produksi hasil peternakan meningkat sebesar 0,07 % atau tercapai kinerja 25,27% dari target sebesar 0,277 %. Hal ini disebabkan karena:

1. Produksi susu sapi dari 3.944.690 liter menjadi 3.943.549 liter, atau terjadi penurunan sebesar 0,03 % di tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi adalah:
 - a. Kualitas bibit ternak meningkat dengan adanya kegiatan uji zuriat yang dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Baturaden bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Dalam uji zuriat tersebut ternak-ternak dengan produksi susu yang tinggi tetap dipertahankan agar tetap berada pada peternak di Kabupaten Sleman.
 - b. Peternak sudah mengenal teknologi pengolahan pakan yang baik tanpa mengurangi kualitas nutrisi pakan, sehingga bisa meningkatkan produksi susu.
 - c. Semakin berkembangnya koperasi susu yang mewadahi peternak sapi perah dalam penyediaan pakan terutama konsentrat, sehingga kontinuitas pakan dengan kualitas yang baik terjaga dan produksi susu juga terjaga.
 - d. Peningkatan produksi susu kambing dengan adanya sentra pengolahan susu kambing di kecamatan Turi.

- e. Harga susu di Koperasi Sarana Makmur relatif baik, sehingga bisa memacu peternak untuk meningkatkan produksinya.
 2. Produksi telur meningkat dari 12.726.350,00 kg menjadi 12.800.840,00 kg atau terjadi peningkatan produksi sebesar 0,59 %. Faktor yang mempengaruhi adalah :
 - a. Adanya peningkatan populasi ternak ayam petelur sebesar 7,29 %, yaitu dari 1.393.089 ekor di tahun 2019 menjadi 1.494.688 pada tahun 2020.
 - b. Beberapa pengusaha kembali menambah kapasitas usaha, meskipun dari efisiensi biaya produksi lebih menguntungkan mendatangkan telur dari luar daerah.
 - c. Meningkatnya diversifikasi pemenuhan protein hewani masyarakat dari konsumsi telur sehingga memacu peternak untuk budidaya ayam petelur.
 3. Jumlah satuan ternak yang semula 88.946 menjadi 88.509 di tahun 2020, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,49%. Faktor yang mempengaruhi adalah terjadinya penurunan populasi sapi potong, sapi perah, babi, kerbau dan burung puyuh.
- c) Komoditas perikanan

Produksi perikanan mengalami penurunan sebesar -17,47 di tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 9%. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- 1) Produksi ikan konsumsi dari 67.850,00 ton menjadi 54.552,11 ton tahun 2020, atau menurun 19,60%. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Akhir tahun 2019 petani ikan melakukan tebar benih ikan dengan harapan awal tahun 2020 sudah berproduksi dan bisa panen serta tebar ulang. Adanya pandemi mengakibatkan harga ikan jatuh, petani lebih memilih tidak menjual ikannya dan tidak terjadi perguliran produksi ikan konsumsi karena serapan pasar sangat rendah.



Panen ikan nila dengan sistem budidaya dengan kincir



- 2) Peningkatan benih ikan yang tidak signifikan dari 1.320.500.000 ekor di tahun 2019 naik sebesar 0,40% menjadi 1.325.743.000 ekor. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan benih ikan tidak setinggi tahun sebelumnya dan cenderung hanya sebagai pengisi kolam saja.
- 3) Penurunan ikan hias dari 20.700.000 ekor menjadi 13.823.850 ekor pada tahun 2020 atau turun sebesar 33,22 %. Hal ini disebabkan selama pandemi COVID-19 tahun 2020, masyarakat lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan makan dan kesehatan.

Secara umum produksi pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami kenaikan, karena kebutuhan masyarakat akan bahan pokok cukup tinggi. Pada masa pandemi COVID-19, komoditas tanaman pangan khususnya beras dan komoditas hortikultura khususnya sayur mayur banyak digunakan sebagai donasi untuk masyarakat.

Komoditas peternakan dan perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar pada penurunan produksi pertanian dan perikanan secara umum. Kedua sektor tersebut sangat terpengaruh adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Kebutuhan akan produk peternakan dan perikanan sempat terganggu pada awal pandemi karena banyak hotel, restoran dan warung-warung yang menyerap produksi daging, telur dan ikan banyak yang tutup.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja bidang pertanian adalah:

- 1) Koordinasi yang sistematis dan kontinyu baik di level pembuat kebijakan, unit kerja, petani dan stake holder lain.
- 2) Adanya inovasi teknologi pertanian, pangan dan perikanan yang diterapkan oleh petani .
- 3) Fasilitasi bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan yang disalurkan kepada petani, terutama yang merupakan fasilitasi dari pemerintah pusat yang tidak masuk dalam rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid.
- 4) Kualitas sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pendampingan dan pelayanan ke kelompok tani dan masyarakat.
- 5) Kesadaran petani yang semakin tinggi untuk memproduksi hasil pertanian yang bermutu.
- 6) Masa Pandemi COVID-19, menghambat proses pemasaran, khususnya produk perikanan dan peternakan, sehingga perguliran usaha budidaya menjadi lebih lambat dan produksi menurun
- 7) Adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat sehingga berimbas pada produktivitas pertanian



- 8) Tingginya harga pakan ternak, pakan ikan dan obat-obatan ternak berdampak pada tingginya biaya produksi sektor peternakan dan perikanan
- 9) Masih rendahnya harga komoditas pertanian pada saat panen raya seperti salak pondoh.
- 10) Harga produk perikanan dan peternakan sempat anjlok terutama di awal pandemi (Maret-Juni 2020)

Prestasi yang diperoleh di bidang pertanian adalah penghargaan Penyuluh Pertanian Teladan tingkat nasional atas nama Janu Riyanto dari Kementerian Pertanian.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,86	1,91	0,97	2,02
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,04	2,05	0,42	2,04
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	8.531.738	10.378.118	4.250.119	5.149.000
4.	Nilai Ekspor	US\$	41.963.299,13	42.169.424,44	55.796.578,44	42.650.000,00
5.	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	%	6,62*)	5,33*)	-0,03	3,26
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	119,02*)	116,80	112,53	112,70
7.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	3,05	3,08	-34	3,2

Sumber data: Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tahun 2020

Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.28 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.699.064.650	1.650.111.448	97,12
2	Program pengembangan desa wisata	559.923.750	559.909.750	100
3	Program pengembangan destinasi wisata	2.988.748.750	2.401.494.383	80,35
4	Program pengembangan kemitraan	21.071.761.073	20.370.405.628	96,67
5	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	290.281.250	287.936.150	99,19
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.571.279.300	878.230.450	34,16
7	Program peningkatan produksi hasil	241.535.250	238.647.350	98,80



	peternakan			
8	Program pengembangan budidaya perikanan	871.034.800	863.309.000	99,11
9	Program peningkatan kesejahteraan petani	505.322.530	487.157.730	96,41
10	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	650.719.600	645.528.000	99,20
11	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.140.608.500	1.008.710.300	88,44
12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.118.799.775	1.099.594.175	98,28
13	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	92.631.500	91.445.000	98,72
14	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	93.682.500	93.408.000	99,71
15	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	350.320.000	349.070.000	99,64
16	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	170.326.000	170.238.500	99,95
17	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	4.107.416.200	3.869.164.800	94,20
18	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	236.588.800	232.566.500	98,30
19	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	36.456.450	36.456.450	100,00
20	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	90.329.000	89.454.000	99,03
21	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	70.015.000	69.252.500	98,91
22	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	177.179.000	173.393.500	97,86
23	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.534.398.850	1.321.535.169	86,13

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp36.987.018.783 dari anggaran sebesar Rp40.668.422.528 atau 90,95%. Realisasi keuangan sebesar 90,95% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 91,40%, maka terjadi ketidakefisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi realisasi anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang hanya 34,16% dengan capaian realisasi fisik sebesar -0,92%, khususnya pada sektor perikanan yang sangat rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,13%.



8. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Meningkatnya Kesempatan Kerja”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” mencapai 96,06 % dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.29 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34	6,59	96,06

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dengan membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020 jumlah penganggur di Kabupaten Sleman sebanyak 41.555 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 630.583 orang, sehingga diperoleh TPT sebesar 6,59%. TPT tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 3,69% atau terjadi kenaikan sebesar 2,9%. Angka realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 2,02% dibandingkan TPT DIY sebesar 4,57% dan lebih rendah 0,48% dibandingkan TPT nasional sebesar 7,07% (data BPS per Agustus 2020).

Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah penganggur meningkat tajam. Jumlah penganggur tahun 2019 sebesar 23.234 meningkat menjadi sebesar 41.555 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penganggur dipengaruhi oleh:

- Banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman yang melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya. Data yang tercatat dan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman per Agustus 2020 adalah pekerja di PHK sebanyak 499 orang dan pekerja dirumahkan sebanyak 585 orang.
- Pekerja sektor informal juga banyak yang kehilangan pekerjaan, karena usahanya tutup, misal kantin sekolah, *cafe*, rumah makan, penjahit seragam, salon, *catering*, dll.
- Menurunnya jumlah lowongan kerja. Tahun 2019 jumlah lowongan kerja sebanyak 4.872, sangat drastis dibanding jumlah lowongan kerja tahun 2020 sebanyak 737.
- Lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan tidak terserap di dunia kerja juga menambah jumlah penganggur.
- Adanya pemberhentian penempatan Tenaga Kerja Antar Negara sementara waktu sampai kondisi membaik. Sedangkan penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah baru dibuka kembali bulan Desember 2020. Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,76	3,69	6,59	6,30

Grafik 3.15 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.31 Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.256.533.900	2.162.577.500	95,84
2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	340.787.880	333.414.726	97,84
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.028.663.000	2.900.013.947	95,75
4	Program Transmigrasi Regional	144.989.800	79.958.100	55,15

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 5.475.964.273 dari total anggaran sebesar 5.770.974.580 atau 94,89%. Realisasi keuangan sebesar 94,89% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,06%

maka terjadi ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan pengangguran adalah:

1) Penyelenggaraan pelatihan kerja:

- a. UPTD Balai Latihan Kerja melaksanakan pelatihan sebanyak 26 paket pelatihan dengan peserta sebanyak 431 orang. Selain itu UPTD Balai Latihan Kerja melakukan pelatihan menjahit baju hazmat dengan peserta 95 orang dan menghasilkan 3.832 baju hazmat yang diserahkan kepada Bupati



Penyerahan APD hasil pelatihan dan Padat Karya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Mei 2020

Sleman selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sleman untuk kemudian disalurkan kepada Dinas Kesehatan sebanyak 3.800 buah, Puskesmas Pakem 20 buah, Puskesmas Turi 10 buah dan Relawan 2 buah.

- b. Kerjasama pelatihan kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta sebanyak 6 paket atau 120 orang, dan pemagangan ke perusahaan sebanyak 4 paket atau 40 orang. Selain itu kerjasama dengan LPK berupa pelatihan menjahit masker sebanyak 3 paket atau 48 orang. Pelatihan tersebut mampu memproduksi 6.000 masker yang dibagikan kepada Serikat Pekerja Nasional (SPN) 800 buah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 200 buah dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 5.000 buah.



Uji kompetensi instalasi penerangan



Pelatihan kejuruan internet marketing

- 2) Pelaksanaan Padat Karya sebanyak 17 lokasi dan 5 paket dengan memberdayakan 954 orang, dengan rincian:

- a. pembuatan kandang ternak sapi di Padukuhan Marangan, Bokoharjo, Prambanan;
- b. pembuatan saluran irigasi di Padukuhan Grajegan, Margokaton, Seyegan;
- c. pembuatan saluran irigasi di Nglengking, Sendangrejo, Minggir;
- d. pembuatan talud di Padukuhan Gunungsari, Candibinangun, Pakem;
- e. pembuatan kolam ikan air tawar di Padukuhan Kendal, Bangunkerto, Turi;
- f. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Menulis, Sumpersari, Moyudan;
- g. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Kronggahan I, Trihanggo, Gamping;
- h. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Jomboran, Sendangagung, Minggir;
- i. pembuatan talud di Padukuhan Bandan, Sendangsari, Minggir;
- j. pembuatan saluran air di Padukuhan Mburikan. Sumberadi, Mlati;
- k. pembuatan talud di Padukuhan Balangan, Sendangrejo, Minggir;
- l. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Klayar, Sendangtirta, Berbah;
- m. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Mangsel 8, Margomulyo, Seyegan;
- n. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Baturan Kidul, Trihanggo, Gamping;
- o. pembuatan talud di Padukuhan Kalongan, Tlogoadi, Mlati;
- p. pembuatan corblok jalan di Padukuhan Serut, Madurejo, Prambanan;
- q. pembuatan drainase di Padukuhan Nasri/Lapangan Desa Sumpersari, Moyudan;
- r. pemberdayaan masyarakat melalui jahit masker melibatkan 100 orang.



Strategi program penempatan kesempatan kerja melalui kegiatan Padat Karya



Launching Padat Karya oleh Bupati Sleman diikuti oleh 17 Padukuhan secara online di Smart Room Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Desember 2020



- 3) Tahun 2020 ini Kabupaten Sleman tidak memberangkatkan transmigran, karena adanya keputusan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk tidak melakukan penempatan transmigrasi. terkait pandemi COVID-19.
- 4) Pelayanan informasi lowongan kerja melalui:
 - a. Bursa kerja melalui sistem berbasis aplikasi karirhub dengan 3.137 pengguna.
 - b. Layanan jemput bola dengan Sistem Pelayanan Informasi Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) pada 8 lokasi/320 orang.
 - c. Akses informasi lowongan kerja melalui *whatsapp* AYO KERJA SEMBADA untuk perangkat 17 kecamatan dan 86 desa.
 - d. Informasi kebutuhan tenaga kerja dari grup *whatsapp* divisi pengembangan sumber daya manusia perusahaan se-Kabupaten Sleman.
- 5) Penempatan tenaga kerja sebanyak 765 orang terdiri dari:
 - a. penempatan AKL (Antar Kerja Lokal) sebanyak 723 orang;
 - b. penempatan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) sebanyak 16 orang; dan
 - c. penempatan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) sebanyak 26 orang.

Penempatan tenaga tersebut melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- 6) Penempatan mandiri melalui monitoring lulusan pelatihan di BLK sebanyak 323 orang terdiri dari:
 - a. 1 orang bekerja di instansi pemerintah sebagai tenaga non PNS di desa Minomartani;
 - b. 147 orang bekerja di swasta; dan
 - c. 175 orang usaha mandiri.
- 7) Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi Hubungan Industrial. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja berupaya menjaga dan meningkatkan penguatan kemitraan dengan pengusaha dan pekerja melalui koordinasi lembaga Tripartit. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja secara koordinatif dengan Perangkat Daerah/Lembaga terkait dalam rangka menjaga kondusivitas Hubungan Industrial adalah:
 - a. Pemberian BST (Bantuan Sosial Tunai) kepada 54 pekerja ter-PHK. Pandemi Covid-19 memberikan dampak di sektor ekonomi berupa menurunnya pendapatan/omzet perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa harus melakukan kebijakan merumahkan pekerja dan melakukan PHK. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan instansi terkait merumuskan solusi untuk meringankan beban pekerja ter-PHK berupa pemberian BST (Bantuan Sosial Tunai).



Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 54 pekerja ter-PHK

- b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tepat waktu dengan menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) dan 18 Anjuran. Pandemi *COVID-19* berdampak pada meningkatnya jumlah aduan dan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah kasus tahun 2020 sebanyak 39 kasus meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 25 kasus.
- c. Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman dalam merumuskan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga ditetapkan oleh Gubernur DIY sebagai UMK Tahun 2021 yang bisa diterima oleh semua pihak.
- d. Pembuatan video layanan masyarakat dan sosialisasi surat edaran Bupati Sleman tentang penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dan tempat usaha di wilayah Kabupaten Sleman. Tujuannya agar pelaku usaha disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tercapai.

Prestasi yang diperoleh dalam bidang ketenagakerjaan adalah penghargaan Nominine Anugerah Bangsa Buatan Indonesia atas nama Lovina dari Anugerah Bangsa Buatan Indonesia



9. Analisis Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 105,49% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 9 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	78,18	85,73	109,66
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	81,18 dan 59,00	82,61 dan 59,51	101,76 dan 100,86
Rata-rata capaian					105,49

Sumber data: Bappeda, DPUPKP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas

Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas dihitung dari jumlah pasar, obyek wisata, irigasi, dan embung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berada dalam kondisi baik. Bangunan pasar kabupaten kondisi baik berjumlah 37 pasar atau 86% dari total pasar 43 buah pasar (terdiri dari 37 pasar dan 6 sarana usaha perdagangan milik Pemerintah Kabupaten Sleman)



Penataan los Pasar Gentan pasca revitalisasi menggunakan model pasar modern

Obyek wisata dalam kondisi baik berjumlah 3 dari total 3 obyek wisata (meliputi Tlogo Putri, Gandu Pandang, dan pintu retribusi Kaliurang). Irigasi dalam kondisi baik seluas 9.151,00 ha dari total luas daerah irigasi 16.090,88 ha. Embung dalam kondisi baik sejumlah 26 buah dari total jumlah embung 26 buah. Dengan demikian angka realisasi prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas merupakan rata-rata dari 4 (empat) angka persentase, yaitu persentase dari bangunan pasar kabupaten kondisi baik, persentase dari obyek wisata kondisi baik, persentase dari irigasi kondisi baik, dan persentase dari embung kondisi baik.

b. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap sebesar 82,61% dari target 81,18%, dengan capaian 101,76%. Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dihitung dari (1) jalan kondisi baik 460,30 km dan kondisi sedang 155,85 km dari total panjang jalan 699,50 km; dan (2) jembatan kondisi baik 113 buah, jembatan kondisi sedang 162 buah, dan kondisi baru 22 buah dari total jumlah jembatan 385 buah.



Peningkatan Jalan Ruas Kaliduren - Sumber
(Kapanewon Moyudan)



Peningkatan Jembatan Ngipik
(Kapanewon Pakem)

Kondisi jalan mantap diperoleh hasil 88,08% dari jumlah panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang dibagi total panjang jalan. Sedangkan kondisi jembatan mantap diperoleh 77,14% dari jumlah jembatan kondisi baik, sedang, dan baru dibagi total jumlah jembatan. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap adalah rata-rata kondisi jalan mantap ditambah kondisi jembatan mantap.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai sebesar 59,51% diperoleh dari persentase prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan kondisi baik yang dibagi jumlah seluruhnya.



Persentase tersebut dihitung dari 27.805 sarana prasarana kondisi baik (terdiri atas 2 lokasi terminal, 1.393 unit rambu lalu lintas, 9 unit APILL, marka jalan 110 m², 1.930 m² pagar pengaman jalan, dan 24.361 buah LPJU jalan kabupaten), dibagi jumlah total sarana prasana yang ada yaitu 46.726 (terdiri atas 4 lokasi terminal, 1.942 unit rambu lalu lintas, 9 unit APILL, marka jalan 15.773 m², 1.930 m² pagar pengaman jalan, dan 27.068 buah LPJU jalan kabupaten).



Pemeliharaan LPJU sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat



Pemasangan pita penggaduh (marka) di jalan Damai



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	76,75	79,14	85,73	80,23
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	82,45 dan 94,50	82,61 dan 82,32	82,61 dan 59,51	82,55 dan 95,00

Grafik 3.16 Sarana Prasarana Perekonomian



Sasaran meningkatnya prasarana dan sarana perkonomian tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.34 Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	4.625.733.005	3.807.421.622	82,31
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa	18.241.188.800	17.731.690.580	97,21



	dan Jaringan Pengairan Lainnya			
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.901.234.850	1.839.440.789	96,75
4	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.702.530.000	1.688.858.000	99,20
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.407.943.730	4.761.555.550	88,05
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.443.353.900	16.916.521.056	96,98
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.756.576.800	6.673.155.750	98,77
8	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	167.868.600	149.679.700	89,16
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.488.115.100	2.423.272.907	97,39
10	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	597.135.000	596.587.233	99,91
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	346.455.000	345.949.500	99,85
12	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.276.356.375	4.199.314.075	98,20
13	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.044.434.300	1.043.896.800	99,95
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.250.071.500	1.211.115.060	96,88
15	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	740.577.650	690.961.062	93,30
16	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.160.480.700	950.233.000	81,88
17	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.126.752.450	1.026.652.570	91,12
18	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	279.322.700	273.052.732	97,76

Penyesuaian target dilakukan pada indikator “prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai, dari target semula 90% menjadi 59%. Adanya pemangkasan anggaran akibat dampak COVID-19, realisasi indikator ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) banyak LPJU yang terpasang mengalami penurunan kondisi, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas untuk mencakup perbaikan seluruh wilayah Sleman
- 2) banyak marka dalam kondisi jelek karena belum dicat ulang atau diperbaiki.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp66.329.347.986 dari anggaran sebesar Rp69.556.130.460,00 atau 95,36%. Realisasi keuangan sebesar 95,36% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 105,49%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- 1) Pasar kondisi baik dapat tercapai dengan adanya dukungan pendanaan baik dari APBD Kabupaten Sleman dan Dana APBN untuk rehab pasar tradisional dari Kementerian Perdagangan.
- 2) Adanya komitmen Kabupaten Sleman yang tinggi untuk melakukan standarisasi nasional pasar-pasar tradisional Sleman baik dari sisi fasilitas maupun bangunan pasar, sehingga pasar kondisi baik dapat tercapai.

- 3) Terlaksananya pembangunan/peningkatan jaringan irigasi sebanyak 50 Daerah Irigasi (DI). Terlaksananya rehabilitasi bendung dan saluran sebanyak 49 DI serta rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3 DI. Terpeliharanya jaringan irigasi di 41 DI, saluran irigasi sepanjang 150 kilometer, terawatnya pintu irigasi sebanyak 39 buah, tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa di 12 lokasi.



Peningkatan Daerah irigasi (DI) Kules
Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati

Tersusunnya dokumen perencanaan teknis sebanyak 16 paket, *updating* data prasarana irigasi sebanyak 1 dokumen di 385 Jaringan Irigasi dan 42 Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Terbentuknya Sekretariat Komisi Irigasi (Komir), terlaksananya pemberdayaan 3 kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan lomba GP3A, dan diterbitkannya perizinan bidang irigasi sebanyak 235 rekomendasi

- 4) Terlaksananya pemeliharaan mata air sebanyak 3 lokasi. Terlaksananya peringatan Hari Air Dunia (HAD) dan Gerakan Irigasi Bersih (GIB). Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik di 17 lokasi dan terdatanya sungai-sungai (lebar, dalam, debit, panjang) pada 47 lokasi sungai. Pemeliharaan embung pada 14 lokasi dan mata air pada 28 lokasi.



Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) / Bendung Kacung
Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman



Peringatan Hari Air Dunia di Embung Kaliaji
Desa Wonokerto, Kecamatan Turi



Pemeliharaan Sungai Jetis
Desa Margokatun, Kecamatan Seyegan

- 1) Tersedianya infrastruktur kawasan perdesaan potensial berupa rencana tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Koridor Perekonomian, KSCT Kawasan Perkotaan Yogyakarta, KSCT Kawasan Wisata Pertanian Sleman Barat, KSCT Kawasan Wisata Agropolitan, KSCT Kawasan Minapolitan, dan KSCT Kawasan Pendukung KSN Prambanan, masing-masing 1 dokumen.
- 2) Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 1 km meliputi 1 ruas jalan kabupaten yakni Jalan Kaliduren - Sumber 1 km. Terlaksananya peningkatan 2 jembatan yakni Jembatan Ngipik dan Jembatan Puren. Tersusunnya dokumen perencanaan teknis jembatan sebanyak 2 DED Jembatan.



Pemeliharaan Jalan Merbabu (Kapanewon Sleman)

- 3) Terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 1,7 km meliputi 3 ruas jalan kabupaten yakni Jalan KRT Pringgodingrat 0,9 km, Jalan Merbabu 0,4 km, dan Jalan Turgo 0,4 km. Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 330 km, pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 25 buah, dan pemeliharaan rutin gorong-gorong sebanyak 30 buah.
- 4) Tersusunnya perencanaan saluran drainase sebanyak 7 DED Drainase. Terbangunnya saluran drainase 8 Paket. Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran drainase sepanjang 30.000 m.



Pembangunan Drainase Ruas Jalan Turgenen - Tegal Donon
(Kapanewon Moyudan)

- 5) Tersusunnya pemutakhiran data kondisi jalan sebanyak 1 dokumen dan pelayanan perizinan ruang milik jalan (rumija) sebanyak 1 dokumen.



- 6) Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium sebanyak 48 unit. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan alat berat sebanyak 40 unit dan pengadaan suku cadang mesin gilas sebanyak 1 paket.
- 7) Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi sebanyak 210 orang. Terlaksananya pelayanan verifikasi proposal BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Desa sesuai standar dari 86 desa. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan Kabupaten Sleman sebanyak 50 perusahaan dan survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAKI sebanyak 1 kali. Terlaksananya penerbitan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 125 izin.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti: fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat. Pemasangan LPJU baru diruas jalan kabupaten 240 titik, pemasangan kWh meter Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 1 lokasi, serta cermin cembung 201 unit. Fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat. Jumlah LPJU meningkat dari 26.828 buah menjadi 27.068 buah.



10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Menurunnya Kemiskinan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Kemiskinan” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase KK Miskin” dan “Persentase Penduduk Miskin” mencapai 96,97% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 10 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.35 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase KK Miskin	%	8,50	8,79	96,59
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	7,91	8,12	97,35
Rata-rata Capaian					96,97

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2020

Persentase KK Miskin di tahun 2020 sebesar 8,79% dihitung dari jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 32.888 KK dibagi jumlah KK se-Kabupaten Sleman 374.148 KK. Data KK miskin bersumber dari Dinas Sosial dan data KK berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester I tahun 2020 sebanyak 374.148 KK. Persentase KK Miskin di tahun 2020 sebesar 8,79% naik 0,71% dibandingkan kondisi tahun lalu sebesar 8,08%. Kenaikan angka tersebut salah satunya diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19.

Persentase Penduduk Miskin tahun 2020 sebesar 8,12% dari target 7,91%. Angka tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,71%. Angka Realisasi tersebut lebih rendah 4,16 poin dibandingkan Persentase Penduduk Miskin DIY sebesar 12,28% dan lebih rendah 2,07 poin dibandingkan Persentase Penduduk Miskin nasional sebesar 10,19% (data BPS per September 2020).

Merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi yang berimbas kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Sleman. Guna menjaga kemampuan daya beli tersebut dan membantu kebutuhan dasar penduduk terdampak COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial mengambil kebijakan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dana APBD Kabupaten Sleman. Pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan bisa mengurangi dampak sosial dan menekan persentase miskin di Kabupaten Sleman.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.36 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Persentase KK Miskin	%	8,77	8,08	8,79	8,30
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	-	7,41	8,12	7,71

Grafik 3.17 Persentase KK Miskin



Sasaran “Menurunnya Kemiskinan” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.37 Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.616.946.950,00	1.397.169.950,00	86,41
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.811.253.750,00	1.604.112.750,00	88,56
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	58.190.000,00	41.510.000,00	71,34
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	389.846.250,00	388.392.150,00	99,63
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	18.225.000,00	18.225.000,00	100



6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.491.297.700	2.460.166.200	98,75
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.304.127.250	1.842.765.600	79,98
8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	116.869.000	113.057.000	96,74
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.017.094.000	943.787.800	92,79
10	Program Pengembangan Perumahan	6.412.148.000	5.782.078.262	90,17
11	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	57.325.000	52.166.750	91,00
12	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5.505.249.000	5.459.908.000	99,18

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp20.103.339.462,00 dari anggaran sebesar Rp21.789.571.900,00 atau 89,94%. Realisasi keuangan sebesar 92,22% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,97%, maka terjadi ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran “Menurunnya Kemiskinan” adalah:

- 1) Bantuan sosial bagi:
 - a. Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 74.920 KPM berupa Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Program Sembako)



Penyerahan bantuan pangan non tunai, salah satu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin



- b. Penyandang disabilitas berat sejumlah 225 orang berupa uang jaminan sosial
 - c. Bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lanjut usia rentan sosial ekonomi sebanyak 1000 orang berupa uang.
- 2) Jaring Pengaman Sosial untuk keluarga miskin dan atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman berupa bantuan keuangan tak terencana untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sosial sebanyak 3.452 pemohon.



Pemberian Jaminan Pengaman Sosial keluarga miskin dan atau rentan miskin

- 3) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Sleman



Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Sleman guna penguatan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19

- 4) Pelayanan sosial melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) kepada 14.657 orang.
- 5) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang difabel sebanyak 30 orang, dengan materi pelatihan tata boga di Kapanewon Gamping, Seyegan, dan Mlati.



Pelatihan Boga bagi Penyandang Disabilitas

- 6) Pemberian bantuan modal untuk 10 kelompok PRSE.
- 7) Pemberian bantuan modal untuk 30 kelompok KUBE.
- 8) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 42.667 KPM.



Pemberian Jaring Pengaman Sosial bidang Sosial alat bantu kursi roda kepada penyandang disabilitas



Pelayanan Sistem Layanan Terpadu Dinas Sosial
Kabupaten Sleman



Pembagian buku tabungan bantuan sosial bagi
lansia rentan sosial ekonomi



11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana” dengan 2 (dua) indikator kinerja rata-rata mencapai 100% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana				
	- Desa	Jumlah	62	62	100
	- Satuan pendidikan aman bencana	Jumlah	72	72	100
Rata-rata Capaian					100

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

Jumlah Lembaga Tangguh Bencana, meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) terealisasi sebanyak 62 desa, atau mencapai 100% dari target 62 desa, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) terealisasi 72 sekolah dari target yang ditetapkan sebanyak 72 sekolah, sehingga tercapai 100%. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

Target indikator kinerja Jumlah Lembaga Tangguh Bencana tersebut di atas pada tahun 2020 mengalami revisi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Revisi dilakukan dikarenakan prioritas penanganan pandemi COVID-19 sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan rasionalisasi anggaran.

Penentuan indikator lembaga tangguh bencana meliputi Destana dan SPAB ini didasarkan pada perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari penanganan bencana menuju pengelolaan bencana. Paradigma Pengelolaan Bencana memfokuskan pada kegiatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) melalui mitigasi fisik dan non fisik, dan kesiapsiagaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana. Berbeda dengan paradigma Penanganan Bencana yang hanya menitikberatkan pada penanganan bencana saat darurat melalui pembentukan Tim Teknis BPBD pada masa penanganan darurat tanpa ada Status Tanggap Darurat, dan penanganan bencana saat ada Status Tanggap Darurat melalui pembentukan Komando Tanggap Darurat pada masa Status Tanggap Darurat.

Penguatan kelembagaan tangguh bencana di masyarakat dilakukan dengan membentuk Destana dan SPAB. Dalam proses pembentukan lembaga tangguh bencana, tahapan yang dilakukan adalah melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap

potensi bencana, fasilitasi pembuatan peta resiko, peta ancaman bencana, dan skenario penanggulangan bencana di tingkat desa dan sekolah, serta gladi lapang sebagai gladi paripurna dalam menghadapi kejadian bencana.



Kegiatan Wajib Latih masyarakat perumpud desa Purwobinangan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.39 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana					
	- Desa	Jumlah	45	55	62	77
	- Satuan pendidikan aman bencana	Jumlah	55	68	72	76

Grafik 3.18 Jumlah Lembaga Tangguh Bencana





Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.40 Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	407.000	407.000	100,00
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	7.966.485.430	6.827.257.665	85,70
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	933.195.900	597.563.509	64,03
4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	53.755.000	48.475.500	90,18

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp7.473.703.674 dari anggaran sebesar Rp8.953.843.330 atau 83,47%. Realisasi keuangan sebesar 83,47% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- 1) Dukungan dan kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 2) Dukungan anggaran Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman melalui APBDes untuk kegiatan Pengurangan Resiko Bencana guna menindaklanjuti Rencana Penanggulangan Bencana Desa, sehingga pelaksanaannya berjalan sinergis dan koordinatif.
- 3) Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat di daerah rawan bencana, Komrel (Komunitas Relawan), FKKRS (Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman), FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana), Unit Operasional di kecamatan, Unit Pelaksana di desa, TNI/Polri, dan warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid).



Pelaksanaan penanganan pasca bencana di Kalurahan Sedangadi, Mlati

Di samping pembentukan Lembaga Tangguh Bencana, untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat maka dalam pelaksanaan sub urusan bencana telah dilakukan kegiatan kegiatan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal antara lain:

a. Layanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan beberapa komponen sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku yaitu kegiatan yang berbentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Komunikasi Informasi dan edukasi dikemas dalam bentuk :

- 1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana. Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah.
- 2) Pemetaan Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana. Kabupaten Sleman memiliki 7 ancaman bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api Merapi, tanah longsor, dan kekeringan. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana telah dilaksanakan dan dituangkan dalam RPB Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.
- 3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana
Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana telah dilaksanakan dan dituangkan dalam RPB Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022
- 4) Sosialisasi dan diseminasi informasi melalui *website* BPBD (bpbdsleman@slemankab.go.id) dan *website* relawan (sdin@slemankab.go.id)
- 5) Pemanfaatan aplikasi lapor bencana sleman.

- 6) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik telah dilaksanakan pada 5 ancaman bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor.



Pelatihan PPGD bagi pengelola barak di barak pengungsian



Simulasi pelatihan bencana



Pelatihan
pertukangan



Pelatihan *trauma-healing* yang diikuti Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan

b. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dilaksanakan dengan komponen sesuai peraturan yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, simulasi bencana, pelatihan masyarakat dan aparatur, layanan Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops), pendistribusian Alat Pengaman Diri. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ini dilaksanakan melalui :

- 1) Pelatihan dan gladi lapang kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
- 2) Pelatihan Dapur Umum
- 3) Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsi
- 4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi

c. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan pada kejadian bencana yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Jenis penanganan yang diberikan berupa:



- 1) Evakuasi dan penyelamatan korban
- 2) Distribusi logistik
- 3) Bantuan bencana
- 4) Perbaikan sarana prasarana wilayah.
- 5) Penanganan Covid-19.

Prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Sleman dalam bidang kebencanaan pada tahun 2020 adalah :

- 1) Bhumandala Kanaka Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2020 kategori Simpul Jaringan Terbaik dari Badan Informasi Geospasial.
- 2) Bhumandala Kencana Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2020 kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik dari Badan Informasi Geospasial.



Penerimaan penghargaan
Bhumandala Kanaka Simpul
Jaringan Geospasial oleh
Bupati Sleman,
Drs. H. Sri Purnomo, MSI

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 104,77 % dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 12 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.41 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			
			Bobot	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	30%	41,33	41,33	100,00
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	30%	72,00	86,66	120,36
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	40%	32,29	34,71	107,49
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				49,9	52,28	104,77

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020

Cara pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan Indeks Kualitas Air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Penghitungan nilai indeks kualitas air sungai menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}{2}}$$

Keterangan :

Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j;

Ci = konsentrasi parameter kualitas air ke i



Kegiatan Sampling Air Sungai di wilayah Kabupaten Sleman



Pemantauan pencemaran sungai pada tahun 2020 hanya dilakukan sekali tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran guna penanganan pandemi COVID-19. Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai dengan sampel di 60 titik pada Sungai Deggung, Boyong-Code, Pelang, Gajahwong, Konteng, Bedok, Opak, Tepus Kuning, Blotan Kruwet, dan Progo, air disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.42 Hasil Pemantauan Pencemaran Sungai Kabupaten Sleman

No	Waktu Pemantauan	Memenuhi baku mutu	Tercemar Ringan	Tercemar Sedang	Tercemar Berat
1.	Musim hujan (bulan Januari - Maret 2020)	14 titik (23 %)	13 titik (22 %)	26 titik (43 %)	7 titik (12 %)

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi penghitungan indeks pencemaran air sungai maka diperoleh nilai indeks sebesar 41,33 yang jika dikategorikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA) maka masuk dalam predikat KURANG BAIK.

NO	PREDIKAT IKA	KISARAN NILAI
1	Sangat Baik	>70
2	Baik	60-69
3	Cukup Baik	50-59
4	Kurang Baik	40-49
5	Waspada	<39

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017

Sungai di wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar ditetapkan sebagai sungai kelas I (satu) berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi DIY.



Gerakan Kebersihan Sungai, salah satu bentuk upaya pengelolaan sungai



Air sungai kelas I (satu) adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan kebutuhan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

Banyaknya sumber-sumber pencemar yang ada di sekitar sungai berupa permukiman, perdagangan, industri, kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan yang menghasilkan limbah cair yang langsung dibuang ke sungai, serta banyaknya pembuangan sampah ilegal di badan sungai memengaruhi kondisi kualitas air sungai. Hal tersebut akan berpengaruh pada Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air sangat tergantung dengan kualitas air sungai pada saat dilakukan pengambilan sampel. Selama 5 tahun terakhir hasil pengukuran indeks kualitas air fluktuatif naik turun, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.19 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air



b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Penghitungan nilai indeks kualitas udara menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \{5/0,9 \times (I_{Eu} - 0,1)\}$$

Keterangan :

I_{Eu} = Indeks yang didasarkan pada Standar Kualitas Udara *European Union Directives*

Hasil uji sampel udara *ambient* dengan metode pasif *sampler* (NO_2 dan SO_2) yang dilakukan pada 9-22 Juli 2020 dan 9-22 September 2020 dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, hasil rata-rata dua periode pengambilan sampel adalah sebagai berikut:



Tabel 3.43 Hasil Uji *Passive Sampler*

No.	Lokasi	Waktu	SO ₂	NO ₂
1	TRANSPORTASI : Jalan Tempel Turi Km. 2, Keringan, Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55551 (Depan Kantor Kapanewon Turi)	14 hari (9-22 Juli 2020) & 9-22 (September 2020)	10,29	10,14
2	PERINDUSTRIAN : Lingkungan PT. Sport Glove Indonesia (SGI) Krandon, Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55512	14 hari (9-22 Juli 2020) & 9-22 (September 2020)	5,87	7,87
3	PEMUKIMAN : Perumahan Griya Taman Asri II (GTA), Panasan, Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581	14 hari (9-22 Juli 2020) & 9-22 (September 2020)	4,27	6,86
4	PERKANTORAN : Halaman Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman Komplek Perkantoran Pemda Sleman, Beran Kidul, Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511	14 hari (9-22 Juli 2020) & 9-22 (September 2020)	2,49	12,57
	Rerata		6.66	11.21

Tabel 3.44 Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO ₂	12.01	40,00	0,3004
SO ₂	7.60	20,00	0,3800
Rata-Rata			0,3402
Indeks Udara			86.66

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan energi baik untuk transportasi maupun untuk kebutuhan lainnya juga meningkat. Peningkatan kebutuhan

energi untuk transportasi berpengaruh pada kualitas udara yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan manusia.



Pengambilan sampling udara ambien dengan *Passive Sampler*

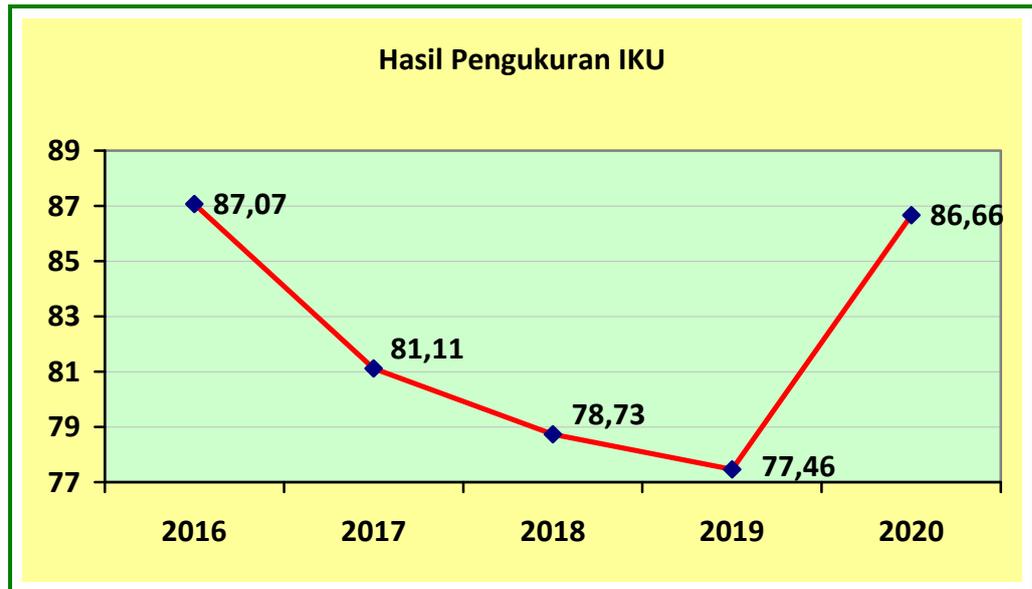
Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Sleman. Kecenderungan penurunan kualitas udara telah terlihat dengan data Indeks Kualitas Udara yang semakin menurun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yaitu ozon, partikel, karbon monoksida (CO), sulfurdoksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan IKU baru menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar, serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Nilai IKU selama 4 tahun berturut turut mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 : 87,07; tahun 2017: 81,11; tahun 2018: 78,73; dan tahun 2019: 77,46. Sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 86,66

Nilai IKU 86.66 masuk dalam kategori BAIK.

NO	PREDIKAT IKU	KISARAN NILAI
1	Sangat Baik	>91
2	Baik	82-91
3	Cukup Baik	72-81
4	Kurang Baik	62-71
5	Sangat Kurang Baik	52-61
6	Waspada	<51

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017

Grafik 3.20 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara



Pada tahun 2020 nilai IKU di Kabupaten Sleman masuk kategori BAIK, namun kondisi ini tetap perlu mendapatkan perhatian karena kecenderungan 4 tahun kualitasnya semakin menurun yang diduga akibat banyaknya sumber emisi udara, baik dari kendaraan bermotor maupun emisi dari kegiatan utilitas seperti genset dan boiler yang menunjang usaha/kegiatan. Adapun kenaikan IKU pada tahun 2020 kemungkinan terjadi karena selama pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang menghasilkan emisi udara seperti transportasi, operasional genset dan boiler tidak operasional atau berkurang operasionalnya.

Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar, yaitu penggunaan teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, pelaksanaan sistem pemeriksaan dan perawatan kendaraan, membangun sistem transportasi umum yang hemat dan terjangkau serta jaringan yang ramah bagi pejalan kaki dan sepeda. Selain itu, kegiatan fisik berupa penanaman ruas jalan dengan pohon perindang dan pembuatan taman/penyediaan ruang terbuka hijau di tempat strategis di tepi jalan, dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar jalan raya.





Upaya peningkatan kualitas udara di sekitar jalan raya melalui penanaman pohon perindang dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Sleman

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan perbandingan langsung antara luas lahan (hutan dan ruang terbuka hijau) dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Sleman.

Penghitungan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan:

- ITH = Indeks Tutupan Hutan.
- IPH = Indeks Performance Hutan
- IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah
- IKBA = Indeks Konservasi Badan Air
- IKH = Indeks Kondisi Habitat

Penghitungan luasan hutan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 76,97 km², terdiri dari hutan rakyat seluas 47,56 km², hutan konservasi seluas 18,81 km² dan ruang terbuka hijau perkotaan seluas 10,60 km². Terdapat penambahan luasan hutan sebesar 1,75 km² dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.45 Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Sleman 2020

No	Kabupaten	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Hutan (km ²)	Hutan/Luas Wilayah	Indeks Tutupan Hutan
1.	Sleman	1.079.916*	574,82	76,97	13,39%	34,71

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020

*) data penduduk semester I 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah 34,71

Grafik 3.21 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan



Nilai IKTL 34,71 masuk kategori WASPADA.

NO	PREDIKAT IKTL	KISARAN NILAI
1	Sangat Baik	>70
2	Baik	60-69
3	Cukup Baik	50-59
4	Kurang Baik	40-49
5	Waspada	<39

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017

Nilai IKTL dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2016 s/d 2020) terus mengalami peningkatan, namun nilai IKTL ini masih masuk kategori waspada. Meskipun ada penambahan taman/ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan nilai IKTL namun penambahan ini tidak sebanding dengan luas yang harus disediakan untuk mencapai kategori cukup baik. Untuk menaikan IKTL sebesar 0,1 luasan RTH yang harus disediakan minimal 70 ha, sedangkan setiap tahunnya penambahan luasan taman/RTH yang dibangun hanya sekitar 0,5 s/d 1,5 ha.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.46 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,33	46,33	41,33	41,33
2.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	78,73	77,46	86,66	72,00
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	34,42	34,43	34,71	32,30

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.47 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	469.813.400	455.750.725	97,01
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.176.002.950	10.903.714.808	97,56
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100.840.000	59.808.000	59,31
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.259.784.980	2.162.501.943	95,70
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.910.349.950	20.178.511.237	96,50
6	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	20.257.500	20.197.500	99,70
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.593.665.000	3.389.182.999	92,79
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	527.200.000	490.973.250	93,13
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3.428.707.800	3.389.182.999	98,85
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.438.623.710	11.910.162.937	95,75
11	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	3.270.517.900	3.243.176.625	99,16
12	Program Perencanaan Tata Ruang	1.398.457.500	1.373.159.025	98,19
13	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	745.198.000	741.523.157	99,15
14	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis dan Kasultanan dan Kadipaten	637.658.000	628.358.000	98,54
15	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	341.836.850	1.811.743.950	92,37



16	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.020.360.000	1.811.542.900	89,67
----	--	---------------	---------------	-------

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp61.018.842.520 dari anggaran sebesar Rp63.339.073.540 atau 96,34%. Realisasi keuangan sebesar 96,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,77% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik berupa IPAL Komunal dan SPALD-S (*septic tank* dan resapan per rumah) dan sistem terpusat berupa IPAL Kawasan dan Sambungan Rumah ke IPAL Sewon Bantul. Untuk pengolahan lumpur tinja dari SPALD-S dan IPAL Komunal, dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).



IPAL Kawasan Berbah



Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
Di Sembir Madurejo Prambanan

- 2) Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan antara lain pembangunan 17 transfer depo, 25 TPS3R dan 34 TPS/rumah sampah. Adanya bantuan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan persampahan berupa kompartemen sampah 71 unit, gerobak sampah 93 unit, komposter 224 unit, drum plastik untuk sampah 265 buah, papan larangan 15 buah.





Pemilahan sampah di TPS3R dan Transfer Depo

- 3) Adanya program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang melaksanakan pembangunan taman/RTH di wilayah Kabupaten Sleman serta adanya program kabupaten layak anak yang salah satu kriterianya adalah adanya/ketersediaan taman layak anak sehingga pada tahun 2020 ini penambahan taman/RTH mencapai 7.643,31 m². Kegiatan Pemeliharaan RTH meliputi taman/RTH 70 lokasi dan tanaman perindang jalan 20 ruas jalan, serta kegiatan Pengawasan, Pengendalian RTH dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH melalui pengendalian penebangan pohon perindang jalan 40 pohon dan sosialisasi pengelolaan RTH 26 lokasi.
- 4) Adanya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebanyak 35 usaha/kegiatan, dan yang taat terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup dengan memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup sebanyak 31 usaha/kegiatan (88,57%).
- 5) Pemantauan Kualitas Air Bersih (Air Sumur) Tahun 2020 di 50 titik lokasi di 32 IPAL.
- 6) Adanya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat diantaranya kegiatan sosialisasi atasi limbah domestik untuk operasional dan pemeliharaan SPALD-T skala pemukiman, kegiatan pelatihan pengomposan dan pengelolaan sampah kepada Bank Sampah.
- 7) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tergabung dalam komunitas atau kelompok antara lain:
 - a. Kelompok Masyarakat Pengelola dan Pemanfaat (KMPP) yang bergerak dalam pengelolaan IPAL komunal untuk air limbah domestik yang beranggotakan 144 kelompok.
 - b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) SEHATI, terdiri dari 207 Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) dan 25 TPS3R.
 - c. Forum Komunitas Sungai Sleman (FKSS) yang beranggotakan 44 kelompok yang bergerak pada 23 sungai yang berada di Kabupaten Sleman.
 - d. Kelompok kegiatan sejak usia sekolah/remaja melalui SAKA KALPATARU dengan melaksanakan Program Kali Bersih (Prokasih) dan lomba pembuatan film dokumenter bidang lingkungan hidup sebanyak 22 film karya peserta SMA/SMK sederajat.



Peranan Saka Kalpataru dalam Gerakan Prokash

- 8) Pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup disekolah untuk bersaing pada Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

Prestasi yang diperoleh dalam pembangunan lingkungan hidup pada tahun 2020 adalah penghargaan Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat Nasional dengan Kategori Utama di berikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Padukuhan Karangtanjung Kalurahan Pandowoharjo, Padukuhan Joho Kalurahan Condongcatur, Padukuhan Babadan Kalurahan Wedomartani, Padukuhan Jurugan Kalurahan Bangunkerto dan Padukuhan Wonorejo Kalurahan Sariharjo.



13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak” dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” mencapai 337,50% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.48 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,96	3,24	337,50

Sumber data: DP3APPKB Kabupaten Sleman Tahun 2020

Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dihitung dengan membandingkan data kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 sebanyak 432 kasus, dengan kejadian tahun 2020 sebanyak 418 kasus, yaitu terjadi penurunan sebanyak 14 kasus. Selisih jumlah kasus tersebut dibagi jumlah kasus tahun lalu kali seratus persen, yaitu $(14 / 432) \times 100\% = 3,24\%$. Selanjutnya, realisasi persentase penurunan kasus tersebut 3,24%, jika dibandingkan dengan target 0,96%, maka pencapaian penurunannya adalah sebesar $(3,24 / 0,96 \times 100\%) = 337,5\%$. Dari sisi realisasi menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi terdapat peningkatan capaian kinerja pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibanding tahun sebelumnya sebesar 224%. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dan tersedianya Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) KESENGSEM.



Sosialisasi Puspaga di RBRA Taman Dunggu



Kegiatan Positive Parenting di Puspaga Kesengsem



Pembekalan kesehatan remaja perempuan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup perempuan

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.49 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	2,76	5,6	3,24	0.94

Grafik 3.22 Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



Sasaran Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dicapai melalui program sebagai berikut:



Tabel 3.50 Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2020

	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.272.274.350	1.250.124.350	98,26
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	491.507.685	491.126.685	99,92
3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	257.860.000	257.860.00	100
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	60.482.500	60.482.500	100

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp2.059.593.535 dari anggaran Rp2.082.124.535 atau 98,92%. Realisasi keuangan sebesar 98,92% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 337,50% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- 1) Komitmen yang tinggi Pemerintah Kabupaten Sleman yang diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, antara lain penyusunan regulasi berupa Perda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perbup mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan, Perbup mengenai Jam Istirahat Anak, Perbup Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan, dan Perbup Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada Anak.
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang baik antar *stakeholder* maupun lintas sektoral dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan pendukung yang dilakukan antara lain:

- a. pembentukan Forum Anak Desa
- b. kajian cepat situasi anak sleman di masa pandemi COVID-19
- c. pembentukan Sekber Perlindungan Anak paska tanggap darurat korban susur sungai SMP Negeri 1 Turi
- d. inovasi SIEMOLIN (Sosialisasi, Informasi, Edukasi dengan Mobil Perlindungan)
- e. sosialisasi Pencegahan sejak dini PKDRT pada PIK-R dan FORAN
- f. *assesmen* Sederhana terkait forum AMPK
- g. penyediaan POS Perlindungan Perempuan dan Anak (POS PPA)
- h. pelatihan sistem perlindungan anak
- i. pelatihan Pelopor dan Pelapor bagi Forum Anak
- j. inisiasi Masjid Agung Sleman menjadi ramah anak

- k. inisiasi Pondok Pesantren ramah anak
- l. inisiasi PAUD ramah anak
- m. pelatihan KHA bagi Forum Anak
- n. pelatihan *public speaking* bagi forum anak
- o. penyusunan Rencana Aksi PUG tingkat Kalurahan
- p. peningkatan Kapasitas forum PUG Bidang Agama
- q. pemberian penghargaan Gender Champion
- r. sosialisasi PUG bagi karang taruna
- s. sosialisasi PUG bagi Babinsa (Bintara Pembina Desa)
- t. Temu Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)

Prestasi yang berhasil diraih dalam bidang perlindungan perempuan dan anak antara lain:

- 1) Penghargaan Forum Anak Kecamatan Terbaik, *DAFA Award 2020* dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Forum Anak Kecamatan Moyudan
- 2) Anugerah KPAI *Award 2020* dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis SIMEP.



Penerimaan Anugerah KPAI *Award 2020* dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui *platform Zoom*



DAFA *Award 2020*,
penghargaan Forum Anak
Kecamatan Terbaik



14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Jumlah Konflik SARA” mencapai 100% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 14 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.51 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤3	0	100

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Tahun 2020

Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) pada tahun 2020 tercatat 0 (nihil), artinya tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun ini. Kondisi ini sama seperti tahun 2019, tidak terdapat konflik SARA di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan pemantauan selama tahun 2020, situasi berlangsung aman dan kondusif.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.52 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Jumlah Konflik SARA	Nilai	0	0	0	≤3

Sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.53 Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.186.982.160	2.306.652.854	72,38
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	236.039.500	223.199.000	94,56
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	14.514.803.960	13.507.944.344	93,06
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	685.133.300	533.146.875	77,82

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp16.570.943.073 dari anggaran sebesar Rp18.622.958.920 atau 88,98%. Realisasi keuangan sebesar 88,98 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Sinergitas yang baik antara pimpinan daerah, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan serta respon yang tepat dalam menyelesaikan potensi konflik SARA.



Tim Penanggulangan Konflik Sosial Terpadu melakukan pemantauan potensi konflik antara warga di Babadan, Purwomartani, Kalasan dengan Jamaah LDII.



Anjingsana pemangku kepentingan ke Lembaga Keagamaan dalam rangka menjalin komunikasi dan mewujudkan kerukunan umat beragama.

2. Adanya komitmen dari seluruh pihak untuk mengimplementasikan regulasi terkait Peraturan Bupati Nomor 12.2 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sehingga mampu memberikan kepastian dan jaminan masyarakat untuk dapat beribadat dengan tenang dan meminimalkan potensi konflik di masyarakat.



Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI menyerahkan 181 Surat Keputusan Dispensasi/Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadah kepada masing-masing perwakilan rumah ibadat di Wisma Yosoputro, Kalasan, Sleman, 13 November 2020

- Adanya peran serta Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pencegahan konflik sosial melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dengan adanya regulasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Reksa Desa, Pemerintah Kalurahan mempunyai pedoman yang jelas dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.



Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan di Hotel Merapi Merbabu dengan peserta unsur intelijen, perangkat daerah terkait dan ormas kepemudaan di Kabupaten Sleman dalam rangka menghadapi mengantisipasi potensi konflik saat Pilkada



Kunjungan Lapangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman ke Pemerintah Kalurahan Donokerto Turi pasca kejadian laka air saat siswa SMP Negeri 1 Turi melakukan susur sungai Sempor.

- Dilaksanakannya berbagai program kegiatan yang inovatif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan serta kewaspadaan nasional antara lain dengan adanya Workshop Kader Pancasila dalam rangka pembentukan Desa Berkarakter Pancasila dan Gladi Lapangan Pengendalian Konflik Sosial.



Pengukuhan Kader Pancasila Tahun 2020 bagi Kalurahan yang ditunjuk sebagai Rintisan Desa Berkarakter Pancasila



Gladi Lapangan Pelatihan Pengendalian Konflik Sosial di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping

- Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dan penghargaan akan hak-hak politik individu, sehingga pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 berlangsung demokratis, situasi aman dan terkendali. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sleman pada



Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 mencapai 604.613 pemilih atau 75,86% dari jumlah pemilih yang terdaftar.



Peserta seminar Partisipasi Perempuan dalam Politik berkomitmen menyukseskan Pilkada 2020 dan menolak politik uang.

Sarasehan demokrasi dan HAM bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman merupakan upaya untuk memberikan edukasi masyarakat dan upaya Pemerintah Sleman menjami keadilan hak-hak politik setiap warganya.



Rapat Koordinasi Daerah terkait "Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020" dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020



15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Persentase Pelestarian Warisan Budaya” mencapai 107,41 % dan termasuk predikat “ **sangat berhasil** ”. Data capaian kinerja sasaran 15 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.54 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	33,75	36,25	107,41

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Persentase pelestarian warisan budaya pada tahun 2020 dengan target 33,75% terealisasi sebesar 36,25%, sehingga capaiannya adalah sebesar 107,41%. Realisasi indikator kinerja ini 36,25 % dibandingkan realisasi tahun lalu, yang sebesar 33,75%.

Penghitungan persentase pelestarian warisan budaya adalah jumlah benda cagar budaya dan situs cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 290 buah dibagi dengan jumlah warisan budaya yang teridentifikasi sebanyak 800 buah, yaitu $(290/800) \times 100\% = 36,25\%$.



Cagar Budaya Candi Sambisari di Kabupaten Sleman

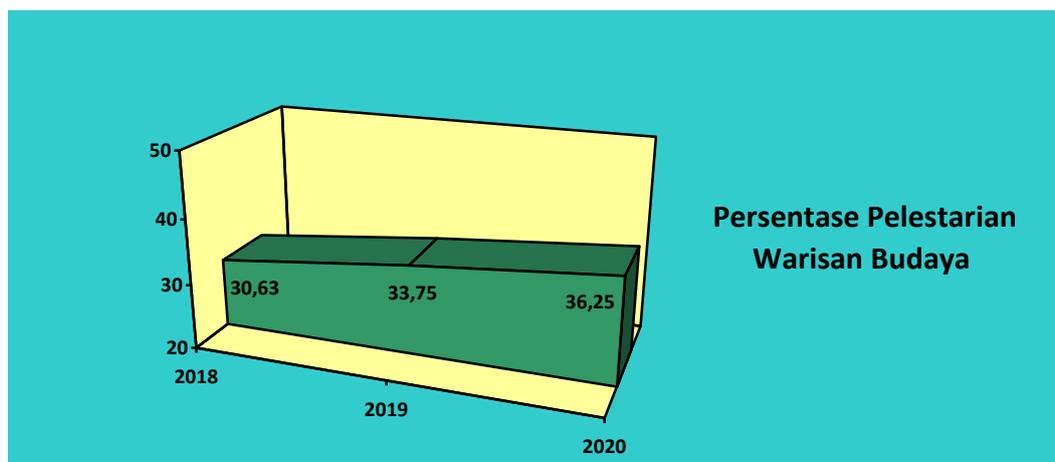


Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Persentase pelestarian warisan budaya	Nilai	30,63	33,75	36,25	38

Grafik 3.23 Persentase Pelestarian Warisan Budaya



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.56 Program dan Anggaran Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	440.644.250	424.632.000	96,37
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	200.674.875	186.700.800	93,04
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	557.401.350	557.333.710	99,99
4	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	1.543.169.100	1.527.288.606	98,97
5	Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman	533.189.800	467.322.750	87,65
6	Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	608.309.000	575.279.700	94,57



7	Program Pengelolaan Taman Budaya	32.874.125.000	32.843.484.900	99,91
8	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	6.452.875.350	6.214.629.570	96,31
9	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	321.355.000	320.135.800	99,62
	Total	43.531.743.725	43.116.807.836	99,05

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp43.116.807.836 dari anggaran sebesar Rp43.531.743.725 atau 99,05 %. Realisasi keuangan sebesar 99,05% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,41%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Pertunjukan budaya masyarakat Wayang Wong di Anjungan D.I.Yogyakarta TMII sebagai salah satu strategi melestarikan dan mempromosikan potensi seni budaya Kabupaten Sleman



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya:

- 1.) Pembinaan pelestari dan potensi warisan budaya, termasuk pemberian penghargaan berupa penetapan warisan budaya dalam Surat Keputusan Gubernur/Bupati, bantuan dan, dan pendaftaran cagar budaya. Hal yang dilakukan antara lain:
 - a. Pemberian apresiasi terhadap seniman-seniman dan budayawan dengan beberapa kategori sebagai berikut : (1) Kategori Kreator diberikan untuk R. Sukoco, Kategori Maestro untuk Eko Purnomo Teguh Wibowo, (2) Kategori Budayawan untuk Dr. Sumaryadi, M.Pd, (3) Kategori Seniman untuk Sancoko, S.Pd, (4) Kategori Remaja Berprestasi untuk Zaky Kaditama, (41) Kategori Pelestari Bangunan Cagar Budaya diraih SMP N 1 Berbah, Kategori Tradisi Budaya diraih Upacara Adat Pager Bumi Pulesari.
 - b. Gelar apresiasi budaya Wayang Kulit secara daring melalui kanal *Youtube* Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
 - c. Registrasi nasional cagar budaya.



- 2.) Peningkatan kualitas budaya masyarakat melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya antara lain melalui;
 - a. Pembinaan Desa Berbudaya sebanyak 2 (dua) desa budaya yaitu Rintisan Desa Budaya Kalurahan Tridadi Sleman dan Rintisan Desa Budaya Kalurahan Caturharjo.





- b. Penanaman nilai-nilai budaya dengan menyelenggarakan Gelar Macapat Tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2020.
- c. Pembinaan Pranatacara.
- d. Pentas wayang kulit, dengan diadakannya Pentas Dalang Sleman secara *live streaming*.
- e. Pengembangan kesenian melalui pentas seni.



- 3.) Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya antara lain penyelenggaraan upacara adat seperti Pager Bumi Pulesari, Wonolelo, Bathok Bolu, Ngrowod, Tradisi budaya adat Wiwit di Susukan II Margokaton, Merti Umbul, Kenduri Banyu Udan dan Tradisi Kirab Budaya di Umbul Bendo, Kali Kuning, Umbulharjo, Cangkringan, kunjung museum di Museum Gunungapi Merapi bagi siswa sekolah. Peran serta masyarakat juga dalam pembinaan dan pelestarian Bahasa Sastra Jawa melalui keikutsertaan dalam lomba sesorah, lomba cerkak, lomba dalang, lomba geguritan, lomba alihaksara, lomba pranatacara, dan lomba macapat.
- 4.) Adanya sosialisasi tata nilai budaya melalui seni pertunjukan secara daring melalui kanal *Youtube* Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
- 5.) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya melalui pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya, yaitu dengan pemberian hibah perangkat alat kesenian kepada 18 (delapan belas) kelompok masyarakat seni dan budaya. Juga



Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman.

- 6.) Penyelenggaraan festival dan misi kesenian antara lain:
- a. Misi Kesenian ke Taman Mini Indonesia Indah - Jakarta
 - b. Festival Kesenian Sleman
 - c. Festival Kebudayaan Yogyakarta
 - d. Festival Kethoprak
 - e. Festival Teater
 - f. Festival Sendratari
 - g. Festival Ngudo Roso
 - h. Festival Langen Carita
 - i. Festival Lukis Kyoto
 - j. Festival Garis Imaginer
 - k. Festival Jatilan
 - l. Festival 7 Candi
 - m. Pameran Seni Rupa



Salah satu kegiatan festival yang diselenggarakan sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus Keistimewaan DIY



C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Sleman dapat diinformasikan sebagai berikut:

1) Perbandingan anggaran dan realisasi Pengadaan Barang/Jasa

- a. Tahun 2020 Kabupaten Sleman melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada awalnya menargetkan pengadaan barang/jasa sebanyak 260 paket. Namun demikian, dengan adanya pandemi *Covid-19* Kabupaten Sleman harus melakukan refocusing anggaran yang berpengaruh pada pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan oleh perangkat daerah, sehingga paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 142 paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp177.465.931.376,00 Setelah dilakukan penghitungan HPS oleh PPK nilai total HPS menjadi Rp173.089.235.384,00.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisiensi, maka meskipun dalam kondisi masa pandemi *COVID-19* semangat dan prinsip efisiensi tetap dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan. Dari hasil proses pemilihan pengadaan barang/jasa melalui negosiasi/penawaran yang dilakukan oleh kelompok kerja memperoleh nilai total hasil negosiasi sebesar Rp144.365.136.439,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp33.100.794.937,00 atau 16,59% dari Nilai HPS.

Tabel 3.57 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

No	H P S	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp173.089.235.384,00	Rp144.365.136.439,00	Rp28.724.098.945,00	16,59 %

- b. Dampak dari Pandemi COVID-19 menyebabkan dilakukan *refocusing* anggaran di Kabupaten Sleman, sehingga pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* juga mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019. Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sleman melalui *e-Purchasing* sampai pada Bulan November 2020 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 95.048.643.827,00 dalam pelaksanaannya dilakukan negosiasi dengan total nilai sebesar Rp 90.727.200.383,00 sehingga terdapat efisiensi pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebesar Rp 4.321.443.444,00 atau sebesar 4,55%.



Tabel 3.58 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing

No	Rencana Pengadaan	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp95.048.643.827,00	Rp90.727.200.383,00	Rp4.321.443.444,00	4,55 %

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM/Gas)

Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM/Gas) untuk kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam pertanggungjawabannya harus melampirkan *print-out* pembelian BBM. Alokasi anggaran BBM/Gas senilai Rp14.011.107.550,00 akan terealisasi 100% jika menggunakan sistem stock. Namun dengan “kebijakan *print-out*”, maka realisasi BBM/Gas hanya mencapai Rp12.132.466.617,00, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp1.878.640.933,00 atau 13,41%.

Tabel 3.59 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan BBM/Gas

No	Anggaran	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp14.011.107.550,00	Rp12.132.466.617,00	Rp1.878.640.933,00	13,41 %

3) Perbandingan anggaran dan realisasi Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas di tahun 2020 telah diupayakan sedemikian rupa untuk diefisienkan dalam pelaksanaannya, apalagi selama masa pandemi *COVID-19*. Kebijakan ini berimplikasi pada efisiensi juga dari sisi pembiayaan perjalanan dinas. Untuk kegiatan yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, maka uang makan diberikan 70% dari standar uang makan. Jika akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan 30% dari standar harga jasa penginapan sesuai dengan golongannya.

Hasil kebijakan perjalanan dinas yang demikian, dari pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp2.908.035.000,00 realisasinya hanya Rp2.451.094.500,00, atau menghasilkan efisiensi sebesar Rp456.940.500,00 atau 15,71%. Kemudian untuk anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah, dari pagu anggaran sebesar Rp26.862.987.375,00 hanya terealisasi Rp18.928.828.776,00, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp7.934.158.599,00 atau 29,54%.



Tabel 3.60 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Anggaran	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp2.908.035.000,00	Rp2.451.094.500,00	Rp456.940.500,00	15,71 %

Tabel 3.61 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Anggaran	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp26.862.987.375,00	Rp18.928.828.776,00	Rp7.934.158.599,00	29,54 %

4) Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor merupakan belanja pemeliharaan kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020 telah diupayakan sedemikian rupa untuk diefisienkan dalam pelaksanaannya, sehingga berimplikasi pada efisiensi juga dari sisi pembiayaan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor.

Dari pagu anggaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp4.740.600.145,00 realisasinya hanya sebesar Rp3.991.455.751,00, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp749.144.394,00 atau 15,80%.

Tabel 3.62 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor

No	Anggaran	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	Rp4.740.600.145,00	Rp3.991.455.751,00	Rp749.144.394,00	15,80 %



Berdasarkan data tersebut, maka dihasilkan efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 3.63 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020

No	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Rp173.089.235.384,00	Rp144.365.136.439,00	Rp28.724.098.945,00
2	Rp95.048.643.827,00	Rp90.727.200.383,00	Rp4.321.443.444,00
3	Rp14.011.107.550,00	Rp12.132.466.617,00	Rp1.878.640.933,00
4	Rp2.908.035.000,00	Rp2.451.094.500,00	Rp456.940.500,00
5	Rp26.862.987.375,00	Rp18.928.828.776,00	Rp7.934.158.599,00
6	Rp4.740.600.145,00	Rp3.991.455.751,00	Rp749.144.394,00
Jumlah	Rp316.660.609.281,00	Rp272.596.182.466,00	Rp44.064.426.815,00



BAB IV PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	A (81,72)	N / A	N / A
		2. Opini BPK terhadap LKD	WTP)*	WTP)*	100,00
Rata-rata capaian					100,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,25%	29,79%	109,32
		Rata-rata capaian			
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,39	82,37	101,20
		Rata-rata capaian			
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,78 tahun	74,81 tahun	100,04
		Rata-rata capaian			
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,32 %	96,88 %	123,70
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	≥ 100 %	100,41 %	100,00
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	≥ 100 %	100,69 %	100,00
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	≤ 100 %	95,85 %	100,00
		5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,93 %	84,51 %	98,35
		6. Rata-rata Lama Sekolah	10,67 tahun	10,91 tahun	102,25
		7. Harapan Lama Sekolah	16,63 tahun	16,73 tahun	100,60
		8. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SD	N / A	N / A	N / A
		9. Nilai Rata-rata Hasil Ujian SMP	N / A	N / A	N / A
Rata-rata capaian					103,56
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi	0,16 %	N / A	N / A
		2. Indeks Gini	0,35 - 0,4)*	0,417)*	95,75
Rata-rata capaian					95,75
7.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian	1. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,7 hari	0,97 hari	57,06
		2. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	0 hari	0,42 hari	100,00
		3. Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.500.000 orang	4.250.119 orang	121,43
		4. Nilai Ekspor	36.600.000 US\$	55.796.578,44 US\$	152,45
		5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	3,26 %	- 0,03 %	- 0,92
		6. Nilai Tukar Petani	102,50 %	112,53 %	109,79
		7. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	- 34,00 %	- 34,00 %	100,00
Rata-rata capaian					91,40
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,34 %	6,59 %	96,06
		Rata-rata capaian			
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	1. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	78,18 %	85,73 %	109,66
		2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	81,18 % dan 59 %	82,61 % dan 59,51 %	101,76 dan 100,86
Rata-rata capaian					105,49



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
10.	Menurunnya Kemiskinan	1. Persentase KK Miskin	8,50 %	8,79 %	96,59
		2. Persentase Penduduk Miskin	7,91 %	8,12 %	97,35
Rata-rata capaian					96,97
11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana			
		1. Desa Aman Bencana	62	62	100,00
		2. Satuan Pendidikan Aman Bencana	72	72	100,00
Rata-rata capaian					100,00
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	41,33	41,33	100,00
		2. Indeks Kualitas Udara	72	86,66	120,36
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,29	34,71	107,49
Rata-rata capaian					104,77
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0,96 %	3,24 %	337,50
Rata-rata capaian					337,50
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Jumlah Konflik SARA	≤ 3 kasus	0 kasus	100,00
Rata-rata capaian					100,00
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	33,75 %	36,25 %	107,41
Rata-rata capaian					107,41

*) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2019), karena angka kinerja tahun 2020 belum tersedia

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 14 sasaran, atau 93,33%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,67%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%;
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,78	74,81	100,04
2.	Persentase KK Miskin	%	8,50	8,79	96,59
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	7,91	8,12	97,35
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,16	N / A	N / A
5.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat (Nilai)	A (81,72)	N / A	N / A
6.	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP)*	WTP)*	100,00
7.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,39	82,37	101,20
8.	Nilai Ekspor	US\$	36.600.000	55.796.578,44	152,45
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,50	112,53	109,79



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
10.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	78,18	85,73	109,66	
11.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	81,18 dan 59	82,61 dan 59,51	101,76 dan 100,86	
12.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Desa dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	62 dan 72	62 dan 72	100 dan 100	
13.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	27,25	29,79	109,32	
14.	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,33	41,33	100,00	
15.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	72	86,66	120,36	
16.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	32,29	34,71	107,49	
17.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari (Wisnus) Hari (Wisman)	1,7 0	0,97 0,42	57,06 100,00	
18.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.500.000	4.250.119	121,43	
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34	6,59	96,06	
20.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	3,26	- 0,03	- 0,92	
21.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	- 34,00	- 34,00	100,00	
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,32	96,88	123,70	
23.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	% APK SD/MI	≥ 100	100,41	100,00	
		% APK SMP/MTs	≥ 100	100,69	100,00	
		% APM SD/MI	≤ 100	95,85	100,00	
		% APM SMP/MTs	85,93	84,51	98,35	
24.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,67	10,91	102,25	
25.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,63	16,73	100,60	
26.	Nilai Rata-rata Hasil Ujian					
		SD/MI	Nilai	N / A	N / A	N / A
		SMP/MTs	Nilai	N / A	N / A	N / A
27.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	33,75	36,25	107,41	
28.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	0,96	3,24	337,50	
29.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤ 3	0	100,00	

*) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2019), karena angka kinerja tahun 2020 belum tersedia

Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2020 sebanyak 50 prestasi, sebagaimana daftar terlampir.



Lampiran



**DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan
1	2	3
1.	Penghargaan atas Dukungan Layanan Pemasarakatan Tahun 2019	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, tanggal 16 Januari 2020
2.	Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 kepada BPK RI Perwakilan Yogyakarta tercepat di D.I. Yogyakarta dan tercepat ketiga di tingkat nasional	BPK RI Perwakilan DIY, 20 Januari 2020
3.	Predikat AKIP A (nilai 81,99) atas hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel (predikat A tahun kedua)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 24 Februari 2020
4.	Peringkat IV "Sangat Memuaskan" terkait Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Sleman	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 26 Februari 2020
5.	3 Rekor MURI, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Festival 1000 Tumpeng dan Pasukan Bregada Desa Condongcatur• Penyelenggaraan Kesenian Jatilan terlama nonstop 56 jam• Sleman Gumyak 309 Penari Wanara Turun Gunung	Museum Rekor Indonesia (MURI), tanggal 8 Maret 2020
6.	<i>Digital Award QRIS</i> Nasional 2020 sebagai kabupaten yang menerapkan sistem pembayaran non tunai yang maju, yaitu e-retribusi, pionir pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan QRIS desa wisata	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2020
7.	Peringkat I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2020 kategori Dokter, atas nama dr. Veronika Evita Setianingrum, M.P.H	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2020
8.	Peringkat I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2020 kategori Dokter Gigi, atas nama drg. Nurliana Hastuti	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2020



9.	Peringkat I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2020 kategori Bidan, atas nama Heni Irawati, A.Md.Keb	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2020
10.	Peringkat I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2020 kategori Nutrisionis, atas nama Cahyaningtyas Triwinarni, S.Tr.Gz	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2020
11.	Peringkat IV Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2020 kategori Perawat, atas nama Firmina Sedyaningsih, AMK	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2020
12.	Penghargaan atas Partisipasi Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19	Kementerian Dalam Negeri, tanggal 22 Juni 2020
13.	KPAI <i>Award</i> dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP)	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tanggal 22 Juli 2020
14.	Penghargaan Program Peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui Akses Perpipaian <i>Batch</i> 1 Tahun 2019-2020	Persatuan Perusahaan Air Mineral Seluruh Indonesia (PERPAMSI), tanggal 28 Juli 2020
15.	Forum Anak Kecamatan Moyudan sebagai Forum Anak Kecamatan Terbaik Tingkat Nasional dalam ajang Data Forum Anak (DAFA) <i>Award</i> Tahun 2020	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 25 Agustus 2020
16.	Top of The Top BUMD <i>Award</i> 2020 (Bintang Lima) untuk BANK SLEMAN	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) & Lembaga Kajian Nawacita (LKN), tanggal 27 Agustus 2020
17.	Top BUMD <i>Award</i> 2020 (Bintang Empat) untuk PDAM TIRTA SEMBADA SLEMAN	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) & Lembaga Kajian Nawacita (LKN), tanggal 27 Agustus 2020
18.	Top CEO BUMD 2020 untuk Direktur BANK SLEMAN atas nama Bapak Mohammad Sigit, S.E., M.Si.	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) & Lembaga Kajian Nawacita (LKN), tanggal 27 Agustus 2020
19.	Top CEO BUMD 2020 untuk Direktur PDAM TIRTA SEMBADA SLEMAN atas nama Bapak Dwi Nurwata, S.E., M.M.	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) & Lembaga Kajian Nawacita (LKN), tanggal 27 Agustus 2020



20.	Top Pembina BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 2020 untuk Bupati Sleman, atas peran & kontribusinya dalam membina dan mendukung BANK SLEMAN sebagai Top of the Top BUMD <i>Award</i> 2020 dan PDAM TIRTA SEMBADA SLEMAN sebagai Top BUMD <i>Award</i> 2020	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) & Lembaga Kajian Nawacita (LKN), tanggal 27 Agustus 2020
21.	Juara 2 Festival Dalang Anak atas nama Davin Mahatma	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, tanggal 28 Agustus 2020
22.	<i>Best of the Best</i> Pasar Siaga COVID-19, untuk Pasar Prambanan	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, 31 Agustus 2020
23.	Juara II Pasar Siaga COVID-19 Klasifikasi Kelas B , untuk Pasar Gentan	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2020
24.	Juara harapan 3 Lomba Bercerita Tingkat Nasional atas nama Prema Eka Jati Iswara	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tanggal 10 September 2020
25.	Natamukti <i>Award</i> kategori Natamukti Ganapravara (penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan penghargaan Natamukti Nindya di tahun 2019 dan berhasil mempertahankan performa UKM-nya di tahun 2020)	<i>International Council for Small Business (ICSB)</i> Indonesia, tanggal 17 September 2020
26.	<i>Indonesia Smartnation Award</i> 2020 atas Inovasi <i>Smart Living</i> Gerakan Candaq Mas COVID (Cari dan Kendalikan Masalah COVID-19)	<i>Indonesia Smart City Investment Forum</i> , tanggal 5 Oktober 2020
27.	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) D.I. Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2020
28.	Penghargaan Kepegawaian Kategori Pengelolaan Terbaik dalam Layanan Pensiun Tahun 2020 se-Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara	Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, tanggal 10 Oktober 2020
29.	Penghargaan Inovasi Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Komprehensif dan Terintegrasi kepada Puskesmas Godean I	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 10 Oktober 2020
30.	Terbaik Nasional Pemetaan Mutu Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 15 Oktober 2020
31.	Penghargaan Kampung Iklim (PROKLIM) Kategori	Kementerian Lingkungan Hidup



	Utama untuk Dusun Karangtanjung, Dusun Joho, Dusun Babadan, Dusun Jurugan, dan Dusun Wonorejo	dan Kehutanan, tanggal 23 Oktober 2020
32.	Penyaji Terbaik I pada Festival Kethoprak Antar Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, tanggal 24 Oktober 2020
33.	Juara I Lomba Cerdas Cermat Sejarah atas nama RR. Shinta Almira Nirboyo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, tanggal 26 Oktober 2020
34.	Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, November 2020
35.	Peringkat II STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) <i>Award</i> Kategori <i>Supply Creation</i>	Kementerian Kesehatan RI, tanggal 13 November 2020
36.	Juara Umum Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 disejumlah kategori, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Peringkat 3 kategori Terminal Sehat Tipe C, Terminal Condongcatur, Depok, Sleman• Peringkat I PT. Sarina Vidi dan Peringkat III CV. Shana Sejahtera kategori Rumah Makan, Restoran Binaan Pemerintah Kabupaten Sleman• Peringkat I Sari Dewi Catering kategori Jasaboga Golongan A• Peringkat II Hotel Grand Cokro kategori Restoran Hotel	Kementerian Kesehatan RI, tanggal 17 November 2020
37.	Pemerintah Daerah Terbaik dalam Implementasi e-Payment Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tanggal 18 November 2020
38.	Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memiliki karya inovatif dan inspiratif dalam menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan PAUD selama masa pandemi Covid-19, atas nama Ibu Chita Faradilla Ambarkusumawati, S.PD.Gr, guru pada TK Islam 31 Sleman	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 21 November 2020
39.	Penghargaan Terbaik III Kepala Sekolah Dedikatif dan Inovatif Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Tingkat Nasional untuk SMP Muhammadiyah 1 Prambanan atas nama Ibu Daswati Rofiatun Sahifah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 23 November 2020



40.	Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Nasional Tahun 2020	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 25 November 2020
41.	Bhumandala Kanaka Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2020 kategori Simpul Jaringan Terbaik	Badan Informasi Geospasial, 27 November 2020
42.	Bhumandala Kencana Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2020 kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik	Badan Informasi Geospasial, 27 November 2020
43.	Penghargaan Kepala Sekolah Inspiratif Tingkat Nasional Tahun 2020 untuk SMP Negeri 2 Pakem atas nama Ibu Tri Worosetyaningsih, M.Pd.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 November 2020
44.	<i>Silver Winner of Indonesia Trade Award 2020, Government Creativity, Innovation, Entrepreneurship & Leadership (CIEL) Award</i>	Markplus Inc
45.	Nusantara Award 2020 kategori Kabupaten Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan & Strategi Peningkatan Ekonomi Berbasis Digital	Indonesia Popular Mandiri, tanggal 7 Desember 2020
46.	Nusantara Award 2020 kategori Kepala Daerah Terinovatif dan Kreatif	Indonesia Popular Mandiri, tanggal 7 Desember 2020
47.	Upakarti IKM Batik Sleman	Kementerian Perindustrian (diserahkan oleh Wakil Presiden), tanggal 10 Desember 2020
48.	Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2020	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 14 Desember 2020
49.	<i>Innovative Government Award 2020</i> sebagai Kabupaten Sangat Inovatif	Kementerian Dalam Negeri, tanggal 18 Desember 2020
50.	Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Roro Jonggrang Nomor 2 Beran Tridadi Sleman 55511

Telepon(0274) 866820 Faximile (0274) 866820

Website : www.inspektorat.slemankab.go.id E-mail : inspektorat@sleman.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sleman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sleman, 23 Maret 2021

Inspektur Kabupaten



[Signature]
HERY DWIKURYANTO, S.H, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640710 199303 1 012